

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Pengantar

Sejatinya, alasan keberadaan (*raison d'etre*) propinsi Sulawesi Selatan, seperti propinsi lain di Indonesia, adalah menciptakan peluang bagi penduduknya untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensi spesifik yang dimiliki, serta sebagai media bagi tumbuhkembangnya tatanan internalnya--dalam hal ini berupa komunitas yaitu tatanan yang berbasis wilayah seperti desa, kabupaten dan kota, serta tatanan fungsional yang mewujud dalam bentuk lembaga dan organisasi kemasyarakatan--menurut cara yang dipilih secara mandiri oleh masing-masing tatanan internal. Di samping itu, propinsi semestinya pula memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas ketahanan nasional.

Interpretasi misi sesuai dengan *raison d'etre* yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa peningkatan kualitas manusia seutuhnya haruslah dijadikan tujuan, bahkan esensi, pembangunan. Membantu dan memberi peluang kepada setiap orang untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya adalah suatu keniscayaan, sama sekali bukan karena manusia yang berkualitas dibutuhkan untuk menunjang pencapaian suatu tujuan pembangunan yang didefinisikan dari perspektif lain.

Pembangunan pada tataran propinsi semestinya mewujud dalam bentuk penciptaan peluang kepada setiap daerah kabupaten/kota dan setiap kelompok masyarakat untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan kualitas keberadaannya menurut karakteristik budaya dan kearifan lokal masing-masing. Dalam hal ini, budaya lokal bukan hanya sekadar diacu, tetapi juga terus dikembangkan dan diperkaya antara lain dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, pembangunan pada dasarnya merupakan proses reaktualisasi dan revitalisasi budaya lokal agar senantiasa terkait dengan perubahan yang dibawa oleh spirit zaman (*zeitgeist*) sehingga dapat memelihara keterkaitan (interkoneksi) dengan lingkungannya. Di samping itu, pembangunan bukan pula sekadar penyaluran aspirasi dari tatanan internal, tetapi jauh lebih maju, karena memfasilitasi setiap tatanan internal untuk mewujudkan aspirasi masing-masing dengan cara yang dipilihnya secara mandiri pula.

Pendekatan pembangunan ini selain akan bermuara pada tumbuhkembangnya tatanan internal yang beragam yang mampu mengedepankan keunggulan lokal masing-masing, juga akan memperkuat dan memperkaya identitas dari setiap tatanan internal. Kondisi seperti itu akan bermuara pada terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai suatu komunitas pembelajar (*Evolutionary Learning Community*), komunitas yang terus mengembangkan diri dan memperkaya identitasnya dari hasil interaksi dengan lingkungannya dan dari pergeseran aspirasi tatanan internalnya. Hanya komunitas seperti ini yang mampu mempertahankan keberlangsungan keberadaannya (eksistensinya) di tengah laju perubahan global yang semakin meningkat sekaligus mampu memberikan kon-

tribusi berarti bagi peningkatan kualitas ketahanan nasional dalam menghadapi dinamika lingkungan strategisnya.

Senyatanya, pendekatan pembangunan ini merupakan interpretasi kreatif dari semangat UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), serta mengacu kepada Sains Baru (*New Science*) yang memosisikan kelembagaan masyarakat (wilayah maupun fungsional) sebagai suatu tatanan (sistem organik dengan derajat kompleksitas yang tinggi-*living system*), bukan sebagai sistem (mekanis) sebagaimana diasumsikan oleh sebagian besar pendekatan pembangunan yang dianut selama ini.

1.2 Pengertian

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Sulawesi Selatan adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional yang disesuaikan dengan potensi, kondisi dan aspirasi masyarakat

RPJPD Sulawesi Selatan merupakan dokumen induk yang memuat visi, misi, nilai, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan para pelaku pembangunan yang dituangkan dalam bentuk peraturan daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan untuk jangka waktu dua puluh tahun ke depan dengan maksud untuk menjadi pedoman dan arahan penyelenggaraan pembangunan daerah Sulawesi Selatan sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh para pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan berkelanjutan.

1.4 Landasan Hukum

RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan disusun berdasarkan Pancasila sebagai landasan idiil, Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional sebagai landasan operasional dan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 no. 53, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

1.5 Pendekatan dan Sistematika

Keberhasilan pelaksanaan rencana banyak ditentukan oleh ketepatan memprediksi pengaruh dinamika perubahan yang dipicu secara internal oleh pergeseran aspirasi masyarakat dan secara eksternal oleh dinamika lingkungan strategis (global). Mengingat bahwa hampir mustahil menjamin ketepatan prediksi itu untuk jangka waktu yang relatif panjang (20 tahun), maka RPJPD Sulsel disusun dengan lebih memberikan perhatian kepada upaya untuk memelihara atau bahkan meningkatkan kemampuan Sulsel untuk melakukan proses **adaptasi-kreatif** demi untuk menjaga atau bahkan meningkatkan kualitas keberadaannya.

Adaptasi-kreatif merupakan kemampuan suatu tatanan (sistem organik kompleks) untuk melakukan proses penyesuaian diri terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal dan pergeseran aspirasi internalnya. Proses ini mewujudkan dalam bentuk penyesuaian struktur internal sedemikian rupa--tanpa harus kehilangan identitas diri, karena senantiasa mengacu kepada diri sendiri, *self-reference*--sehingga pertukaran komoditas dan jasa dengan lingkungan dapat tetap terpelihara. Di samping itu, proses adaptasi-kreatif juga mengupayakan untuk memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas lingkungannya.

Kemampuan adaptasi-kreatif tergantung kepada Kapasitas Swatata (*self-organizing capacity*) yang dimiliki. Sedangkan Kapasitas Swatata ditentukan oleh keberhasilan penyelenggaraan misi di masa lalu, khususnya peningkatan kualitas manusia. Di samping itu, ditentukan pula oleh seperangkat indikator yang merefleksikan 3 (tiga) hal. *Pertama*, kualitas keragaman tatanan internal yang membentuk wilayah Sulawesi Selatan. Semakin tinggi keragaman internal akan semakin tinggi pula kapasitas swatata yang dimiliki. Keragaman internal hanya dapat dipelihara jika setiap tatanan internal memiliki kemandirian dalam menyelenggarakan fungsi dan peran masing-masing. *Kedua*, kualitas interkoneksi antartatanan internal. Interkoneksi memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, materi dan jasa antartatanan internal. *Ketiga*, identitas propinsi. Pada dasarnya, identitas merupakan *perekat maya* antartatanan internal. Identitas akan mengarahkan dan menggalakkan kualitas interkoneksi antartatanan internal sehingga tercipta kerjasama yang bersifat sinergis.

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan, maka rumusan visi dan misi serta berbagai kebijakan strategis lainnya yang ditetapkan pada rencana terdahulu perlu dikaji kembali tingkat relevansinya dengan aspirasi masyarakat serta kondisi daerah Sulawesi Selatan pada saat ini. Demikian pula halnya dengan berbagai arahan kebijakan yang ditetapkan pada RPJP Nasional. Hasil kajian itu bermuara pada perumusan kembali visi

dan misi serta strategi dasar pembangunan Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 2008 - 2028.

Pendekatan yang diuraikan di atas pada dasarnya merupakan wujud dari pendekatan teknokratik yang kemudian disempurnakan dengan mengombinasikannya dengan aspirasi masyarakat (pendekatan partisipatif) yang dikumpulkan melalui serangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang).

RPJPD Propinsi Sulawesi Selatan hasil dari pendekatan yang disebutkan di atas selanjutnya disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan yang menjabarkan pendekatan pembangunan yang di-anut serta posisi dan fungsi RPJPD sebagai dokumen acuan dalam perumusan program pembangunan di Sulawesi Selatan selama kurun waktu 2008-2028.
- Bab II : Rona Wilayah Sulawesi Selatan yang menguraikan potret dan evaluasi terhadap penyelenggaraan misi Sulawesi Selatan serta Kapasitas Swatata yang dimiliki Sulsel pada saat ini.
- Bab III : Visi, Misi dan Strategi Pembangunan Jangka Panjang Sulawesi Selatan 2008-2028.
- Bab IV : Arah dan Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2008 -2028.
- Bab V : Kaidah Pelaksanaan.
- Bab VI : Penutup.

BAB II

RONA WILAYAH

Rona wilayah dievaluasi pada 2 (dua) tataran. *Pertama*, tataran individu yang dilakukan dengan mengevaluasi *Kualitas Manusia*. Senyatanya, evaluasi pada tataran ini merupakan ke-niscayaan karena keberhasilan pembangunan ssmestinya diukur dari keberhasilan untuk meningkatkan kualitas manusia seutuhnya. *Kedua*, tataran kolektif, yaitu mengevaluasi Kapasitas Swatata Sulsel dan kinerja Sulsel dalam melaksanakan misinya. Misi yang dimaksudkan disini merupakan perwujudan dari alasan keberadaan (*raison d'etre*) Sulsel, yaitu sebagai media bagi tumbuh berkembangnya daerah kabupaten / kota serta komunitas masyarakat menurut cara yang dipilih masing-masing sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas ketahanan nasional.

Senyatanya, kedua tataran itu saling berinteraksi. Manusia merupakan esensi dari komunitas, manusia yang berkualitas akan memberikan kontribusi kepada peningkatan kualitas komunitas atau tatanannya. Sebaliknya juga benar, bahwa komunitas yang sehat akan mendorong atau membuka peluang bagi peningkatan kualitas manusia pada tataran individu.

2.1 Kualitas Manusia

Kualitas manusia memiliki dimensi yang luas, karena tidak hanya menyangkut kualitas hidup, tetapi juga berkaitan dengan sikap (karakter) dan wawasan.

Umumnya, kualitas hidup diukur dengan menggunakan *Indeks Pembangunan Manusia* (IPM) yang merupakan indikator ganda (*composite indicator*) yang merefleksikan tingkat pengetahuan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Mengingat bahwa indeks ini tidak mencerminkan secara eksplisit kualitas pendidikan dan kesehatan, maka perlu dilengkapi dengan indikator lain yang mencerminkan kualitas secara eksplisit. Indikator dimaksud antara lain berupa persentase kelulusan dalam Ujian Akhir Nasional (untuk semua strata pendidikan), angka kematian bayi (IMR), prestasi Olah Raga dan Kesenian. Untuk mengetahui posisi relatif Sulsel, maka semua indikator itu dibandingkan dengan rata-rata nasional.

Wawasan merupakan perwujudan kesadaran seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya, seperti wawasan sebagai anggota komunitas, sebagai warganegara atau bahkan sebagai warga dunia, wawasan yang berkaitan dengan iptek dan sosial-budaya, termasuk politik. Wawasan mewujud dalam bentuk format dan kualitas aspirasi atau suara (*voice*) dalam arti luas, sedangkan sikap mewujud dalam bentuk akhlak (etika) dan moral.

Dalam kurun waktu 1999-2006, IPM Sulawesi Selatan terus meningkat dari 63,6 (1999), menjadi 65,3 (2002), 67,8 (2004), 68,1 (2005), dan 68,7 (2006). Meskipun demikian, capaian itu masih di bawah rata-rata nasional 71,10. Selain itu, laju peningkatan IPM Sulawesi Selatan masih lebih rendah dari provinsi lain sehingga secara nasional, dalam

kurun waktu tersebut, peringkat IPM Sulawesi Selatan terus menurun dari 17 (1999) menjadi 21 (2002), dan ranking 23 pada tahun 2005. Fakta ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Sulawesi Selatan relatif tertinggal.

Kondisi kualitas hidup itu bermuara pada kualitas wawasan dan sikap masyarakat Sulsel. Kalangan masyarakat berpendapatan rendah cenderung menjadi *price-taker*. Itu karena perhatian mereka tersita untuk bagaimana bertahan hidup atau bagaimana memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Akhlak dan moral kalangan ini memang masih banyak dipengaruhi oleh ajaran agama dan kearifan budaya lokal, tetapi sangat labil. Dalam arti, mereka sangat rentan untuk dimanfaatkan oleh kalangan lain.

Kalangan menengah, khususnya yang hidup di kawasan perkotaan, mengalami pergeseran sikap dan wawasan yang cukup signifikan. Kearifan lokal secara perlahan tetapi pasti terpinggirkan dan digantikan oleh nilai-nilai baru yang dibawa oleh modernisasi yang bernuansa materialisme dan individualisme. Dalam hal ini, wawasan sosial yang sebelumnya mengedepankan kepentingan bersama yang dipenuhi secara bersama (semangat gotong royong) telah digeser oleh semangat individualisme dan kompetisi.

Kompetisi telah memasuki hampir semua kehidupan masyarakat. Kebijakan di bidang pendidikan dan olah raga misalnya, lebih diarahkan untuk memenangkan pertandingan sehingga melupakan esensi pendidikan dan olah raga sebagai media pembinaan watak dan prestasi. Kearifan dalam memahami perbedaan (pluralisme) yang disimpulkan dalam jargon *Bhinneka Tunggal Ika* telah digantikan oleh obyektivisme sempit yang hanya mampu melihat kebenaran dari perspektifnya sendiri. Nilai-nilai dasar yang menopang budaya lokal juga telah mengalami transformasi. Demikian pula halnya dengan pengembangan kesenian yang bukan lagi untuk menambah kepekaan sisi kemanusiaan, tetapi telah mengalami reduksi, yaitu untuk kepentingan ekonomi (pariwisata).

Wawasan ekologis yang merupakan sendi utama dari kearifan lokal budaya Sulsel juga mengalami pergeseran. Eksploitasi sumberdaya yang dilakukan seakan tanpa batas tanpa memperhatikan kemampuan lingkungan untuk memperbaharui dirinya menunjukkan pergeseran wawasan ini. Wawasan kebangsaan juga mengalami kecenderungan yang sama. Itu tercermin pada menurunnya semangat bela negara, dan tergesernya kepentingan bangsa dan negara oleh kepentingan individu dan atau kelompok. Eksistensi Pancasila sebagai landasan filosofis kehidupan berbangsa dan bernegara semakin banyak dipertanyakan. Kecenderungan ini menunjukkan bahwa masyarakat Sulsel, seperti masyarakat Indonesia pada umumnya, sedang mengalami kegamangan identitas kebangsaan.

Wawasan keagamaan juga tidak luput dari pergeseran. Pertimbangan keagamaan bukan lagi menjadi acuan utama untuk tidak mengatakan telah terlupakan. Muaranya tergambar dengan jelas berupa semakin maraknya dekadensi moral, maraknya narkoba dan KKN, sampai pada gaya hidup permisif yang menjurus pada Hedonisme. Walaupun demikian, perlu digarisbawahi bahwa dalam beberapa tahun terakhir, terlihat adanya arus balik berupa mulai menjamurnya kegiatan berbagai kelompok masyarakat yang ber-

nuasa spiritualitas. Tetapi masih terlalu dini untuk menyimpulkannya sebagai fenomena bangkitnya spiritualitas di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan. Dapat saja hal itu hanya merupakan perwujudan dari *materialisme spiritual*, suatu fenomena yang sedang mengglobal saat ini yang berupaya mencari kepuasan pemenuhan kebutuhan melalui jalan spiritual walaupun pada dasarnya tetap menganut materialisme.

Bertolak belakang dengan bidang kehidupan lainnya yang diuraikan sebelumnya, imbasan budaya modern tidak atau belum memengaruhi secara nyata wawasan iptek masyarakat Sulsel. Malah, wawasan intelektual masyarakat Sulsel terlihat mengalami degradasi. Ini ditunjukkan oleh kurangnya karya tulis, terobosan-terobosan dan inovasi di kalangan masyarakat yang bermuatan iptek. Tidak berlebihan jika disimpulkan bahwa kalangan menengah dan atas pun telah terjatuh ke dalam kelompok *price-taker* di bidang ilmu dan teknologi.

Uraian di atas bermuara pada simpulan bahwa pada umumnya wawasan dan sikap masyarakat Sulawesi Selatan telah banyak bergeser akibat pengaruh yang dibawa oleh modernisasi. Pada satu sisi, proses ini membuka peluang kepada Sulawesi Selatan untuk menjaga interkoneksi dengan lingkungan strategisnya, tetapi pada sisi lain sangat berpotensi untuk membuat masyarakat melupakan identitas atau jati diri mereka yang spesifik yang justru merupakan modal utama dalam menjaga atau bahkan meningkatkan kualitas interkoneksi dengan lingkungan global dimasa-masa yang akan datang.

Faktor Penyebab

Relatif rendahnya angka IPM Sulsel dapat ditelusuri penyebabnya dengan mengkaji kinerja pembangunan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan.

Kinerja pendidikan diukur dengan 2 (dua) parameter, yaitu *Rata-rata Lama Sekolah* dan *Angka Melek Huruf*. Rata-rata lama sekolah penduduk Sulawesi Selatan pada tahun 2005 berada pada indeks 7, sedikit meningkat dari 6,8 (2004), 6,8 (2002) dan 6,5 (1999). Di bandingkan dengan provinsi lain, pada tahun 2005 Sulawesi Selatan hanya mengungguli Sulawesi Barat (6), Papua (6,2), NTT (6,3), Bangka Belitung (6,6), Jawa Tengah (6,6), NTB (6,6), Kalbar (6,6) dan Gorontalo (6,8). Bahkan di Sulawesi, provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah, memiliki indeks yang lebih tinggi dibandingkan dengan Sulawesi Selatan.

Dalam hal Angka Melek Huruf, indeks yang dicapai Sulawesi Selatan pada 2005 hanya 84,6, tidak berbeda jauh dengan tahun 1999 (83,2), 2002 (83,5), 2004 (84,5). Pada tahun 2005, angka ini menempati ranking yang sangat rendah di Indonesia, hanya lebih tinggi dari Papua (74,9), Nusa Tenggara Barat (78,8) dan Sulawesi Barat (83,4). Bahkan, sebagian besar provinsi di Sulawesi memiliki indeks yang lebih baik dibandingkan dengan Sulawesi Selatan.

Dibandingkan dengan indeks yang dicapai di bidang kesehatan dan kesejahteraan yang akan dijelaskan kemudian, terlihat bahwa kinerja pendidikanlah yang memberikan kontribusi terbesar terhadap rendahnya IPM Sulsel.

Setidaknya, ada 2 (dua) hal yang menyebabkan ketertinggalan di bidang pendidikan. *Pertama*, adalah ketersediaan dan sebaran sarana dan prasarana pendidikan. Distribusi sekolah masih memerlukan perbaikan. Ada beberapa permukiman yang memiliki jarak yang relatif jauh ke sekolah. Di samping itu, fasilitas yang ada juga cenderung semakin tidak terpelihara, khususnya pada daerah-daerah pedalaman dan pulau-pulau kecil. Penyebabnya, terutama oleh keterbatasan kemampuan pemerintah dalam pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan, sebagaimana tercermin pada APBD Sulsel yang mengalokasikan hanya sekitar 4,6% - 6,1% untuk sektor pendidikan dalam lima tahun terakhir, meskipun angkanya meningkat dua kali lipat; 52,7 milyar rupiah (di luar gaji) pada tahun 2003 menjadi 104,5 milyar rupiah (di luar gaji) pada tahun 2007. Alokasi dana untuk pendidikan pada APBD kabupaten kota tidak jauh berbeda, meskipun kabupaten kota di Sulawesi Selatan memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pendidikan relatif lebih besar dari kabupaten kota lainnya di Indonesia serta meningkat enam kali lipat dalam lima tahun terakhir, 50,4 milyar rupiah (total untuk seluruh kabupaten kota di Sulsel) pada tahun 2003 menjadi 294,2 milyar rupiah pada tahun 2007. Demikian juga dengan dana dekonsentrasi dan tugas perbantuan untuk pendidikan yang diperoleh provinsi Sulawesi Selatan relatif lebih besar dari provinsi lainnya di Indonesia.

Yang menarik adalah bahwa kualitas pendidikan tingkat dasar dan menengah di Sulsel tidak sejalan dengan indikator pendidikan yang disebutkan di atas. Jika kualitas diukur dari capaian kelulusan dalam Ujian Akhir Nasional (UAN), maka Sulawesi Selatan memiliki posisi yang relatif baik di dibandingkan dengan propinsi lain. Secara nasional posisi Sulawesi Selatan dalam persentase kelulusan UAN SLTP dan SLTA meningkat dari ranking sembilan (9) pada tahun 2004 menjadi ranking tiga pada tahun 2005. Data ini menunjukkan bahwa sekolah-sekolah pada umumnya telah mampu menerapkan manajemen sekolah dan proses pembelajaran yang efektif dan secara langsung terkait pula dengan kualitas dan pemerataan tenaga pendidikan. Prestasi ini tidak dapat dilepaskan dari program sekolah unggulan yang diterapkan pemerintah sejak beberapa tahun yang lalu.

Kedua, adalah akses masyarakat ke sekolah. Di duga aspek inilah yang lebih menentukan rendahnya kinerja pendidikan di Sulsel. Senyatanya, masyarakat memiliki keterbatasan untuk menyekolahkan anaknya karena keterbatasan keuangan. Data Susenas 2005 menunjukkan bahwa alokasi pengeluaran masyarakat untuk pendidikan relatif kecil, yaitu rata-rata Rp. 4.332 / bulan atau sebesar 2,27% dari total pengeluaran per kapita masyarakat, di mana porsi terbesar dari total pengeluaran dimaksud adalah untuk konsumsi pangan, sebesar 61,4% atau senilai Rp. 2.699,378,-. Makin rendah jumlah pengeluaran sebulan makin rendah pula alokasi pengeluaran untuk pendidikan.

Dari distribusi menurut kelompok jumlah pengeluaran, porsi untuk pendidikan membesar seiring dengan meningkatnya pendapatan. Ini menunjukkan bahwa kesadaran akan pendidikan cukup tinggi di masyarakat Sulsel, khususnya bagi golongan berpendapatan tinggi. Mungkin demikian pula dengan kelompok berpendapatan rendah, tetapi mereka tidak mampu memenuhinya karena sebagian besar pendapatan mereka terserap untuk memenuhi kebutuhan primer.

Di samping itu, faktor non-ekonomi juga ikut berperan, antara lain *Nilai Anak*. Khusus bagi kalangan petani, yang merupakan kelompok terbesar dari masyarakat Sulawesi Selatan, anak lebih banyak dipandang sebagai tenaga kerja yang dapat membantu meringankan pekerjaan.

Berbeda dengan pendidikan, kinerja pembangunan kesehatan di Sulawesi Selatan cukup menggembirakan, setidaknya dilihat dari capaian Angka Harapan Hidup (AHH) yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional. AHH penduduk Sulawesi Selatan pada tahun 2005 sebesar 68,7, bertahan dari tahun 2004 (68,7), 2002 (68,6) dan 1999 (68,3). Di bandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, posisi Sulawesi Selatan untuk indikator ini cukup baik, hanya berada di bawah Yogyakarta (72,9), DKI Jakarta (72,5), Sulut (71,7), Jawa Tengah (70,6), Kalteng (70,7), Riau (70,7), Bali (70,4) dan Kaltim (70,3).

Kinerja yang cukup baik ini sejalan dengan membaiknya beberapa indikator lain bidang kesehatan, termasuk yang menjadi sasaran *Millenium Development Goals* (MDGs). Sebagai contoh, untuk sasaran MDGs keempat, *menurunkan angka kematian balita*, Angka Kematian Balita di Sulsel pada tahun 2006 hanya 0.02, sementara Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup hanya 13.2. Indikator ini telah melebihi target MDGs Indonesia tahun 2015 yaitu Angka Kematian Bayi 45.7. Untuk Sasaran MDG's kelima, *meningkatkan kesehatan ibu*, Angka Kematian Ibu Melahirkan di Indonesia sekarang adalah 307/100.000 kelahiran dan ditargetkan menjadi 153 pada tahun 2015, sedangkan di Sulsel kini telah mencapai 163. Indikator bidang kesehatan lainnya yang mengalami perbaikan adalah persentase rumah sehat, jumlah pertolongan persalinan, cakupan imunisasi dan cakupan program Keluarga Berencana.

Meskipun demikian, sejumlah indikator lain mengalami penurunan, seperti, banyaknya bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) cenderung naik dan sekarang menjadi 1,5%, jumlah bayi yang mendapatkan ASI eksklusif menurun dan sekarang menjadi 43,24%. Jumlah penduduk yang mengikuti Jaminan Pemeliharaan Kesehatan masih relatif rendah (10,23%). Demikian pula jumlah penduduk yang memanfaatkan fasilitas kesehatan melalui kunjungan ke Puskesmas menurun menjadi 39.724 pengunjung (tahun 2006). Selain itu, daya tanggap terhadap penyakit menular tertentu seperti flu burung, HIV/AIDS, demam berdarah dan sebagainya, belum optimal, dan masih jauh dari sasaran keenam dari MDGs, yaitu *menurunkan angka HIV, malaria dan penyakit menular lainnya*.

Perbaikan sejumlah indikator kesehatan tersebut didukung oleh peningkatan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan seperti sumberdaya sarana dan tenaga kesehatan. Jumlah fasilitas kesehatan (rumah sakit, puskesmas, termasuk puskesmas pembantu dan puskesmas keliling) per 10,000 penduduk naik menjadi 2,4 pada tahun 2006. Sementara itu jumlah tenaga kesehatan per 10.000 penduduk meningkat dari 8,8 pada tahun 2002 menjadi 11,6 pada tahun 2006. Jumlah dokter pada setiap fasilitas kesehatan dalam kurun 2002-2006 rata-rata satu orang dengan kecenderungan meningkat. Hal ini juga sejalan dengan jumlah dana yang dialokasikan pemerintah di bidang kesehatan yang jumlahnya 50% lebih besar dari alokasi untuk pendidikan, yaitu berkisar 7,3% - 8,7% dalam lima tahun terakhir,

Meskipun sumberdaya sarana dan tenaga kesehatan terus meningkat, penyebaran dan kualitasnya belum memadai sehingga belum dapat menjangkau seluruh masyarakat Sulsel, terutama yang berada di pelosok dan kepulauan. Dalam hal tenaga medis, dokter yang bertugas di Puskesmas umumnya hanya dokter umum dan dokter gigi.

Sebagai *quazy private good*, layanan kesehatan mestinya dapat juga dikelola oleh masyarakat atau komunitas. Namun, harapan untuk menyerahkan sebahagian pengelolaan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat juga belum terpenuhi. Sejumlah yayasan dan organisasi kemasyarakatan memang telah menginisiasi pembentukan poliklinik, rumah bersalin, bahkan rumah sakit, namun jangkauannya sangat terbatas, dan justru berada di kota, bukan di pelosok yang tidak dijangkau oleh pelayanan kesehatan pemerintah. Kapasitas pelayanan sejumlah rumah sakit swasta di kota besar juga masih terbatas.

Seperti halnya dengan pendidikan, keterbatasan pendapatan merupakan salah satu penyebab utama rendahnya akses masyarakat kepada fasilitas pelayanan kesehatan. Data Susenas 2005 menunjukkan alokasi pengeluaran masyarakat untuk kesehatan relatif kecil, yaitu rata-rata hanya Rp. 2.910/bulan. Jumlah ini bervariasi menurut kabupaten kota dan kelompok jumlah pengeluaran. Makin rendah jumlah pengeluaran bulanan makin rendah pula alokasi pengeluaran kesehatan. Hasil Susenas menunjukkan kecenderungan penduduk untuk kesehatan serupa dengan untuk pendidikan, yaitu porsi alokasi pengeluaran untuk kesehatan menjadi semakin besar seiring dengan meningkatnya pengeluaran. Data ini setidaknya dapat digunakan untuk menduga bahwa kesadaran akan kesehatan cukup tinggi kalangan masyarakat Sulsel, meskipun terkendala oleh kemampuan yang rendah.

Kendala aksesibilitas kesehatan akibat pendapatan rendah sejogyanya dapat diatasi melalui program asuransi kesehatan. Namun, jumlah penduduk yang mengikuti Jaminan Pemeliharaan Kesehatan masih relatif kurang (10,23%). Asuransi Kesehatan bagi Warga Miskin (Askeskin) juga masih terbatas jangkauannya, terutama karena umumnya hanya bersifat program nasional. Terdapat hanya sejumlah kecil kabupaten/kota yang telah memprogramkan jaminan kesehatan bagi warga miskin di daerahnya.

Selain karena faktor pendapatan, rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan juga dipengaruhi oleh kondisi geografis, faktor sosial (kebiasaan dan perilaku) dan budaya yang bermuara pada perilaku hidup bersih dan sehat. Kecenderungan ini jelas terlihat di kalangan masyarakat terpencil di dataran tinggi, komunitas pesisir dan penduduk pulau-pulau, di mana ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan juga relatif tertinggal di dibandingkan dengan daerah lainya. Demikian juga dengan sanitasi lingkungan yang umumnya buruk di wilayah seperti itu terutama yang berhubungan dengan fasilitas toilet dan penyediaan air bersih. Simpulannya, meskipun Angka Harapan Hidup secara rata-rata sudah cukup memadai, layanan kesehatan pada masyarakat terpencil serta kondisi sanitasi untuk hidup sehat belum memadai. Sejumlah target MDGs tahun 2015 bidang kesehatan, seperti sasaran no. 4 dan no. 5 kini telah tercapai, tetapi ada target lain yang belum, seperti target no. 6 (penyakit menular) dan target no.7 (kelestarian lingkungan hidup).

Uraian di atas menunjukkan bahwa rendahnya indikator pendidikan dan kesehatan banyak ditentukan oleh tingkat pendapatan masyarakat yang relatif rendah. Perbaikan tingkat pendapatan masyarakat selain akan mendorong peningkatan IPM secara langsung, juga diharapkan akan meningkatkan kedua indikator itu yang selanjutnya bermuara pada semakin membaiknya IPM Sulsel. Walaupun upaya itu tidak mudah dilakukan, karena, seperti akan diperlihatkan pada uraian selanjutnya, tingkat pendapatan masyarakat juga banyak ditentukan oleh kualitas pengetahuan dan kesehatan masyarakat (tenaga kerja). Selain itu, beban pemerintah dan masyarakat untuk perbaikan pendidikan dan kesehatan dalam 20 tahun yang akan datang akan semakin berat, karena selain untuk menutupi dan mengejar kekurangan yang ada sekarang, juga untuk memenuhi pertumbuhan penduduk yang diperkirakan 1,5 kali lipat (bertambah 50%). Dalam lima tahun terakhir, laju pertumbuhan penduduk setiap tahun cenderung stabil dengan rata-rata 1.7%. Jika rata-rata laju pertumbuhan penduduk tersebut tidak dapat dikurangi, maka pada tahun 2028, jumlah penduduk Sulawesi Selatan akan menjadi sekitar 11 jutaan orang, atau bertambah sekitar 50% dari sekarang.

Upaya untuk mempercepat laju pertumbuhan pendapatan justru merupakan masalah tersendiri. Dalam beberapa tahun terakhir (2000-2005), propinsi Sulawesi Selatan mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, malah lebih tinggi dari rata-rata nasional--pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan rata-rata 5,21% per tahun, sedangkan secara nasional rata-rata 4,71% per tahun--tetapi nilai absolutnya belum cukup memadai untuk mendorong laju peningkatan pengeluaran riil per kapita--yang digunakan sebagai indikator perhitungan IPM--di atas rata-rata nasional. Pada tahun 2005 pengeluaran dimaksud mencapai 616,8, meningkat dari 615,2 (2004), 586,7 (2002) dan 571 (1999). Meskipun posisi ini lebih tinggi dibandingkan dengan 16 provinsi lain, tetapi masih tetap lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional (619,9).

Sejatinya, pertumbuhan ekonomi banyak ditentukan oleh dampak Permintaan Akhir (*final demand*) terhadap pembentukan Nilai Tambah Bruto (PDRB). Olehnya, ana-

lisis akan difokuskan kepada peluang pengembangan Permintaan Akhir. Di samping itu, proses penciptaan nilai tambah--yang banyak dipengaruhi oleh struktur perekonomian--perlu pula dikaji, karena sangat berkaitan dengan ketersediaan lapangan kerja dan pemerataan pendapatan yang menjadi kata kunci untuk meningkatkan IPM Sulsel.

Peluang dan Dampak Peningkatan Permintaan Akhir

Secara keseluruhan, dampak perubahan Permintaan Akhir terhadap penciptaan PDRB sebesar 0,78. Artinya, setiap peningkatan pada permintaan akhir domestik sebesar Rp. 100,- akan menciptakan penambahan Nilai Tambah Bruto sebesar Rp. 78,- Mudah dihitung bahwa untuk meningkatkan Nilai Tambah Bruto sebesar 1%, diperlukan peningkatan Permintaan Akhir sebesar Rp. 693 milyar

Dampak ini bervariasi menurut komponen permintaan akhir, dari yang tertinggi sebesar 0,84 yang ditimbulkan oleh Konsumsi Pemerintah sampai yang terkecil sebesar 0,75 yang ditimbulkan oleh Perubahan Stok dan Ekspor.

Data berkala dari tahun 2002-2006 menunjukkan bahwa tidak ada pergeseran yang berarti dari komposisi permintaan akhir. Konsumsi Rumah Tangga menurun dari 60,26% menjadi 58,78%, Konsumsi Pemerintah meningkat dari 16,82% menjadi 17,05 persen, tetapi Pembentukan Modal Tetap Bruto mengalami penurunan dari 19,3% menjadi 16,69%. Ekspor mengalami peningkatan cukup besar, yaitu dari 22,2% menjadi 37,11%. Nilai total permintaan akhir pada tahun 2005 Rp. 77,958 trilyun, diantaranya, yaitu sebesar Rp. 8,383 trilyun (10,75%), berupa impor. Komponen ini jelas tidak memberikan pengaruh pada pembentukan PDRB Sulsel.

Data di atas menunjukkan bahwa Konsumsi Rumah Tangga masih merupakan penyumbang terbesar dari Permintaan Akhir dan dampaknya terhadap penciptaan Nilai Tambah Bruto relatif besar, yaitu 0,80, terbesar kedua setelah Konsumsi Pemerintah. Peluang peningkatan komponen ini sulit dilakukan karena terkendala oleh rendahnya pendapatan rata-rata masyarakat.

Tingginya dampak Konsumsi Pemerintah terhadap penciptaan PDRB, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, menunjukkan bahwa komponen ini dapat digunakan sebagai instrumen untuk memicu laju peningkatan nilai tambah. Masalahnya, pemanfaatan komponen ini terkendala oleh kemampuan pemerintah sendiri. Seperti akan diuraikan pada sub bab berikut, pemerintah propinsi dan pemerintah daerah masih terkendala dari segi pembiayaan. Porsi PAD yang relatif kecil dibandingkan dengan subsidi pemerintah pusat menunjukkan keterbatasan dimaksud. Di samping itu, kemampuan pemerintah pusat juga menunjukkan kecenderungan yang semakin melemah dari tahun ke tahun.

Komponen Permintaan Akhir lainnya, Pembentukan Modal Tetap Bruto, merupakan motor perkembangan ekonomi yang sebenarnya. Walaupun, dampaknya terhadap penciptaan Nilai Tambah Bruto tidak terlalu besar dibandingkan dengan Konsumsi Rumah Tangga dan Konsumsi Pemerintah, yaitu 0,75.

Kegiatan investasi di Sulawesi Selatan yang senilai Rp. 8,09 trilyun (2005) memicu permintaan akhir di sektor bangunan sebesar 87,77%, diikuti oleh Perdagangan 7,25%, Industri 1,72% dan Angkutan 1,73%. Data ini menunjukkan bahwa kegiatan investasi di Sulawesi Selatan merupakan penggerak utama dari sektor bangunan (bandingkan permintaan antara sektor ini cuma sekitar Rp. 567 milyar saja). Di samping itu, data dimaksud sekaligus menunjukkan bahwa kegiatan investasi di Sulsel lebih banyak berkaitan dengan pembangunan infra struktur.

Porsi komponen ini terhadap seluruh permintaan akhir 13,89% dan 11,63% (Rp. 10,831 trilyun) jika impor tidak dihitung. Jelas terlihat bahwa untuk menunjang kegiatan investasi diperlukan impor sebesar Rp. 2,74 trilyun (25,30%) yang sebagian besar (atau bahkan hampir semuanya) merupakan produk industri. Jumlah kebutuhan investasi yang dipasok oleh sektor bangunan jelas berubah dalam jumlah nominalnya, walaupun secara persentase menurun menjadi hanya sebesar 65,56%, demikian pula halnya dengan sektor-sektor lainnya.

Yang menarik output dari industri pengolahan domestik yang digunakan sebagai input dalam investasi hanya sebesar Rp. 139 milyar saja. Ini menunjukkan bahwa industri pengolahan di Sulsel masih dalam taraf baru berkembang (51,29% dari permintaan akhir diserap oleh Konsumsi Rumah Tangga, walaupun porsi untuk ekspor cukup besar, yaitu 36,37%).

Di samping diperlukan untuk meningkatkan kapasitas, investasi juga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas proses produksi--misalnya melalui pemanfaatan sarana dan prasarana produksi yang semakin efisien, dan peningkatan kualitas tenaga kerja--yang lebih penting adalah investasi dapat digunakan untuk memperluas spektrum kegiatan ekonomi. Yang disebutkan terakhir ini yang memiliki pengaruh paling besar bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Data menunjukkan bahwa investasi di Sulsel tidak terlalu tinggi, malah ada kecenderungan mengalami penurunan. Padahal, secara domestik Sulsel memiliki potensi yang cukup besar. Data dari Tabel I/O Sulsel menunjukkan bahwa pada tahun 2005, Komponen Gaji dan Upah serta Surplus Usaha mencapai nilai sebesar Rp. 48,31 trilyun. Nilai ini lebih besar dibandingkan dengan nilai Konsumsi Rumah Tangga ditambah dengan Pembentukan Modal Tetap, yang hanya sebesar Rp. 40,67 trilyun. Perbedaan antara kedua angka ini menunjukkan bahwa masih terdapat sedikitnya potensi domestik hampir sebesar Rp. 8 trilyun yang dapat digunakan untuk memicu pertumbuhan Permintaan Akhir pada tahun berikutnya. Secara rata-rata, potensi ini dapat memicu pertumbuhan Nilai Tambah Bruto sebesar 11,54%. Suatu laju yang sangat berarti untuk lebih menggalakkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan.

Potensi yang relatif besar tetapi belum termanfaatkan itu setidaknya menunjukkan bahwa iklim investasi di Sulawesi Selatan belum atraktif, termasuk untuk calon investor lokal.

Atraktif tidaknya suatu daerah bagi calon investor antara lain dapat dilihat dari persentase Surplus Usaha terhadap keseluruhan input yang digunakan dalam proses produksi. Untuk rata-rata seluruh sektor, persentase dimaksud sebesar 32,68%, bervariasi antarsektor, dengan urutan pertama sektor pertanian sebesar 61,95%, diikuti dengan sektor keuangan 58,84% dan sektor pertambangan dan galian 38,57%. Sedangkan sektor industri pengolahan hanya sebesar 17,30%.

Angka ini sebenarnya menunjukkan bahwa dari sisi potensi keuntungan bagi investor, Sulsel menawarkan peluang yang relatif besar. Untuk merealisasikan peluang itu, diperlukan adanya skenario pengembangan investasi yang lebih mendasar dari pihak pemerintah propinsi. Pengembangan sektor pertanian dan pertambangan jelas memiliki kendala berupa ketersediaan sumberdaya dan keniscayaan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu, peluang terbesar dan "teraman" adalah industri pengolahan yang justru memiliki prosentase yang relatif kecil. Beberapa kiat di sektor ini perlu diupayakan untuk meningkatkan porsi Surplus Usaha dimaksud, antara lain berupa peningkatan kualitas proses produksi (perbaikan koefisien teknologi) dan perluasan spektrum dari sektor industri ini. Tentunya, semua kebijakan itu tetap harus memperhatikan dampaknya terhadap pemerataan pendapatan dari masyarakat Sulawesi Selatan.

Komponen Permintaan Akhir lainnya yang dapat diandalkan untuk memicu pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan adalah Ekspor.

Walaupun ekspor merupakan komponen Permintaan Akhir yang memiliki dampak terkecil, setelah Perubahan Stok dan Pembentukan Modal Tetap Bruto, terhadap pembentukan Nilai Tambah Bruto, yaitu hanya sebesar 0,756, tetapi karena laju peningkatan kontribusinya terhadap Permintaan Akhir cukup tinggi, yaitu dari hanya sebesar 22,2% (2002) menjadi 37,11% pada tahun 2006--laju peningkatan yang cukup tinggi, 28,83%, lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan nasional yang hanya mencapai 15,86%--maka peranan ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan menjadi semakin besar dari tahun ke tahun.

Peran itu menjadi semakin signifikan, jika diamati komposisi dari sektor-sektor pendukung ekspor. Industri pengolahan menempati posisi pertama dengan kontribusi sebesar 46,84% disusul oleh sektor pertambangan dan galian 25,05%; sektor pertanian 14,68%; dan sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 10,59%. Komposisi ini sudah cukup sehat karena didominasi oleh sektor industri pengolahan yang memiliki indeks DP dan DK yang lebih besar dari satu, yang menunjukkan bahwa secara tidak langsung ekspor berperan mendorong dan menghela pertumbuhan sektor lainnya. Dengan kata lain, kebijakan untuk mendorong ekspor dari sektor industri pengolahan akan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan.

Namun, perhatian ekstra perlu diarahkan kepada dinamika lingkungan global. Di antara kelima komponen Permintaan Akhir, eksporlah yang paling rentan terhadap dinamika dimaksud. Dengan kata lain, perluasan spektrum ekspor perlu didasarkan kepada analisis yang matang terhadap dampak dari dinamika lingkungan global terhadap

komoditas ekspor yang akan dikembangkan. Dinamika ekspor dan impor akan diuraikan lebih jauh pada sub bab 2.2 (analisis keterkaitan ekonomi).

Selain berpengaruh terhadap penciptaan Nilai Tambah Bruto, peningkatan Permintaan Akhir secara langsung akan merangsang penciptaan lapangan kerja baru. Secara keseluruhan, dampak itu dapat dihitung dari rasio antara jumlah tenaga kerja pada seluruh sektor perekonomian dengan jumlah permintaan akhir domestik. Untuk tahun 2005, rasio itu bernilai 0,0382. Rasio ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan permintaan akhir domestik sebesar Rp. 1 milyar akan mendorong terciptanya lapangan kerja untuk 38 orang. Rasio ini bervariasi antar komponen permintaan akhir. Rasio terbaik dimiliki oleh Konsumsi Pemerintah, yaitu sebesar 0,052, sedangkan yang terkecil dimiliki oleh Pembentukan Modal Tetap yang hanya sebesar 0,0314.

Pada tahun 2005, jumlah pengangguran sebesar 581.000 orang. Data ini menunjukkan bahwa porsi penganggur terbuka mencapai 15,93% dari total angkatan kerja. Dapat juga dikatakan bahwa prosentase penduduk bekerja terhadap total angkatan kerja sebesar 84,07%. Dibandingkan dengan provinsi lain di Sulawesi, kinerja penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Selatan adalah yang terendah. Prosentase penduduk bekerja terhadap total angkatan kerja di Sulawesi Tengah sebesar 92,29%, Sulawesi Tenggara 89,07%, Gorontalo 85,96%, Sulawesi Utara 85,95%. Di bandingkan dengan rata-rata nasional yang mencapai 88,76%, Sulawesi Selatan juga lebih rendah.

Untuk meningkatkan porsi penyerapan tenaga kerja di atas rata-rata nasional, misalnya 90%, maka dibutuhkan penciptaan lapangan kerja sedikitnya untuk 180.000 orang. Mudah dihitung bahwa untuk maksud ini diperlukan peningkatan Permintaan Akhir Domestik sekitar Rp. 5,63 trilyun. Dikaitkan dengan dampak permintaan akhir terhadap PDRB yang diuraikan sebelumnya, terlihat bahwa peningkatan Permintaan Akhir dimaksud akan mendorong peningkatan PDRB sebesar 8,12%.

Struktur Ekonomi

Selain melalui upaya klasik berupa peningkatan Permintaan Akhir, sebagaimana telah dibahas sebelumnya, Nilai Tambah Bruto dapat pula ditingkatkan dengan memperbaiki kualitas proses produksi dan perluasan spektrum sektor produksi.

Kualitas proses produksi--menunjukkan kualitas manusia, teknologi dan manajemen pada suatu sektor--antara lain dapat diukur dari rasio antara Input Antara dengan Input Total. Semakin kecil rasio itu, semakin tinggi pula kualitas proses produksi. Pada tahun 2005, rasio dimaksud sebesar 27,75% dan 43,85% jika termasuk impor. Ini menunjukkan bahwa kualitas proses produksi di Sulawesi Selatan secara rata-rata dapat dikategorikan sebagai cukup baik. Rasio dimaksud jelas bervariasi menurut sektor, dengan sektor Pertanian dengan rasio terkecil (7,75%), diikuti oleh Pertambangan (8,14%), Keuangan (16,79%) dan Perdagangan (17,73%). Sektor dengan rasio terbesar adalah Industri Pengolahan (46,42%). Rasio dan urutan ini akan berubah jika impor ikut diperhitungkan,

yaitu sektor Keuangan (18,61%), Pertanian (21,08%), dan Perdagangan (23,16%). Industri Pengolahan tetap merupakan sektor dengan porsi Input Antara terbesar, yaitu 69,96%

Pada tataran tertentu upaya peningkatan output akan membuat biaya persatuan output akan meningkat atau dengan kata lain rasio antara Input Antara dengan Input Total akan semakin besar. Kondisi ini telah terjadi untuk perekonomian Sulsel. Secara rata-rata, ratio itu telah bergeser dari 36,81% pada tahun 2000 menjadi 43,85 pada tahun 2005 dengan pergeseran terbesar terjadi pada sektor pertanian. Untuk padi misalnya, pergeseran yang terjadi sangat signifikan, yaitu dari 12,60% pada tahun 2000 menjadi 19,21% pada tahun 2005. Sedangkan untuk sektor industri pengolahan relatif stabil, yaitu sekitar 70%. Kecenderungan ini perlu dicermati, karena pergeseran terbesar yang justru terjadi di sektor pertanian akan membuat posisi petani, yang merupakan tenaga kerja terbesar di Sulsel, menjadi semakin terjepit karena harus menanggung beban dan resiko yang semakin berat untuk kepentingan peningkatan produksi yang tidak seluruhnya dapat dinikmati mereka.

Selisih antara Input Total dengan Input Antara merupakan Nilai Tambah Bruto yang terdiri atas Upah dan Gaji, Surplus Usaha, Penyusutan, serta Pajak Tidak Langsung. Pada tahun 2005, prosentase keempat komponen itu adalah 31,12%; 58,20%; 7,63% dan 3,05%. Komposisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar nilai tambah (58,20%) dinikmati oleh pemilik modal, sedangkan yang dibagikan sebagai pendapatan untuk tenaga kerja yang terlibat relatif lebih kecil, yaitu hanya 31,12%.

Mengingat bahwa kualitas proses produksi dan komposisi dari Nilai Tambah Bruto bervariasi dari sektor ke sektor, maka untuk meningkatkan akurasi, analisis mesti dilakukan pada tataran sektor. Pada bab ini, analisis dimaksud hanya difokuskan kepada beberapa sektor yang memiliki posisi strategis. Disini, parameter strategis tidaknya suatu sektor dilihat dari 4 (empat) aspek, yaitu kontribusinya terhadap pembentukan output dan PDRB Sulsel, kontribusi terhadap pembentukan Ekspor, keterkaitan dengan sektor lainnya, serta kemampuannya dalam penyerapan tenaga kerja dikaitkan dengan tingkat Upah dan Gaji. Aspek pertama jelas tidak perlu diperdebatkan, sedangkan Ekspor (dan juga impor) diposisikan sebagai parameter strategik mengingat bahwa ekspor (dan impor) merupakan indikator keterkaitan antara Sulawesi Selatan dengan lingkungan strategisnya. Dengan kata lain, indikator ini menunjukkan secara langsung sensitivitas Sulsel terhadap dinamika lingkungan strategisnya. Keterkaitan antar sektor perlu ikut diperhitungkan karena menunjukkan kemampuan suatu sektor untuk mendorong dan menghela pengembangan sektor lainnya. Kemampuan penyerapan tenaga kerja berkaitan dengan tingkat dan distribusi pendapatan yang merupakan salah satu kata kunci dalam upaya peningkatan kualitas hidup dan kualitas manusia. Analisis dimaksud bermuara pada 3 (tiga) sektor strategis, yaitu Industri Pengolahan yang memenuhi semua kriteria; Pertanian juga memenuhi semua kriteria kecuali Indeks Daya Penyebarannya yang < 1 ; dan Perdagangan yang hanya tidak memenuhi kriteria keterkaitan antarsektor.

Sektor Pertambangan dimasukkan ke kelompok ini karena memberikan kontribusi terbesar--kedua setelah Industri Pengolahan--terhadap pembentukan Ekspor.

Pertanian

Sejatinya, kinerja perekonomian Sulsel dapat ditingkatkan jika masalah yang dihadapi oleh sektor pertanian dapat dipecahkan, karena--di samping merupakan sektor basis--sektor ini masih merupakan penyumbang terbesar terhadap PDRB Sulsel (31%). walaupun dari sisi output, sektor ini berada pada urutan setelah industri pengolahan, yaitu hanya menyumbang 20,06% dari output total.

Masalah pertama di sektor ini terletak pada komposisi Nilai Tambah Bruto. Sebagian besar nilai tambah itu diserap oleh Surplus Usaha (78,49%)--persentase ini lebih buruk dibandingkan dengan rata-rata seluruh sektor, yaitu sebesar 58,20%, sedangkan Upah dan Gaji hanya sebesar 18,74% yang masih harus dibagi kepada tenaga kerja yang jumlahnya relatif besar, yaitu 50,97% dari seluruh tenaga kerja. Hasilnya adalah pendapatan rata-rata untuk seorang buruh tani hanya Rp. 2.318.939 / tahun, jauh lebih kecil dari upah rata-rata untuk seluruh sektor, yaitu Rp. 6.332.771/tahun. Inilah penyebab utama ketimpangan distribusi pendapatan di Sulawesi Selatan. Ada 50,97% keluarga yang menikmati pendapatan 18,66% dari total pendapatan. Ketimpangan ini akan menjadi semakin besar jika diukur per kapita karena jumlah keluarga petani umumnya jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah keluarga tenaga kerja pada sektor lainnya.

Mengingat pertumbuhan sektor ini lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan sektor lain, sedangkan jumlah tenaga kerja belum dapat diturunkan secara signifikan, maka kecenderungan semakin membesarnya kesenjangan pendapatan di Sulsel akan menjadi semakin nyata.

Kualitas proses produksi yang direpresentasikan dengan rasio antara Input Antara dengan Input Total untuk sektor pertanian adalah sebesar 7,75% atau 21,08% jika termasuk impor. Angka ini relatif cukup baik dibandingkan dengan rata-rata Sulsel, yaitu 27,75% dan 43,85%. Walaupun demikian, masih terbuka banyak peluang untuk meningkatkan kualitas proses sektor ini, antara lain melalui penerapan teknologi serta manajemen lahan. Kendala yang dihadapi untuk kiat ini adalah kemampuan daya serap sumberdaya manusia terhadap teknologi yang setiap saat mengalami perkembangan. Di samping itu, masyarakat yang belum sepenuhnya siap untuk menerima inovasi dan penyempurnaan dalam manajemen lahan.

Tetapi jika dilihat dari perkembangan rasio ini, mencuat masalah strategis yang dihadapi oleh sektor pertanian di masa depan. Rasio dimaksud untuk padi mengalami peningkatan yang amat signifikan, yaitu dari 12,6% (data IO Sulsel 2000) menjadi 19,21% pada tahun 2005 (data IO Sulsel 2005). Ini, seperti telah disinggung sebelumnya, menunjukkan bahwa upaya peningkatan output persatuan lahan membutuhkan porsi input yang semakin besar untuk satu satuan output. Kontributor terbesar dari peningkatan itu adalah pupuk dan pestisida, yang meningkat dari 6,92% menjadi 12,4%.

Jika dikaji lebih jauh--sampai pada tataran mikro, tataran petani--kondisi ini merupakan akar dari semakin berkembangnya kemiskinan di kawasan perdesaan, tepatnya di kalangan petani. Kebutuhan input yang semakin besar membuat para petani umumnya terpaksa berutang untuk memenuhinya. Dengan kondisi alam yang semakin tidak bersahabat, kegagalan panen menjadi semakin tinggi. Konsekuensinya, petani semakin potensial terjatuh utang yang tidak terbayarkan.

Di samping itu, sebagian besar lahan pertanian di Sulsel memiliki ketergantungan yang semakin besar terhadap input yang umumnya harus diimpor, mulai dari pupuk dan pestisida, bahan bakar untuk traktor dan bahkan bibit. Tanpa input seperti itu, sawah-sawah yang ada hampir tidak mungkin lagi ditanami. Dibandingkan dengan kondisi beberapa dekade sebelumnya di mana sebagian besar input disediakan oleh alam dan kegagalan panen relatif kecil karena varietas yang digunakan sangat sesuai dengan kondisi lingkungannya, maka posisi petani menjadi semakin terjepit. Demi untuk mengejar sasaran yang berkaitan dengan kepentingan nasional (yang diwujudkan dalam peningkatan output sebesar mungkin), maka yang semakin banyak berkorban adalah petani yang notabene merupakan kalangan berpenghasilan paling kecil. Ini adalah bentuk ketidakadilan yang perlu segera dipecahkan.

Simpulan yang dapat ditarik adalah kemandirian lokal di bidang pertanian menjadi semakin berkurang tanpa adanya kompensasi yang sepadan di bidang lainnya.

Kiat lain yang dapat diterapkan adalah mengurangi kandungan impor yang pada umumnya berupa pestisida dan pupuk anorganik. Upaya ini di samping akan meningkatkan porsi nilai tambah juga mengandung arti strategis, yaitu mendorong penggalakan pertanian organik. Pada satu sisi, pergeseran ini mungkin pada tahun-tahun awal akan menurunkan output total sektor pertanian, tetapi pada sisi lain akan meningkatkan posisi tawarnya di pasar global, karena pada saat ini pangsa pasar produk pertanian organik menunjukkan kecenderungan yang semakin membaik. Artinya, kebijakan ini akan menunjang peningkatan ekspor Sulawesi Selatan.

Kebijakan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dapat pula dimulai dari sektor ini, yaitu dengan mengupayakan peningkatan persentase Upah dan Gaji, antara lain dilakukan dengan meningkatkan kualitas tenaga kerja, koperasi tenaga kerja yang memungkinkan tenaga kerja ikut memiliki saham dalam aset produksi, mengupayakan agar petani dapat terlibat langsung dalam kegiatan agribisnis, serta pengurangan secara sistematis prosentase jumlah naker. Kebijakan yang disebutkan terakhir sangat tergantung kepada kemampuan sektor lain untuk menerima limpahan naker itu.

Pengembangan pertanian, khususnya untuk sub-sektor perkebunan, melalui ekstensifikasi mesti dilakukan secara hati-hati karena kondisi topografi Sulsel yang sangat rentan. Eksploitasi yang berlebihan sangat potensial bermuara pada menurunnya daya dukung lingkungan. Disini diperlukan adanya Rencana Tata Ruang yang komprehensif yang memperhatikan kebutuhan untuk peningkatan kapasitas sektor pertanian, kenisca-

yaan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta keterkaitan industri (pengembangan agro-industri).

Kiat yang disebutkan terakhir akan lebih memperkuat posisi strategis sektor pertanian. Pada saat sekarang, sektor ini memiliki Indeks Daya Kepekaan (DK) yang lebih besar dari 1. Artinya, sektor ini sangat peka terhadap perubahan permintaan akhir, peningkatan permintaan akhir akan memicu peningkatan output sektor ini. Dengan berkembangnya agro-industri, maka Indeks DK sektor ini akan meningkat yang melambangkan semakin meningkatnya keterkaitan sektor ini dengan sektor lainnya. Keterkaitan lainnya--dilambangkan dengan Indeks Daya Penyebaran--pada dasarnya sulit ditingkatkan, karena sektor pertanian merupakan sektor primer (sebagian besar inputnya merupakan bahan alam, bukan bahan olahan).

Industri Pengolahan

Pengembangan sektor industri pengolahan merupakan alternatif terbaik bagi terjaminnya pertumbuhan perekonomian Sulawesi Selatan. Data I/O Sulsel (2005) menunjukkan bahwa sektor ini memiliki Indeks Daya Penyebaran dan Indeks Derajat Kepekaan yang lebih besar dari satu. Artinya, sektor ini merupakan sektor yang memiliki nilai strategis, karena mampu mendorong sekaligus menarik pengembangan sektor lain (yang merupakan sektor hulu dan hilirnya). Di samping itu, komponen upah dan gaji perkapita relatif tinggi, yaitu Rp. 15.191.742/tahun, dengan demikian akan lebih menjamin peningkatan sekaligus pemerataan pendapatan.

Senyatanya, sektor ini masih dalam taraf awal pengembangannya, sehingga terbuka banyak peluang untuk memicu laju pertumbuhannya. Yang pertama adalah dengan meningkatkan kualitas proses produksi. Sektor ini membutuhkan Input Antara sebesar 46,42% atau sebesar 69,96% jika komponen impor ikut dihitung (dari seluruh input). Prosentase Input Antara yang besar ini mengakibatkan nilai tambah sektor hanya sebesar Rp. 9,148 trilyun atau sebesar 16,92% dari seluruh nilai tambah. Padahal sektor ini merupakan sektor yang memberikan output terbesar, yaitu Rp. 30,454 trilyun atau 31,62% dari seluruh output produksi Sulsel. Jika porsi Input Antara dapat diturunkan, misalnya sebesar 20% (antara lain melalui perbaikan teknologi dan manajemen serta peningkatan kualitas tenaga kerja), maka akan terjadi pergeseran pada keseluruhan PDRB sebesar 5,23%.

Peningkatan kapasitas dan perluasan spektrum industri merupakan alternatif yang baik, khususnya industri pengolahan hasil-hasil pertanian (agro-industri), di samping akan meningkatkan kualitas interkoneksi antar sektor (meningkatkan kapasitas swatata Sulsel), juga dapat dimanfaatkan sebagai penampung limpahan tenaga kerja dari sektor pertanian.

Prioritas diletakkan pada industri pengolahan hasil pertanian. Pengembangan sektor ini pada satu sisi akan memperkuat keterkaitan sektoral, sedangkan pada sisi lain merupakan jembatan untuk mengurangi kejenuhan sektor pertanian (khususnya tenaga

kerja), memperkuat Kapasitas Swatata (minimal karena input dari agro-indutri tidak terpengaruh oleh dinamika lingkungan global), memperluas spektrum industri pengolahan yang pada gilirannya akan meningkatkan nilai tambah bruto. Di samping itu, teknologi dan manajemen agro-industri tidaklah serumit dengan industri lainnya.

Salah satu kendala yang dihadapi dalam pengembangan sektor Industri Pengolahan adalah ketersediaan sumberdaya energi yang handal dan tentu saja murah. Kondisi seperti ini akan membuat daya tarik Sulsel sebagai daerah tujuan investasi akan meningkat. Oleh karena itu, upaya untuk membangun sub-sektor energi merupakan upaya strategis yang perlu segera dilaksanakan. Uraian tentang hal ini dapat dilihat pada sub bab 2.3

Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

Sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor ketiga terbesar dalam memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB Sulsel, yaitu sebesar 15,42%. Di samping itu, kontribusinya terhadap ekspor juga relatif tinggi, yaitu 10,59% (Rp. 2,59 triliun) dengan impor yang tidak terlalu besar, Rp. 589,3 milyar.

Walaupun Indeks DP dan DK sektor ini < 1 , tetapi sektor ini memiliki keunggulan dalam bentuk kemampuannya untuk menyerap tenaga kerja dengan tingkat pendapatan yang relatif baik. Pada tahun 2005, sektor ini menyerap 17,51% dari seluruh tenaga kerja--urutan kedua setelah sektor pertanian--dengan pendapatan rata-rata Rp. 4.215.714/tahun. Data ini menunjukkan bahwa sektor perdagangan, hotel dan restoran dapat diandalkan dalam peningkatan dan pemerataan pendapatan di Sulawesi Selatan.

Kualitas proses produksi pada sektor ini tercermin pada rasio antara Input Antara dengan Input Total yang sebesar 17,73% (atau 23,16% jika termasuk impor), relatif baik dibandingkan dengan rata-rata seluruh sektor. Walaupun demikian, masih terbuka cukup banyak peluang untuk lebih memperbaiki ratio ini, karena tidak terlalu melibatkan teknologi maju. Dalam hal ini, peningkatan dimaksud dapat dicapai dengan hanya melakukan perbaikan manajemen, peningkatan kualitas manusia yang terlibat dan kebijakan keuangan, misalnya dalam bentuk insentif finansial

Setelah sektor industri pengolahan, sektor keuangan memiliki porsi yang besar dalam Input Antara, yaitu sebesar 17,88%. Kebijakan dalam bentuk insentif keuangan jelas akan menurunkan porsi Input Antara. Simulasi menunjukkan bahwa jika kebijakan dimaksud dapat menurunkan porsi itu sebesar 10%, maka porsi rasio Input Antara terhadap keseluruhan input akan berkurang sebanyak 2%.

Sektor Pertambangan dan Galian

Sektor pertambangan dan galian pada dasarnya memiliki keterkaitan yang rendah dengan sektor-sektor lainnya. Itu ditunjukkan oleh Indeks DP dan DK yang nilainya < 1 (0,8449 dan 0,9210). Artinya, pengembangan sektor ini tidak memberikan pengaruh yang berarti bagi pengembangan perekonomian Sulsel.

Posisi strategis sektor ini terletak pada sumbangannya yang besar terhadap ekspor. Pada tahun 2005, kontribusi sektor ini mencapai 25,10% (Rp. 6,15 trilyun) dari seluruh ekspor Sulawesi Selatan. Hanya diungguli oleh sektor industri pengolahan yang memberikan kontribusi sebesar 46,84%. Walaupun, impornya juga relatif besar, yaitu Rp. 1,56 trilyun atau mencakup 10,05% dari keseluruhan impor.

Nilai tambah bruto sektor ini mencapai 69,16% (dari keseluruhan input) yang didominasi oleh Surplus Usaha sebesar 55,76% sehingga menyisakan porsi yang relatif kecil untuk Upah dan Gaji, yaitu 28%. Walaupun begitu, pendapatan per tenaga kerja tinggi, karena jumlah tenaga kerja yang terlibat relatif kecil. Upah rata-rata adalah sebesar Rp. 126.770.107/tahun, terbesar di antara semua sektor.

Perlu digarisbawahi bahwa walaupun sektor ini memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekspor, tetapi pengembangannya membutuhkan kehati-hatian, karena sangat terkait dengan kualitas lingkungan hidup. Topografi Sulsel yang unik membuat wilayah ini sangat rentang terhadap eksploitasi sumberdaya pertambangan.

Pergeseran Wawasan

Pergeseran wawasan dan sikap pada masyarakat Sulawesi Selatan disebabkan oleh pengaruh nilai-nilai global yang bercorak materialisme serta sistem pendidikan yang bercorak Newtonian. Nilai-nilai global ini dimasyarakatkan oleh media cetak dan elektronik termasuk internet, yang dari waktu ke waktu memengaruhi semakin banyak warga masyarakat. Sistem pendidikan bercorak Newtonian yang berkembang seiring dengan itu, dominan memperkenalkan sisi fisik-mekanis alam semesta dan amat berciri instrumentalisme.

Melalui media informasi, baik cetak maupun elektronik, kepada masyarakat setiap saat dihantarkan berita, ulasan dan iklan yang sebagian besar mempromosikan nilai, norma dan pengetahuan tentang modernitas bahkan hipermodernitas global. Seiring dengan itu, pemahaman dan apresiasi masyarakat atas nilai, norma dan pengetahuan lokal-spesifik tidak cukup terartikulasi karena berita, informasi, ulasan dan iklan tentang itu memang sangat sedikit yang muncul di media informasi. Kondisi ini menjadikan pergeseran wawasan dan sikap masyarakat, dari yang berbasis endogen kelokalan, menuju ke yang berbasis eksogen keglobalan, lebih ditandai oleh dominasi keglobalan atas kelokalan tersebut.

Dari sisi sistem pendidikan, pendidikan bernuansa Newtonian memosisikan positivisme dan instrumentalisme sebagai orientasi pokok. Pendekatan pendidikan di Sulawesi Selatan, seperti halnya pendekatan yang dianut secara nasional, mengacu pada positivisme dan instrumentalisme. Dengan itu, pendidikan yang berlangsung lebih merupakan instrumen untuk menyiapkan manusia sebagai sumberdaya dalam proses produksi, yang karena itu sangat mengedepankan pencapaian kompetensi untuk menjawab permintaan proses produksi tersebut.

Terlihat adanya kecenderungan sistem pendidikan yang kurang diorientasikan sebagai media untuk menggali dan mengembangkan potensi spesifik peserta didik. Dalam kondisi demikian, muatan lokal yang bersumber dari lingkungan sosial-budaya peserta didik kurang signifikan menjadi isi proses pengajaran. Isi pengajaran lebih mengacu pada buku teks yang bersifat baku yang disusun secara nasional sehingga peserta didik cenderung menjadi asing terhadap lingkungan sosial budayanya. Kecenderungan ini sedikit-banyak didukung oleh kualitas pendidik yang hanya terbiasa dengan pendidikan versi instrumentalisme.

Program normalisasi kehidupan kampus telah memangkas kreatifitas mahasiswa. Sekarang pun, dengan sistem pendidikan Satuan Kredit Semester (SKS) dan penilaian berdasarkan distribusi normal telah menutup peluang bagi para mahasiswa untuk menggali potensi mereka yang spesifik. Kurikulum yang dijiwai oleh semangat intrumentalisme yang mengedepankan kompetensi yang semakin sempit bukan merupakan ladang bagi bangkitnya kreatifitas apalagi inovasi, yang justru merupakan modal utama dalam sistem perekonomian masa depan: *knowledge-based economy*.

Wawasan kebangsaan dan keagamaan juga kurang mendapatkan porsi yang signifikan dalam pendidikan. Ia hanya sebagai pelengkap dari kurikulum yang berorientasi kepada kompetensi yang semakin sempit untuk memenuhi permintaan pasar tenaga kerja. Ini juga dipicu oleh semangat pembangunan fisik yang dilakukan selama Orde Baru, yang melaksanakan pembangunan sesuai dengan konsep pembangunan yang diajarkan oleh dunia barat, yang pada gilirannya memengaruhi wawasan para pihak sehingga lebih bercorak materialisme. Sementara itu, pluralisme yang menjadi tuntutan di tengah penghargaan terhadap keragaman saat ini, juga belum teraktualisasi optimal di tengah masyarakat termasuk generasi muda, karena pengaruh positivisme yang menjadi acuan dalam ilmu pengetahuan modern, serta oleh pengaruh tertentu gerakan-gerakan keagamaan.

Di balik pergeseran wawasan dan sikap tadi, sebagaimana telah diuraikan bahwa penguasaan pengetahuan masyarakat Sulawesi Selatan memang relatif rendah, khususnya bila diukur pada masih besarnya porsi penduduk yang buta huruf dan rendahnya angka rata-rata lama sekolah dalam IPM. Faktor ini menyebabkan adaptasi kreatif dalam bidang ilmu dan teknologi kurang terjadi. Ini menyebabkan pula rendahnya produktivitas atau kualitas tenaga kerja Sulsel.

2.2 Keragaman Internal

Sulawesi Selatan memiliki beberapa faktor terberi (*given*) yang merupakan potensi untuk berkembangnya keragaman pada tatanan internalnya. Tatanan internal dimaksud setidaknya dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) jenis. *Pertama*, adalah *tatanan wilayah* atau *komunitas*, yaitu tatanan yang mewujud sebagai hasil interaksi antara masyarakat dengan sumberdaya dan kondisi lingkungan geografis setempat. Interaksi yang bersifat unik itu berkembang sedemikian rupa membentuk kelembagaan masyarakat (tata orga-

nisasi kemasyarakatan dan nilai-nilainya serta pengetahuan lokal) yang merupakan *soft-structure* dari komunitas bersangkutan dalam memelihara keberlangsungan keberadaannya. *Kedua*, adalah tatanan fungsional, yaitu tatanan yang tidak berbasis kepada wilayah tetapi memiliki identitas yang spesifik. Dalam kehidupan sehari-hari, tatanan ini mewujudkan sebagai organisasi kemasyarakatan lintas wilayah yang berperan (misi) untuk menghasilkan berbagai pilihan (*choice*) bagi masyarakat serta meningkatkan kemampuan memilih dan menyalurkan aspirasi (*voice*) dari masyarakat pada bidang kehidupan tertentu. Umumnya, tatanan jenis ini mengacu kepada seperangkat nilai yang bersifat spesifik, yang membuatnya berbeda dengan tatanan lain, walaupun mungkin memiliki visi dan misi yang sama.

Tatanan Wilayah

Faktor terberi yang menjadi modal dasar pengembangan tatanan Sulawesi Selatan memiliki aspek yang luas, mulai dari kondisi geografis dan topografi wilayah, kondisi klimatologis, kondisi demografis dan etnisitas, serta latar sejarah dan budaya.

Dari sisi fisik, Sulawesi Selatan memiliki kondisi dan potensi yang sangat beragam. Dengan luas wilayah 45.574,48 km persegi, yang meliputi 20 kabupaten dan tiga kota serta 263 kecamatan, topografi Sulawesi Selatan membentang mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi. Wilayah daratan ini dikelilingi oleh laut, di sebelah selatan terdapat laut Flores, di sebelah barat terdapat selat Makassar dan di sebelah Timur terdapat teluk Bone. Pulau-pulau tersebar pada perairan tersebut.

Kawasan ketinggian di Sulawesi Selatan terbentuk melalui keberadaan sejumlah gunung. Pada perbatasan kabupaten Gowa, Bantaeng, Sinjai dan Bulukumba membentang gunung Lompobattang dengan ketinggian 2.871 meter, juga terdapat gunung Bawakaraeng dengan ketinggian 2.830 meter di perbatasan Kabupaten Gowa dan Sinjai. Di wilayah Luwu terdapat gunung Bukit Rantai Kombala dengan ketinggian 3.103 meter, gunung Kambuno (2.900 meter) dan gunung Balease (3.016 meter). Pada wilayah perbatasan Kabupaten Luwu dan Enrekang terdapat gunung Rante Mario dengan ketinggian 3.470 meter dan gunung Latimojong dengan ketinggian 3.305 meter. Sulawesi Selatan juga ditandai oleh keberadaan bukit Kars di sekitar Kabupaten Pangkep dan Maros.

Ada sekitar 65 sungai mengalir dari dataran tinggi tersebut. Di wilayah Luwu terdapat 25 aliran sungai. Kabupaten Tana Toraja, Enrekang, dan Pinrang dialiri oleh sungai terpanjang yakni sungai Saddang (150 km). Sungai WalanaE mengalir di kawasan Bone dan Wajo, sementara di Gowa dan Makassar mengalir sungai Jeneberang. Danau Tempe dan Sidenreng terdapat di Kabupaten Wajo dan sekitarnya, sementara di wilayah Luwu terdapat danau Matana dan Towuti.

Gambaran geografis ini menunjukkan besarnya keragaman aktivitas sosial-ekonomi yang berpeluang berkembang di Sulawesi Selatan. Gunung dan Daerah Aliran Sungai potensial menyimpan keragaman flora dan fauna pada area hutan yang terbentuk dan menjadi penyangga kawasan secara keseluruhan, serta potensial pula untuk budidaya

ya tanaman perkebunan (terutama kakao dan kopi) dan hortikultura (terutama sayuran dan kentang). Pada dataran rendah, potensi ekologis perkembangan pertanian padi sawah tidak bisa lagi disangkal, dan tersimpan pula potensi sosial-ekonomi untuk mendorong transformasi pertanian dan aktivitas sosial-ekonomi pedesaan. Pada kawasan pesisir dan pulau-pulau, potensi aktivitas penangkapan dan budidaya juga memungkinkan berlangsungnya modernisasi perikanan, serta aktivitas lainnya.

Potensi keragaman aktivitas sosial-ekonomi tersebut lebih kuat lagi bila dihubungkan dengan kondisi klimatologis Sulawesi Selatan yang unik. Periode musim hujan dan musim kering di wilayah pantai Barat (sepanjang pesisir Selat Makassar) berbeda dengan periode musim hujan dan musim kering di wilayah pantai Timur (pesisir kawasan Teluk Bone). Dengan itu, temperatur, kelembaban, curah hujan, penyinaran matahari dan kecepatan angin antara dua wilayah tersebut berbeda pada periode yang sama. Temperatur maksimum di sekitar Makassar adalah 34,5 dan temperatur minimum 22,3 derajat, kelembaban nisbi 66-87 persen, rata-rata penyinaran matahari antara 41-98 persen, serta kecepatan angin rata-rata 3,6 - 7,2 km/jam.

Secara historis dan sosial budaya potensi keragaman dalam tatanan Sulawesi Selatan juga sangat tinggi. Sulawesi Selatan pada awalnya mencakup empat etnis besar yakni Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar serta berbagai sub-etnis seperti Duri, Konjo, Bajo dan sebagainya. Dalam perkembangannya, Sulawesi Selatan mengalami pemekaran wilayah, Kabupaten Polewali Mamasa, Mamuju dan Majene yang dominan etnis Mandar tergabung dalam provinsi baru yakni Sulawesi Barat. Etnis Bugis dominan berada di Kabupaten pada wilayah Utara Sulawesi Selatan, sementara etnis Makassar dominan berada di Kabupaten pada wilayah Selatan Sulawesi Selatan. Etnis Toraja tersebar di Kabupaten Tana Toraja dan Luwu, etnis Duri di Kabupaten Enrekang. Gambaran ini menunjukkan keragaman etnis yang tersebar secara relatif pada keragaman wilayah pula.

Di balik keragaman etnis tersebut, terdapat pula keragaman dalam sistem nilai dan norma serta adat-istiadat yang spesifik. Masing-masing etnis memiliki bahasa daerah dan mengembangkan pengetahuan asli sesuai setting ekologi. Variasi-variasi ini terkait pula dengan potensi kearifan lokal yang bisa berkembang dalam tatanan. Selain itu, terkandung pula potensi berkembangnya interaksi sosial dan komunikasi lintas budaya, yang dapat mendorong dinamika perubahan secara lebih kreatif dalam menanggapi spirit zaman. Latar belakang agama dan kepercayaan juga cukup besar. Walaupun di kawasan perdesaan agama Islam sangat dominan, tetapi di kawasan perkotaan, keragaman dari sisi ini cukup tinggi.

Potensi keragaman tersebut bermuara pada berkembangnya beberapa komunitas, seperti komunitas nelayan dan petambak di sepanjang pantai Selat Makassar, komunitas petani garam di pesisir pantai Selatan, serta komunitas petani yang tersebar di seluruh wilayah Sulsel. Bahkan ada beberapa komunitas yang berbasis pada aktivitas ekonomi sekunder, seperti pengrajin besi di Massepe dan pengrajin perahu di daerah kabupaten Bulukumba.

Umumnya, komunitas-komunitas itu berskala kecil, tetapi memiliki kearifan lokal yang berkaitan dengan sumberdaya alam yang ada disekitarnya. Komunitas petani misalnya, memahami kapan waktu yang tepat untuk mulai menanam serta bagaimana menangani hama, demikian pula halnya dengan komunitas nelayan yang bahkan telah begitu akrab dengan pantai dan laut, sehingga mengetahui peluang terjadinya badai.

Nilai-nilai tradisional yang menjadi acuan dari komunitas itu mengacu kepada paham yang melihat bahwa manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari semesta. Paham ini jelas tidak sejalan dengan paradigma sains modern yang memosisikan manusia sebagai pengelola atau bahkan penguasa semesta, tetapi terlihat sangat sesuai dengan paham *deep-ecology* yang menjadi salah satu kecenderungan di era pasca modernisasi.

Pada saat sekarang, kualitas peran atau bahkan eksistensi komunitas-komunitas dimaksud sedang dan terus mengalami degradasi. Komunitas pengrajin besi di Massepe kehilangan eksistensinya karena tidak mampu bersaing dengan berbagai pilihan (*choice*) yang ditawarkan oleh lingkungan strategisnya. Demikian pula halnya dengan komunitas nelayan dan petambak di sepanjang Selat Makassar yang mengalami krisis akibat *soft-structure*-nya yang berbasis pada sistem *Ponggawa-Sawi* mengalami kegoyahan karena tidak mampu mempertahankan diri terhadap alternatif kelembagaan ekonomi baru, seperti Bank Perkreditan Rakyat, yang ditawarkan pemerintah melalui berbagai program pembangunan.

Desa, yang dulu hampir semuanya merupakan komunitas telah beralih menjadi satuan wilayah administrasi pemerintahan yang berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan secara seragam dan terpusat. Kehidupan desa sebagai komunitas telah terkikis. Struktur organisasi desa serta nilai dan aturan yang mendukungnya yang merupakan hasil akumulasi pengalaman masyarakat berinteraksi dengan lingkungan dan sumberdayanya telah tergusur, digantikan dengan struktur administrasi pemerintahan yang ditetapkan secara nasional. Kearifan lokal yang diacu dalam mengelola kehidupan desa, seperti gotong-royong telah terkikis oleh gaya hidup *business-like*, mekanisme tradisional dalam pengambilan keputusan seperti *tudang-sipulung* secara pelan tetapi pasti digusur oleh model Pilkada dan sejenisnya. Walaupun perlu dicatat bahwa sejak beberapa tahun terakhir, terdapat beberapa program pemerintah dan juga LSM (yang didanai oleh donor asing) yang mencoba membangun kembali komunitas dimaksud pada tataran desa dan kecamatan.

Komunitas tradisional yang mampu bertahan saat ini tinggal segelintir, salah satu di antaranya adalah Komunitas Kajang di Kabupaten Bulukumba. Senyatanya, komunitas ini benar-benar merupakan suatu komunitas yang unik dengan identitas yang unik pula. Walaupun, secara sosial ekonomi komunitas ini tidak menunjukkan keunggulan lokal (dari perspektif ekonomi modern), tetapi mungkin saja, mereka memang tidak mengarahkan pengembangan komunitas mereka ke arah itu. Komunitas ini mampu

bertahan karena berhasil menutup diri atau setidaknya membatasi interaksi dengan lingkungannya.

Pada tataran kabupaten, keragaman internal juga sangat kurang. Malah, kabupaten-kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan sangat mirip satu dengan lainnya. Senyatanya, kabupaten belum mewujudkan sebagai komunitas, tetapi lebih merupakan--dan memang didisain untuk itu--satuan administrasi pemerintahan. Struktur administrasi dan pemerintahan seluruh kabupaten di Sulawesi Selatan pada umumnya mirip satu dengan lainnya, karena mengacu kepada acuan yang sama yang ditetapkan pemerintah pusat.

Hampir semua kabupaten kota di Sulawesi Selatan belum mampu menemukan dan mengembangkan potensi spesifik yang dimiliki yang membuatnya berbeda dengan daerah lain. Hal ini bermuara pada pada struktur sosial-ekonomi Sulsel yang sangat homogen yang masih didominasi oleh sektor primer. Daerah kabupaten malah belum mampu mendorong pengembangan sektor sekunder, berupa industri pengolahan hasil-hasil pertanian (agro industri) dari sektor primer itu. Kegiatan sekunder dimaksud lebih berpusat di Makassar dan sebagian kecil di Pare-Pare. Contoh lain, penggaraman rakyat di Takalar dan Jeneponto belum mampu beranjak dari posisi yang dipegangnya sejak zaman dahulu. Padahal, di sisi lain Indonesia masih mengimpor garam dalam jumlah yang relatif besar.

Semua kabupaten masih mengandalkan sektor pertanian, termasuk kabupaten yang memiliki karunia alam berupa sumberdaya pertambangan. Gas alam di Wajo, Batu Kapur dan Marmer di Pangkep dan Barru serta Nikel di Luwu Timur, nyaris merupakan *enclave*, karena belum berhasil dimanfaatkan sebagai *prime-mover* berkembangnya keunggulan lokal yang berbasis sumberdaya tersebut. Aktivitas perekonomian Pangkep misalnya, lebih marak oleh kegiatan sektor perikanan tambak ketimbang pertambangan dan industri semen dan marmer, biarpun dilihat dari sisi output dan kontribusi langungnya terhadap PDRB sangat tidak sebanding. Demikian pula halnya dengan kabupaten lainnya.

Malah, ada kecenderungan bahwa kabupaten tidak berdaya untuk mempertahankan apalagi mengembangkan keunggulan lokal yang pernah dimilikinya, seperti Selayar dengan jeruk, Malino (Gowa) dengan Markisa, Soppeng dengan Ulut Sutera, Wajo dengan Industri (kerajinan rakyat) Sarung Sutera, serta kawasan di sekitar danau Tempe yang kehilangan potensi perikanan darat berupa spesies ikan yang spesifik. Cengkeh sejak beberapa tahun terakhir telah kehilangan pamornya dan kelihatannya akan diikuti oleh Kakao.

Jelas ada beberapa pengecualian. Ada serangkaian upaya untuk mengembangkan keunggulan lokal yang dirintis oleh beberapa kabupaten. Pemberdayaan kembali kerajinan rakyat pembuatan perahu pinisi di Bulukumba mulai menunjukkan titik cerah dan komoditas beras *Celebes* yang mulai mendapat pengakuan. Kabupaten Tator berhasil memelihara dan memanfaatkan kekayaan alam dan budaya yang mereka miliki. Dengan berbasis pada kekayaan itu, pemerintah dan masyarakat Toraja membangun komunitas

mereka. Tator juga berhasil memasarkan kopinya sedemikian rupa sehingga memiliki *brand image* pada tataran global dan mengembangkan pariwisata berbasis pada keunikan budaya yang mereka miliki. Singkatnya, Toraja telah mampu berkembang secara unik (memiliki identitas spesifik). Walaupun, perekonomian Tator (dilihat dari struktur PDRB-nya) tidak jauh berbeda dengan kabupaten lainnya, yaitu masih didominasi oleh sektor pertanian.

Pada tataran kawasan (lintas kabupaten) upaya pengembangan keunggulan lokal telah dilakukan, setidaknya sejak awal tahun 1980-an melalui program pembangunan yang berkesinambungan. Diawali dengan Tri Konsepsi yang terdiri atas program *Perubahan Pola Pikir, Perwilayahan Komoditas* dan *Petik-Olah-Jual* di era A. Amiruddin sebagai Gubernur Sulawesi Selatan, yang kemudian dipertajam menjadi *Tri-Program* dan *Grateks-2* di era HZB Palaguna, dan akhirnya menjadi *Gerbang Emas* di masa ke gubernuran H.Amin Syam.

Dalam implementasinya, program-program itu berhasil meningkatkan secara signifikan produksi sektor pertanian pada beberapa kawasan pengembangan. Tetapi, sebelum sempat memicu lahirnya komunitas masyarakat yang tangguh dan aktivitas sektor sekunder pada kawasan-kawasan dimaksud, program tersebut tersendat pelaksanaannya akibat adanya kebijakan pemerintahan yang baru yang meletakkan otonomi pada daerah kabupaten kota.

Tatanan Fungsional

Agak berbeda dengan tatanan wilayah, tatanan fungsional yang mewujud dalam bentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan pada berbagai bidang kehidupan, mampu melahirkan keragaman pada tataran propinsi, dalam arti mampu berfungsi sebagai media yang melahirkan pilihan-pilihan (*choice*) yang beragam bagi masyarakat Sulawesi Selatan, tetapi belum sepenuhnya mampu berfungsi untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memilih dan menyalurkan aspirasinya (*voice*) pada berbagai bidang kehidupan kemasyarakatan. Di samping itu, pada tataran daerah dan kawasan, lembaga dimaksud juga belum mampu memprakarsai upaya untuk menemukan dan mengembangkan potensi lokal sebagai modal pengembangan kawasan. Singkatnya, lembaga-lembaga modern itu telah menggeser tetapi belum mampu menggantikan peran lembaga tradisional seutuhnya, yaitu melahirkan keunggulan lokal atau identitas lokal yang unik.

Lembaga-lembaga pada tataran propinsi ini menyandang identitas sebagai lembaga modern. Itu berarti dari sisi nilai yang dianut tidak terdapat perbedaan mendasar antara suatu lembaga dengan lembaga lainnya. Dengan kata lain, keragaman yang ada hanya pada pilihan yang beragam pada tataran program, bukan pada tataran nilai. Dari segi nilai, hampir semua lembaga itu mencoba secara konsisten mengedepankan nilai-nilai "modern" yang tidak selalu sejalan dengan nilai lokal/tradisional. Sangat sedikit diantara lembaga dimaksud yang mengkhususkan diri pada upaya untuk melakukan

pemberdayaan kelembagaan masyarakat tradisional antara lain dalam bentuk reaktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai lokal/tradisional.

Simpulannya, lembaga modern hanya mampu menawarkan keragaman pilihan (*choice*) pada tataran praktis, tetapi tidak pada tataran nilai karena umumnya berbasis pada nilai yang sama (nilai-nilai modern). Dengan kata lain, kecenderungan yang ada adalah terjadinya homogenisasi nilai (nilai-nilai modern). Di samping itu, umumnya kehadiran lembaga modern menggeser lembaga tradisional (pada semua bidang kehidupan, terutama sosial-ekonomi), tetapi belum mampu menggantikan sepenuhnya peran utama lembaga tradisional, yaitu sebagai *soft-structure* masyarakat atau komunitasnya. Ini bermuara pada berkurangnya keragaman internal pada tatanan fungsional dan peluang untuk mengembangkan komunitas masyarakat baru menjadi tersendat. Fakta ini dapat dilihat fenomenanya pada berbagai bidang kehidupan masyarakat Sulsel.

Pada bidang keswadayaan masyarakat, lembaga yang mengkhususkan diri untuk membantu masyarakat melakukan adaptasi-kreatif, relatif sedikit jumlahnya. Kecenderungan yang ada, khususnya di era reformasi dan pasca reformasi, adalah maraknya perkembangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menawarkan *choice* dan *voice* pada berbagai bidang kehidupan masyarakat, mulai dari sosial ekonomi, sosial politik dan sosial budaya. Bahkan ada beberapa LSM yang mengkhususkan diri menangani bidang-bidang yang spesifik, misalnya lingkungan hidup, pengarusutamaan gender, demokrasi dan HAM, teknologi pedesaan, dan lainnya. Walaupun demikian, fakta keswadayaan masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan tidak seintensif dengan fakta kemunculan lembaga yang diharapkan mendorong keswadayaan tersebut.

Sejumlah LSM belum jelas alasan kehadirannya dalam konteks mendorong keswadayaan masyarakat, dan sebagaimana halnya lembaga pemerintah, sebagian LSM juga amat bergantung pada pendanaan dari lembaga donor atau bahkan LSM internasional, dengan demikian kemandiriannya kurang optimal. Selain itu, fungsi untuk mendorong *choices* dan *voices* masyarakat kurang berjalan. Intensitas peran yang dimainkan juga relatif rendah, kecuali lembaga yang merupakan perpanjangan tangan dari lembaga sejenis yang ada di Jakarta, dan terutama di luar negeri (lembaga-lembaga internasional).

Lembaga yang menangani budaya lokal belum berkembang sebagaimana mestinya, padahal inilah yang dibutuhkan untuk melahirkan masyarakat dengan identitas yang unik. Kemandirian lembaga ini juga relatif sangat rendah sehingga pelaksanaan misinya masih jauh dari optimal. Yang memiliki aktivitas dengan intensitas dan frekuensi yang tinggi umumnya yang memiliki sponsor atau merupakan cabang dari lembaga sejenis di tingkat nasional dan bahkan internasional. Lembaga yang memiliki misi melindungi dan mengembangkan budaya/nilai tradisional umumnya tidak beroperasi dalam skala yang cukup untuk melaksanakan misinya secara optimal.

Pada bidang ekonomi, lembaga-lembaga yang mengkhususkan diri di bidang ini menunjukkan kecenderungan bertumbuh dengan laju yang cukup tinggi. Walaupun,

dari sisi identitas umumnya mirip satu dengan lainnya. Dengan kata lain, kebanyakan lembaga dimaksud menyandang identitas sebagai lembaga ekonomi modern yang memosisikan keuntungan sebagai orientasi utama dengan seperangkat aturan dan nilai yang cenderung serupa pula. Keberadaan lembaga ini bukannya menambah kualitas keragaman, tetapi justru sebaliknya, karena memarginalkan lembaga tradisional.

Kehadiran lembaga ekonomi modern dalam bentuk Bank dan Koperasi, termasuk variannya berupa Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Syariah, telah menggeser lembaga tradisional seperti ikatan *Ponggawa-Sawi* yang memiliki keunikan dalam menawarkan *choice* dan menyalurkan *voice* di kalangan masyarakat perdesaan. Kehadiran lembaga pasar modern cenderung meminggirkan eksistensi pasar tradisional. Kehadiran pasar modern yang mestinya menambah keragaman, justru melemahkan entitas yang sudah ada. Kehadiran perusahaan besar sebagai lembaga ekonomi yang lebih terkonsentrasi pada bidang otomotif dan konstruksi, kurang mendorong produksi manufaktur dan agroindustri, juga menjadi fenomena di balik rendahnya keragaman dalam kelembagaan ekonomi.

Transformasi fungsional yang berlangsung dibalik aktivitas yang didorong juga tidak signifikan. Lembaga ekonomi dalam perdagangan komoditas utama seperti Kakao, Beras dan Rumput Laut, belum bergeser dari sekedar pedagang pengumpul ke arah pencipta nilai tambah melalui industri pengolahan. Padahal, transformasi ekonomi untuk mendorong keragaman justru ditentukan oleh berkembangnya aktivitas yang melahirkan produk sekunder. Dapat disimpulkan bahwa lembaga modern dengan homogenitas yang tinggi telah terlahirkan, tetapi kelahirannya telah meminggirkan lembaga tradisional yang sudah berfungsi sebelumnya, sehingga keragaman dalam tatanan fungsional perekonomian tidak optimal berkembang.

Di bidang politik, kecenderungan yang sama juga terjadi. Lembaga-lembaga politik dalam bentuk partai politik berkembang sangat pesat dilihat dari sisi jumlah. Hampir semua partai politik memiliki perwakilan di tingkat propinsi dan di mayoritas kabupaten. Walaupun, ada kecenderungan bahwa partai-partai tersebut belum mampu menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat secara optimal. Itu misalnya terlihat dari hasil Pilkada yang tidak selalu sejalan dengan hasil Pemilu Legislatif. Malah, organisasi sosial politik belum mampu memberikan suasana yang kondusif dan cenderung memecah belah kekerabatan yang ada dimasyarakat, namun fenomena ini merupakan suatu proses pendewasaan berpolitik masyarakat.

Di bidang sosial, keberadaan dan peran lembaga yang sepenuhnya berkiprah dalam misi kemasyarakatan, juga mengalami kemunduran. Dalam pelayanan pendidikan misalnya, organisasi sosial seperti Muhammadiyah yang di masa lalu memiliki sekolah dasar dan sekolah menengah yang menampung siswa di pelosok dengan biaya rendah tetapi dengan idealisme yang tinggi, pada saat ini perannya tidak lagi signifikan. Organisasi masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya menghadapi kesulitan untuk sepenuhnya bermisi sosial tanpa memikirkan profit untuk menjaga kelangsungan lembaga

itu sendiri. Pada akhirnya, organisasi kemasyarakatan juga banyak bergantung kepada pemerintah sebagai sponsor kegiatan.

Kelembagaan perempuan memperlihatkan kecenderungan perkembangan yang muaranya terlihat pada upaya pemberdayaan perempuan yang menunjukkan perkembangan yang positif, hal ini dapat terlihat dari kesempatan memperoleh pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesempatan kerja serta banyaknya perubahan dari suatu sistem yang berkeadilan gender, namun disadari belum sepenuhnya dapat diwujudkan, karena masih kuatnya pengaruh nilai-nilai sosial budaya yang melekat khususnya pada daerah pertanian perdesaan. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari program pengarusutamaan gender yang diprakarsai oleh pemerintah yang didukung oleh lembaga-lembaga pembangunan dan LSM internasional.

Di bidang keagamaan boleh dikatakan tidak ada lembaga baru, yang terjadi adalah variasi dalam jumlah dan intensitas kegiatan dari lembaga-lembaga tradisional. Organisasi kemasyarakatan utama yakni NU dan Muhammadiyah, di satu sisi semakin bervariasi aktivitasnya dengan memasuki area politik; tetapi di sisi lain terlihat kemunduran pada aktivitas lain misalnya semakin kurang signifikannya kiprah mereka dalam pendidikan dasar dan menengah. Beberapa organisasi baru muncul dengan peran-peran spesifik, tetapi tingkat pelembagaannya dalam masyarakat belum signifikan.

Kelembagaan sosial budaya, termasuk kelembagaan adat, saat ini telah banyak mengalami pergeseran fungsi dan peran sebagai tatanan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga eksistensinya hanya sebagai *symbol of ceremony*. Namun demikian di beberapa daerah, kelembagaan sosial kemasyarakatan tersebut masih dapat dijumpai yang masih terus berupaya mempertahankan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal. Selain itu perkembangan nilai-nilai budaya lokal (*indigenous values*) dalam masyarakat telah banyak mengalami degradasi. Di samping itu, upaya mempertahankan budaya lokal melalui jenjang pendidikan formal belum mampu menarik minat generasi muda.

Di bidang budaya dan kesenian. Sangat sedikit lembaga baru yang berkembang sedangkan lembaga tradisional mengalami kesulitan untuk mempertahankan keberadaannya. Ini ditandai oleh kurang berlangsungnya artikulasi antara ciri tradisional dengan ciri baru dalam seni suara, seni tari maupun seni pertunjukan yang ada.

Di bidang sains dan teknologi, kehadiran lembaga masyarakat hampir tidak ada, sedangkan pemerintah, melalui lembaga penelitian dan pengembangan serta perguruan tinggi, juga belum mampu berperan secara optimal. Penelitian dan program pengabdian masyarakat di perguruan tinggi tidak selalu terkait dengan kebutuhan masyarakat. Singkatnya, perguruan tinggi belum mampu sepenuhnya memperkenalkan teknologi dan nilai (termasuk wawasan) baru kepada masyarakat. Juga belum mampu membantu masyarakat melakukan proses adaptasi-kreatif. Hal ini sangat terkait dengan kemampuan pembiayaan Perguruan Tinggi yang relatif sangat terbatas, sehingga hampir semuanya terserap untuk kegiatan pendidikan.

Dapat dirangkumkan bahwa kecenderungan yang nampak dengan jelas adalah kehadiran lembaga-lembaga yang menawarkan ide dan gagasan atau bahkan nilai-nilai baru, secara pelan tetapi pasti telah mendesak kelembagaan tradisional, tetapi belum mampu menggantikan posisinya secara utuh, karena belum menyatu (bersenyawa) dengan masyarakat lokal. Misalnya, koperasi, BPR dan lainnya, demikian pula dengan lembaga politik yang belum sepenuhnya mampu melaksanakan misinya dalam arti yang sebenarnya. Ini karena pada umumnya lembaga baru dimaksud tidak menawarkan atau memiliki identitas yang spesifik, maka terjadi proses homogenisasi identitas. Inti dari identitas, yaitu budaya telah ikut bergeser atau kehilangan eksistensi. Budaya bahari berkurang digantikan oleh budaya petani. Spirit *entrepreneur* yang dimiliki oleh orang Wajo misalnya, telah terkikis dan hampir tidak punya bekas lagi.

Tidak berlebihan jika disimpulkan bahwa pergeseran yang paling mendasar, walaupun hampir tidak disadari, adalah bergesernya nilai-nilai Bahari yang dulunya membuat beberapa daerah di Sulawesi Selatan menjadi unik pada tataran nasional atau bahkan regional. Yang dimaksud dengan nilai-nilai bahari disini adalah orientasi tentang hal-hal penting dan mendasar dalam kehidupan, yang lahir secara *endogenous* dari proses adaptasi-kreatif dengan lingkungan kehidupan dari waktu ke waktu, yang pada komunitas Sulawesi Selatan di masa lalu lingkungan kehidupan yang signifikan adalah laut dan aktivitas kebaharian.

Faktor Penyebab

Kecenderungan menurunnya jumlah dan terutama kualitas peran dari lembaga-lembaga kemasyarakatan tradisional merupakan konsekuensi logis dari memudarnya identitas lokal dari masyarakat Sulawesi Selatan yang pada gilirannya menyebabkan kurangnya kemampuan untuk melakukan adaptasi-kreatif.

Memudarnya identitas dimaksud terutama disebabkan oleh pengaruh modernisasi yang melanda semua sendi kehidupan masyarakat. Modernisasi pada dasarnya telah menggeser wawasan dan sikap masyarakat dari nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, karena modernisasi umumnya membawa nilai-nilai yang tidak sejalan dengan nilai dan kearifan lokal itu (sebagaimana telah diuraikan pada sub bab 2.1).

Derasnya arus modernisasi berikut dampak yang ditimbulkannya tidak dapat dilepaskan dari transparansi informasi yang antara lain didukung oleh media cetak dan elektronik. Setiap hari, masyarakat diperhadapkan dengan berita dan berbagai tayangan film dan sinetron yang secara langsung maupun tidak langsung memperkenalkan, sekaligus mempromosikan, "keunggulan" nilai dan budaya dari negara-negara maju yang menjadi sumber dari modernisasi itu.

Di samping itu, kebijakan dan pendekatan pembangunan yang digalakkan pemerintah--setidaknya sejak awal tahun 1970-an--secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penetrasi nilai-nilai modern ke segenap lapisan masyarakat tanpa kecuali. Walaupun tidak tersurat, pemerintah memosisikan kelembagaan masyarakat mod-

ern sebagai alternatif terbaik yang perlu diadopsi untuk meningkatkan kualitas hasil-hasil pembangunan. Untuk melakukan akselerasi pembangunan diperlukan modernisasi--ini adalah salah satu doktrin pembangunan di era Orde Baru--pembangunan adalah kata lain dari modernisasi.

Kebijakan pemerintahan juga cenderung untuk memaksakan homogenitas. Hampir semua kebijakan dan aturan ditetapkan secara terpusat tanpa merasa perlu memberikan ruang untuk mengakomodasikan pertimbangan-pertimbangan lokasional, termasuk kearifan lokal. Pendekatan pembangunan di masa itu umumnya merupakan paket siap pakai yang bersifat nasional, dalam arti tidak memperhatikan identitas lokal. Malah, pendekatan Kestabilan (salah satu dari Trilogi Pembangunan--doktrin pembangunan di masa Orde Baru) cenderung tidak menghargai keragaman, malah melihatnya sebagai ancaman atau setidaknya memiliki potensi untuk menghambat upaya percepatan pembangunan.

Pembangunan juga sangat bias fisik sehingga menelantarkan pembangunan budaya (lokal), dalam kondisi seperti itu identitas lokal sulit menemukan ruang untuk berkembang. Dengan kata lain, pembangunan sangat sedikit terkait dengan upaya untuk memperkaya identitas. Hampir tidak ada upaya sistematis yang diarahkan untuk melakukan reaktualisasi dan revitalisasi budaya lokal. Malah ada kecenderungan meminggirkan atau bahkan melupakannya sama sekali.

Dominasi budaya tertentu yang membonceng kekuasaan pemerintah merupakan pula faktor yang mempercepat memudarnya budaya bahari yang menjadi akar dari hampir semua budaya lokal di Sulawesi Selatan.

Puncak dari kebijakan pemerintah yang berdampak pada memudarnya identitas lokal adalah ketika memosisikan Desa sebagai daerah administrasi pemerintahan yang dikelola tentunya dengan sistem administrasi yang seragam yang ditetapkan secara terpusat. Kebijakan ini telah menghapus sama sekali eksistensi keragaman dalam mengelola kepentingan bersama. Menggusur eksistensi desa sebagai komunitas masyarakat yang dikelola secara unik. Kebijakan itu merupakan pula awal dari kematian kreatifitas masyarakat lokal, karena kebijakan lokal hampir tidak dibutuhkan lagi karena adanya aturan yang dijalankan secara konsisten oleh aparat pemerintahan desa.

Di samping kebijakan pemerintah dan pendekatan pembangunan yang disebutkan di atas, pudarnya identitas lokal juga ikut dipicu oleh aktivitas lembaga-lembaga kemasyarakatan modern yang ditopang oleh lembaga sejenis pada tingkat nasional atau bahkan internasional. Senyatanya, kebijakan pembangunan yang dianut pemerintah secara langsung maupun tidak langsung juga ikut pula merangsang tumbuh dan berkembangnya kelembagaan ini. Seperti telah disinggung sebelumnya, pemerintah secara tersirat melihat kelembagaan masyarakat modern merupakan model terbaik yang perlu diadopsi untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil-hasil pembangunan.

Lembaga dimaksud kebanyakan memiliki misi untuk memperkenalkan nilai-nilai baru (khususnya paham modernisme) kepada masyarakat. Lembaga dimaksud secara sistematis melakukan penetrasi terhadap nilai-nilai dan kearifan lokal. Menggusur nilai dan kearifan itu dengan nilai dan cara pandang baru.

Masalahnya, lembaga kemasyarakatan baru (pada berbagai bidang kehidupan) pada dasarnya tidak mampu menghadirkan keragaman, karena walaupun berarasi dalam jumlah, tetapi umumnya berbasis dan menawarkan nilai-nilai yang kurang lebih sama, yaitu nilai-nilai modern (modernisasi). Dengan demikian, lembaga-lembaga itu tidak akan pernah mampu menawarkan keragaman dalam nilai.

Nilai dan pembaharuan yang diperkenalkan oleh lembaga dimaksud memiliki akar budaya yang tidak kompatibel dengan budaya masyarakat. Hal ini mengakibatkan terjadinya kegamangan dalam masyarakat. Pada satu sisi, yaitu pada lapisan permukaan, nilai dan pembaharuan terlihat memberikan banyak kemudahan dalam kehidupan, sehingga menarik untuk diadopsi, tetapi pada sisi lain, yaitu pada tataran internal, nilai dan pembaharuan itu masih sulit diadopsi karena terasa bertentangan dengan "naluri budaya" mereka.

Uraian di atas menunjukkan bahwa upaya memelihara keragaman internal di lingkungan masyarakat Sulawesi Selatan tidak dapat lagi diandalkan kepada keberhasilan lembaga kemasyarakatan tradisional. Lembaga-lembaga modern juga tidak dapat sepenuhnya diandalkan. Oleh karena itu, alternatif yang tersedia adalah kehadiran kelembagaan masyarakat yang baru yang merupakan hasil adaptasi-kreatif dari kelembagaan tradisional dengan nilai-nilai baru yang ditawarkan oleh masyarakat global. Masalahnya, kelembagaan seperti itu masih belum mampu mewujudkan secara optimal.

Ada beberapa hal yang menjadi penyebab kegagalan terbentuknya kelembagaan seperti itu. *Pertama*, adalah kelangkaan sumberdaya (finansial, ide dan gagasan) di kalangan masyarakat umum. Akar dari keterbatasan ide dan gagasan telah diuraikan sebelumnya (pada sub bab 2.1), yaitu sebagian besar masyarakat masih termasuk kelompok *price-taker*, yang miskin akan ide dan gagasan. Mereka tidak mampu melihat masalah mereka sendiri atau bahkan cenderung pasrah dengan kondisi yang dialami.

Hal ini banyak berkaitan dengan rendahnya kreatifitas dan inovasi yang sedikit banyak mengindikasikan kualitas manusia. Sebagaimana telah diuraikan pada sub bab 2.1, tingkat pengetahuan rata-rata dan rata-rata lama pendidikan yang relatif rendah bermuara pada wawasan yang relatif sempit. Kondisi seperti ini jelas kurang memungkinkan bangkitnya kreatifitas.

Keterjebakan dalam tekanan ekonomi sehari-hari membuat sebagian besar masyarakat menjadi *price taker*. Kondisi ini menyebabkan adaptasi masyarakat cenderung melema khususnya terhadap hal-hal yang berwawasan masa depan yang jauh, termasuk terhadap nilai-nilai "pembaharuan" yang dibawa oleh ilmu pengetahuan dan teknologi

yang justru merupakan nilai yang diperlukan untuk memperkaya nilai dan kearifan tradisional.

Pendapatan masyarakat rata-rata yang relatif rendah memberikan pula kontribusi yang tidak kecil terhadap berkembangnya kelembagaan masyarakat dimaksud. Hal ini lebih diperparah oleh kenyataan bahwa kalangan dan pemuka masyarakat yang memiliki latar belakang finansial yang cukup, umumnya tidak tertarik pada kegiatan ini. Ketimbang menjadi pelopor, kalangan itu umumnya lebih tertarik kepada model kelembagaan modern. Walaupun pada akhir-akhir ini mulai terlihat adanya pembalikan kecenderungan.

Dukungan finansial memang merupakan syarat harus, khususnya untuk kondisi Sulawesi Selatan, bagi tumbuh dan berkembangnya suatu lembaga masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari data yang menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga masyarakat yang mampu mempertahankan kehadirannya di Sulawesi Selatan adalah lembaga-lembaga yang memiliki dukungan finansial yang memadai. Hampir semua partai politik memiliki cabang di Sulsel, karena mereka mendapat dukungan dana dari pemerintah provinsi dan pemerintah daerah melalui APBD masing-masing. Demikian pula halnya dengan kebanyakan LSM. Yang mampu bertahan adalah yang merupakan perpanjangan tangan dari LSM yang ada di Jakarta atau bahkan di tingkat internasional.

Kepemimpinan (*leadership*) dan kemampuan manajemen juga merupakan salah satu penyebab tidak berkembangnya kelembagaan masyarakat ini. Membedani dan mengembangkan kelembagaan baru jelas membutuhkan kualitas kepemimpinan dan kepakaran dalam pengelolaan organisasi. Kebutuhan itu jelas terbentur pada kelangkaan. Dalam kondisi masyarakat Sulsel seperti sekarang, individu yang memiliki keahlian seperti itu telah terserap pada kegiatan-kegiatan yang lebih mapan.

Kedua, adalah tidak adanya kebijakan yang sistematis dan mendasar dari pemerintah, sebagai satu-satunya agen pada saat sekarang yang memiliki peluang dan sumberdaya, untuk menginisiasi pembaharuan. Hal ini sangat mungkin disebabkan oleh--sebagaimana telah disinggung sebelumnya--pendekatan pembangunan yang sangat bias fisik dan oleh asumsi bahwa model kelembagaan modern merupakan alternatif terbaik bagi terselenggaranya kegiatan pembangunan.

Di samping itu, wawasan pemerintah yang masih terfokus sebagai pusat prakarsa dan pelaku pembangunan sehingga tidak membutuhkan adanya mitra lain. Dengan kata lain, pemerintah melihat bahwa pengembangan kelembagaan masyarakat yang akan berfungsi sebagai mitra dalam pembangunan daerah, belum merupakan prioritas. Setidaknya, dugaan ini tercermin dari program dan alokasi dana pembangunan pada APBD pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.

Pada gilirannya, wawasan ini semakin menyulitkan posisi pemerintah karena keterbatasan keuangan yang dimiliki. Keterbatasan itu disiasati dengan merancang kebijakan daerah untuk menggali potensi yang ada (untuk meningkatkan pendapatan dae-

rah). Pada umumnya kebijakan ini justru membebani masyarakat sekaligus menghambat kelancaran aktifitas perekonomian daerah (*high-cost economy*). Muaranya, peluang bagi berkembangnya lembaga-lembaga masyarakat yang mandiri (karena ditunjang secara finansial oleh kalangan masyarakat) semakin tertutup.

Ketiga, program lembaga-lembaga modern yang hanya berkonsentrasi pada pengenalan nilai dan pembaharuan itu. Sangat kurang yang memperhatikan atau menaruh perhatian pada pentingnya proses reaktualisasi dan revitalisasi budaya masyarakat agar dapat bersenyawa (menerima) pembaharuan nilai-nilai dan wawasannya.

Belum mewujudnya daerah sebagai komunitas atau minimal sebagai satu satuan sosial-ekonomi yang memiliki keunggulan lokal menunjukkan bahwa interkoneksi antarfaktor yang menjadi unsur pembentuk belum berlangsung secara optimal. Faktor fisik atau sumberdaya alam yang tersedia tidak atau belum mendorong terbentuk kelembagaan yang setara dan sepadan (kompatibel) dalam mengelolanya. Sebaliknya juga benar, bahwa kelembagaan masyarakat, dan juga pemerintah--dalam hal ini mwujud dalam bentuk organisasi yang memiliki identitas yang spesifik--tidak sepenuhnya setara dan sepadan dengan sumberdaya yang ada. Tiadanya interkoneksi, tidak ada pula "persenyawaan" yang dihasilkannya, yaitu berupa komunitas yang unik.

Penyebabnya terdiri atas beberapa hal. *Pertama*, adalah bahwa kabupaten memang didisain sebagai satuan administrasi pemerintahan, bukan sebagai komunitas. Walaupun ada beberapa kabupaten yang awalnya berupa swapraja. Sebagai satuan administrasi pemerintahan, maka kebijakan yang berlaku ditetapkan secara terpusat (uniform), sehingga bermuara pada terbentuknya daerah-daerah administrasi yang homogen pula. Malah, Desa sebagai satuan permukiman yang terkecil yang secara alamiah merupakan komunitas, telah ditransformasikan menjadi daerah administrasi pemerintahan.

Struktur pemerintahan yang disusun mengikuti arahan dari pemerintah pusat dalam banyak hal tidak kompatibel dengan kondisi spesifik daerah. Dengan kondisi seperti ini, pemerintah tidak mampu mendayagunakan potensinya seoptimal mungkin untuk membangun kelembagaan masyarakat di dalam wilayah administrasi pemerintahannya.

Kedua, sikap, wawasan dan kualitas aparatur pemerintahan yang tidak kompatibel dengan kondisi yang ingin diwujudkan. Walaupun pada saat ini era otonomi telah diakui dan dilaksanakan, tetapi mayoritas aparat pemerintah belum berhasil membiasakandiri dengan gaya yang diperlukan di era otonomi daerah. Senyatanya, konsep otoda belum sepenuhnya dimengerti apalagi diimplementasikan. Otoda diinterpretasikan sempit, yaitu hanya sebagai pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah, bukan sebagai kebijakan untuk memberi peluang kepada daerah guna mengembangkan diri seoptimal mungkin dengan mengandalkan sumberdaya lokal dengan cara yang sesuai dengan budaya lokal.

Wawasan dan sikap aparatur pemerintah belum bergeser jauh dari masa-masa sebelumnya. Lebih berwawasan sebagai *regulator* ketimbang *motivator* dan belum mampu

bergeser menjadi *steering* ke timbang *rowing*. Di samping itu, aparat pemerintah belum mampu membiasakan diri untuk berfikir dan bertindak kreatif-inovatif untuk memanfaatkan potensi sumberdaya yang spesifik.

Ketiga, lembaga kemasyarakatan modern yang ada di tingkat propinsi belum mampu berperan aktif mendorong terbentuknya kawasan dan daerah menjadi suatu komunitas. Ini adalah konsekuensi logis dari ketidakmampuan lembaga-lembaga dimaksud untuk memerankan fungsinya secara optimal sebagaimana telah disinggung sebelumnya.

Keempat, adalah dampak reformasi berupa terjadinya diskontinuitas dalam kebijakan pemerintahan dan pendekatan pembangunan. Padahal, pembangunan kelembagaan masyarakat dan komunitas membutuhkan waktu yang relatif lama. Dengan kata lain, diperlukan adanya kebijakan pembangunan yang dilaksanakan secara konsisten. Prasyarat ini menjadi tidak terpenuhi dengan adanya reformasi yang mengubah hampir semua kebijakan tanpa kecuali.

2.3 Kualitas Interkoneksitas

Senyatanya, tatanan merupakan perwujudan dari interkoneksitas. Dengan demikian, Sulawesi Selatan semestinya dilihat sebagai perwujudan dari berbagai ragam interkoneksitas, mulai dari yang berupa fisik ekologis yang umumnya bersifat terberi (*given*), interkoneksitas buatan (interkoneksitas teknologis), berupa jaringan prasarana wilayah seperti jalan, irigasi, energi dan telekomunikasi, yang kemudian memicu atau mendukung mewujudnya interkoneksitas sosial, baik yang berbasis ekonomi maupun yang berbasis budaya. Pada gilirannya, interkoneksitas yang disebutkan terakhir akan memengaruhi interkoneksitas buatan, dan, secara langsung maupun tidak langsung, akan memengaruhi pula interkoneksitas fisik ekologis. Pola keterkaitan itu berlangsung secara berkesinambungan dan bersifat sangat dinamis.

Mudah dimengerti bahwa kualitas interkoneksitas dimaksud sangat menentukan kualitas keberlangsungan keberadaan Sulsel, karena menentukan kualitas kelembaman Sulsel Sulsel, sebagai suatu *Evolutionary Learning Community*, untuk melakukan adaptasi-kreatif terhadap dinamika lingkungan eksternalnya dan pergeseran aspirasi masyarakatnya.

1. Keterkaitan Fisik Ekologis

Secara alamiah, wilayah Sulawesi Selatan terdiri atas beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS), tepatnya 53 DAS yang pengelolaannya dikelompokkan ke dalam 4 (empat) Wilayah Pengelolaan DAS, yaitu WP-DAS Jeneberang, Bila-WalannaE, Sadding, dan Rongkong. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa seluruh wilayah Sulawesi Selatan dibagi habis oleh WP-DAS tersebut. Malah, kawasan pesisir, termasuk perairan yang ada dihadapannya, masih mendapatkan pengaruh dari DAS yang berada di hilirnya. Dengan kata lain, keberadaan DAS-DAS ini membuat adanya keter-

kaitan ekologis yang sangat erat di antara kawasan dan daerah kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan.

WP DAS Jeneberang meliputi wilayah 8 (delapan) kabupaten di bagian selatan Sulawesi Selatan, termasuk kota Makassar, mencakup wilayah seluas 825.607 Ha dan kawasan hutan seluas 204.427 Ha. Sekitar 38% kawasan hutan di wilayah ini (77.092 ha) merupakan lahan kritis. Dampaknya terlihat pada meningkatnya kerentanan wilayah terhadap banjir dan longsor. Dampak ini mewujud pada tahun 2006 berupa longsor dalam skala besar yang terjadi di hulu DAS Jeneberang. Kejadian ini tidak saja memengaruhi kualitas air baku bendungan Bili-Bili yang memasok kebutuhan air baku bagi penduduk kota Makassar dan sekitarnya, tetapi sangat mungkin memaksa pengelola bendungan untuk merevisi umur pakai bendungan.

WP DAS Bila-WalannaE mencakup empat kabupaten di bagian tengah Sulawesi Selatan, yaitu kabupaten Sidrap, Wajo, Soppeng dan Bone. Luas lahan kritis di wilayah ini pada tahun 2007 adalah 115.696 ha. Penurunan fungsi lindung kawasan ini telah berlangsung lama dan intensitasnya semakin tinggi dengan dampak langsung yang terjadi adalah semakin mendangkalnya danau Tempe. Akibat pendangkalan tersebut danau Tempe tidak mampu lagi menampung air dari sungai CenranaE sehingga diteruskan ke sungai Walannae yang mengakibatkan banjir setiap tahun di sepanjang sungai di Wajo dan Bone. Selain itu, terjadi juga banjir setiap tahun di sekeliling danau Tempe yang menenggelamkan sejumlah kecamatan di kabupaten Soppeng, Sidrap dan Wajo.

WP DAS Saddang terletak di sebelah Utara DAS Bila-WalannaE mencakup 5 (lima) kabupaten yaitu Tanatoraja, Enrekang, Sidrap, Pinrang, dan kota Parepare. Sekitar 47,6% lahan kritis Sulawesi Selatan (176.084 ha) terdapat di kawasan hutan wilayah ini. Padahal, dua bendungan besar yang memasok sebagian besar kebutuhan listrik dan mengairi sawah sentra produksi Sulawesi Selatan, yaitu bendungan Benteng dan bendungan Bakar, bergantung pada DAS ini. Dampak dari kondisi DAS yang memburuk itu menimbulkan gangguan serius terhadap kinerja PLTA Bakar yang pada beberapa tahun yang lalu sempat mengganggu pasokan listrik bagi seluruh wilayah Sulawesi Selatan.

WP DAS Rongkong meliputi wilayah di 4 (empat) kabupaten di wilayah Utara Sulawesi Selatan, yaitu Luwu Timur, Luwu Utara, Luwu dan kota Palopo. Tekanan terhadap DAS ini semakin besar dalam dua dekade terakhir ini setelah pembukaan lahan untuk perkebunan Kakao dan Cengkeh dilakukan secara besar-besaran dan setelah pembangunan infrastruktur transportasi dilakukan secara intensif. Akibatnya, terjadi banjir setiap tahun yang sebelumnya tidak ada.

Di samping itu, kerusakan ekosistem pada kawasan pesisir juga tidak kalah seriusnya dibandingkan dengan yang terjadi di hulu (DAS). Kawasan hutan mangrove berkurang dengan cepat karena dikonversi menjadi kawasan pertambakan atau untuk kegiatan budidaya lainnya. Kerusakan hutan mangrove ini selain memengaruhi

kualitas habitat perairan yang pada umumnya bernilai ekonomis tinggi juga meningkatkan potensi aberasi yang gelombang dan pasang air laut, serta akan semakin diperparah oleh kemungkinan kenaikan muka laut akibat pemanasan global. Di samping itu, erosi yang berkepanjangan pada hampir semua sungai besar maupun kecil juga menimbulkan dampak negatif pada kawasan pesisir, antara lain berupa proses sedimentasi (pendangkalan perairan pelabuhan) dan kualitas pengairan tambak.

Menurunnya kualitas lingkungan pada semua DAS dan mayoritas kawasan pesisir yang ada di Sulawesi Selatan seperti diuraikan di atas terutama disebabkan oleh semakin maraknya pembukaan lahan yang semakin tidak terkendali, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh kalangan pengusaha menengah dan besar, untuk tujuan ekonomi, seperti pertanian, terutama perkebunan, termasuk kegiatan pertambangan dan penggalian. Pada satu sisi, kegiatan itu memberikan nilai tambah pada perekonomian Sulsel, tetapi pada sisi lain—terutama untuk jangka panjang—kegiatan-kegiatan itu justru mengancam sustainabilitas perekonomian. Potensi ancaman itu telah mulai mewujudkan sebagaimana terlihat pada kasus PLTA Bakar dan Dam Bili-bili yang telah disinggung sebelumnya.

Senyatanya, upaya pengendalian dampak lingkungan tidak hanya diprioritaskan di kawasan hulu DAS, tetapi juga perlu dikedepankan dalam penataan wilayah hilir, termasuk kawasan perkotaan. Sejak satu atau dua dekade yang lalu, perencanaan kota Makassar sudah sangat tidak berwawasan lingkungan. Wilayah yang diapit oleh jalan A.P. Petta Rani dan Jln. Veteran, yang secara fisik ekologis semestinya menjadi daerah resapan atau hutan kota, telah dibiarkan bertumbuh menjadi kawasan pemukiman yang padat. Berkurangnya daerah resapan ini, yang diperparah oleh semakin menciutnya areal taman kota--malah lapangan Karebosi yang merupakan daerah resapan yang cukup potensial telah mulai dialihkan fungsinya--diiringi dengan peningkatan penggunaan sumur dalam, akibat pasokan air baku dari dam Bili-Bili dan sumber air lainnya yang tidak mencukupi kebutuhan penduduk dan industri, akan bermicu peningkatan intrusi air laut serta menurunnya permukaan tanah. Semua dampak negatif itu akan saling berakumulasi yang pada gilirannya akan mengganggu kinerja pelayanan perkotaan atau bahkan, pada kondisi ekstrim, akan mengancam keberlangsungan keberadaan kota Makassar

Gambaran di atas menunjukkan bahwa, walaupun sedikit terlambat, kebijakan penataan ruang wilayah perlu diprioritaskan. Produk kebijakan yang mewujudkan dalam bentuk Rencana Tata Ruang, termasuk rencana tata ruang kota, semestinya dijadikan acuan secara konsisten dalam setiap kegiatan pembangunan, khususnya dalam kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan dalam skala menengah ke atas. Dengan demikian, kepentingan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi demi untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dapat selaras dengan kepentingan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Tepatnya, pemenuhan kepentingan masa kini tetap diperhatikan tanpa harus mengorbankan kepentingan masa depan.

2. Struktur Tata Ruang

Struktur tata ruang Propinsi Sulawesi Selatan menentukan kualitas interkoneksi antardaerah dan antarkawasan, sekaligus merupakan kerangka--itulah sebabnya disebut struktur--dari wilayah Sulawesi Selatan sebagai suatu komunitas yang utuh, yang memungkinkan Sulsel berartikulasi secara optimal terhadap dinamika lingkungan eksternalnya.

Sruktur dimaksud terdiri atas jaringan transportasi, jaringan irigasi dan air baku, jaringan energi (listrik), serta jaringan telekomunikasi.

Jaringan Transportasi

Kinerja jaringan transportasi antara lain diukur dari waktu menunggu (*waiting time*), yaitu waktu yang diperlukan oleh suatu komoditas dari sejak saat siap diangkut sampai saat tiba di tangan konsumen. Termasuk kedalam waktu menunggu, waktu jelajah (*traveling time*), yaitu waktu untuk menempuh suatu ruas jalan (moda) serta waktu menunggu pengangkutan, khususnya di intermoda jika ada. Waktu jelajah ditentukan oleh jarak dan kualitas jalan serta ketersediaan sarana angkutan.

Pada saat ini, seluruh ibu kota kabupaten telah saling terhubung melalui jalan raya yang pada umumnya memiliki kualitas yang cukup baik, walaupun kapasitasnya mulai dirasakan tidak mencukupi untuk mendukung pertumbuhan arus barang dan penumpang, khususnya poros Makassar-Parepare. Ini membuat waktu jelajah (*traveling time*) dan fluktuasinya meningkat, khususnya pada musim hujan di mana banyak ruas jalan yang mengalami kerusakan atau tergenang banjir, pada musim liburan dan panen akibat meningkatkan arus penumpang dan barang.

Di samping itu, keterpaduan sistem transportasi, khususnya antar moda, belum optimal. Waktu menunggu di terminal antar moda--di pelabuhan dan bandara--relatif lama. Penggunaan peti kemas sangat membantu khususnya untuk mengurangi waktu di terminal antar moda. Walaupun demikian, mengingat model angkutan ini membutuhkan volume yang relatif besar, maka waktu pengumpulan akan meningkat yang pada gilirannya akan meningkatkan pula waktu menunggu.

Kendala sebenarnya terletak pada langkanya sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan wilayah produksi dengan kota-kota terdekat. Hal ini lebih diperparah oleh fakta bahwa wilayah-wilayah penghasil umumnya berskala kecil dan tersebar dalam bentang wilayah yang luas. Kesemuanya membuat pengangkutan komoditas pertanian terpaksa dilakukan dalam satuan volume yang relatif kecil. Inilah sebenarnya faktor utama yang membuat *waiting time*. Mengingat bahwa waktu berkorelasi positif dengan harga komoditas, khususnya untuk komoditas pertanian yang sangat rentan terhadap waktu, maka mudah dimengerti mengapa komoditas pertanian Sulsel sulit memelihara pangsa pasarnya, terutama di tingkat regional dan internasional. Ekspor komoditas pertanian, udang segar misalnya, menghadapi kendala utama berupa kelangkaan *farming road* yang memudahkan pengumpulan dan

pengangkutan hasil panen, yang diperparah oleh tiadanya penerbangan reguler dari Bandara Hasanuddin ke luar negeri.

Kondisi ini memberikan dampak yang cukup besar terhadap kinerja sistem perekonomian Sulawesi Selatan secara keseluruhan, karena cenderung memicu peningkatan biaya tidak langsung (*indirect cost*) transportasi yang bermuara pada meningkatnya harga jual komoditas sehingga sulit mempertahankan pangsa pasarnya.

Transportasi antarpulau juga merupakan kendala bagi mewujudnya Sulsel sebagai suatu komunitas yang utuh. Umumnya, transportasi antar pulau hanya dilayani oleh pelayaran rakyat yang sangat rentan terhadap musim. Dikombinasikan dengan fasilitas keselamatan pelayaran yang relatif sangat tidak memadai. Ini mengakibatkan kebanyakan pulau menjadi wilayah marginal (*remote island*) yang menelantarkan penduduknya dan sekaligus menutup peluang untuk memanfaatkan sumberdaya perairan dan perikanan yang cukup melimpah.

Transportasi udara di dalam wilayah Sulsel masih dalam taraf awal pengembangan. Bandara Pong Tiku di Tator dapat melayani kebutuhan lalu lintas udara antara Makassar dengan wilayah Sulsel bagian Utara (Kabupaten Tator dan sekitarnya). Sejak beberapa tahun sebelumnya, bandara ini telah mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan sektor pariwisata. Kendala yang dihadapi adalah faktor musim atau iklim yang tidak kondusif bagi penerbangan pesawat kecil.

Bandara di Soroaka yang dioperasikan oleh PT. Inco memiliki posisi strategis karena menghubungkan Makassar dengan wilayah Luwu yang relatif jauh jika menggunakan transportasi darat. Pengembangan wilayah di kawasan itu cukup terdorong oleh keberadaan Bandara itu. Sebaliknya juga benar, bahwa pengembangan Luwu dan sekitarnya akan mendorong pengembangan Bandara.

Bandara Hasanuddin merupakan Bandara terpenting di Kawasan Timur Indonesia (*regional hubs*). Itu terutama disebabkan oleh posisi geografis Makassar yang merupakan jembatan antara Kawasan Barat dan Kawasan Timur Indonesia dan tingkat perkembangan ekonomi Sulsel yang relatif lebih baik dibandingkan dengan wilayah lain di sekitarnya. Pada saat sekarang, fasilitas Bandara sangat tidak memadai untuk melayani jumlah penumpang domestik yang terus meningkat pesat. Pengoperasian Terminal baru pada tahun 2008, diharapkan akan mengatasi masalah ini, termasuk angkutan barang (*cargo*).

Masa depan Bandara Hasanuddin sebagai *regional hubs* sangat ditentukan oleh tingkat perkembangan perekonomian Sulsel yang merupakan faktor pendukung utama terpeliharanya arus penerbangan dari dan ke Makassar. Parameter ini menjadi pertimbangan utama perusahaan penerbangan untuk melayani bandara ini, di samping pertimbangan lokasi yang disebutkan sebelumnya. Dengan kata lain, posisi bandara Hasanuddin sebagai *regional hubs* atau keinginan untuk menjadikannya sebagai bandara internasional yang mampu beroperasi secara komersial, sangat tergantung

kepada tingkat perkembangan Sulsel di masa depan dan daya tarik Sulsel bagi wilayah-wilayah di Kawasan Timur Indonesia. Tanpa daya tarik dimaksud, posisi itu jelas akan tergeser yang kecenderungannya mulai terlihat saat ini berupa maraknya "penerbangan langsung" dari Jakarta dan atau Surabaya ke wilayah-wilayah di Kawasan Timur Indonesia tanpa melalui bandara Hasanuddin.

Jaringan Energi

Senyatanya, dari sisi jaringan interkoneksi energi, Sulawesi Selatan telah dapat dilihat sebagai suatu entitas yang utuh, karena telah memiliki jaringan listrik, grid PLN 20 KV, yang mencakup hampir seluruh wilayahnya, termasuk daerah-daerah terpencil dan pulau Selayar. Sebagian wilayah Luwu Timur memang belum termasuk ke dalam jaringan itu, tetapi kebutuhan listriknya dapat terpenuhi oleh pasokan dari PT. INCO. Walaupun demikian, kualitasnya masih perlu ditingkatkan, karena beberapa penyulang tegangan menengah mempunyai tegangan ujung yang cukup rendah karena penyulang tersebut melayani daerah yang sangat jauh jaraknya (sampai ratusan kilometer) dari Gardu Induk/Pembangkit. Jaringan distribusi yang sangat panjang tersebut berakibat pada turunnya tegangan dan meningkatnya susut jaring. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengatur distribusi yang berlokasi di sekitar Pare-Pare yang dapat mengatur pembebanan dan pengoperasian di sekitar distribusi.

Masalah yang dihadapi oleh Sulsel adalah ketersediaan energi listrik yang dipasok oleh sumber-sumber energi internal. Pada saat ini pasokan dimaksud hanya bersumber dari PLTA Bakaru (126 MW) dan PLTGU Sengkang (135 MW), serta sebagian kecil yang berasal dari PLTA yang dioperasikan oleh PT INCO (hanya sekitar 5 MW yang disalurkan ke jaringan PLN, sebagian besar digunakan sendiri dalam pengolahan biji nikel). Pasokan internal itu relatif kecil dibandingkan kebutuhan saat ini, yaitu sebesar 448 MW (2006).

Kekurangan pasokan itu ditutupi oleh pembangkit yang menggunakan sumber energi dari luar Sulawesi Selatan, misalnya di Makassar berupa PLTD Sewatama Tello (16 MW), di Suppa Pinrang PLTD (60 MW) dan beberapa PLTD lainnya yang terinterkoneksi melalui jaringan tegangan menengah 20 KV yang beroperasi pada beban puncak.

Fakta ini menunjukkan bahwa Sulawesi Selatan sangat tergantung, terutama di masa depan, kepada pasokan sumber-sumber energi dari luar wilayah. Kondisi ini jelas akan menjadi kendala bagi pengembangan perekonomian Sulawesi Selatan, khususnya sektor industri yang membutuhkan adanya dukungan sumberdaya energi yang memiliki reliabilitas tinggi dan tentu saja murah. Oleh karena itu, pembangunan sektor ini merupakan upaya strategis yang perlu segera dilaksanakan.

Upaya pembangunan sektor energi di Sulawesi Selatan perlu mengedepankan pemanfaatan sumber energi yang tersedia secara lokal. Kiat ini di samping menjamin reliabilitas, juga harga energi yang dihasilkan diharapkan akan relatif murah diban-

dingkan dengan jika menggunakan sumber energi yang harus dikirim dari luar wilayah. Alternatif yang tersedia adalah perluasan pemanfaatan energi gas dan tenaga air (PLTA). Yang disebut pertama terkendala pada cadangan yang relatif terbatas--kecuali jika ditemukan cadangan gas, atau bahkan minyak yang baru--sedangkan yang kedua memiliki peluang yang cukup besar mengigit potensi tenaga air di Sulsel relatif besar, terlebih lagi jika potensi untuk mikro-hidro ikut diperhitungkan. Daya tarik lainnya adalah bahwa PLTA merupakan pemasok energi listrik yang bebas dari emisi gas karbon. Pertimbangan ini akan menjadi semakin penting, oleh adanya kesepakatan global untuk mengurangi emisi dimaksud demi untuk mengendalikan pemanasan global (*global warming*). Tidak mustahil dalam beberapa tahun ke depan, produk olahan yang menggunakan energi yang menghasilkan emisi yang besar akan dikenakan "pajak lingkungan" yang tentu saja akan mengurangi daya tarik produk dimaksud di pasar dunia. Walaupun demikian, implementasi alternatif ini masih perlu dikaji secermat mungkin, mengingat adanya *trade-off* antara PLTA sebagai sumber energi yang relatif murah dengan pertimbangan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan juga lingkungan sosial. Kendala ini menjadi semakin serius jika dikaitkan dengan kondisi Sulsel sekarang yang sangat rentan dilihat dari sisi lingkungan hidup.

Bahan bakar fosil, khususnya minyak bakar, dan batubara merupakan sumber energi listrik yang telah lama dimanfaatkan di Sulawesi Selatan. Di masa depan, kebutuhan terhadap pasokan bahan bakar ini diprediksi akan semakin besar, terutama batubara.

Pemanfaatan batubara sebagai bahan bakar pembangkit listrik di Sulawesi Selatan mungkin merupakan opsi yang terbaik. Alasannya, cadangan batubara Indonesia, khususnya Kalimantan yang letaknya relatif dekat ke Sulawesi Selatan, sangat melimpah. Walaupun demikian diperlukan manajemen transportasi yang prima untuk mencegah keterlambatan pasokan bahan bakar ini, terutama oleh pengaruh musim. Hal ini perlu digaris bawahi mengingat pengalaman PLN di pulau Jawa yang sering mengalami hal yang sama yang mengakibatkan terganggunya pasokan listrik, yang bermuara pada gangguan yang serius pada kontinuitas proses industri. Di samping itu, kecenderungan kenaikan harga energi dunia sangat berpeluang untuk ikut menyeret kenaikan harga batubara, sehingga daya tariknya sebagai sumber energi yang relatif murah sulit dipertahankan. Kendala lainnya adalah bahwa pembangkit listrik yang memanfaatkan batubara merupakan sumber emisi gas karbon yang besar. Seperti telah disinggung sebelumnya, hal ini sangat mungkin akan memberikan dampak negatif terhadap pangsa pasar komoditas hasil industri olahan di pasar global. Pemanfaatan mesin pembangkit yang menggunakan teknologi yang menghasilkan emisi serendah mungkin merupakan alternatif untuk mengatasi kendala dimaksud. Dengan kata lain, pemerintah propinsi perlu mengambil langkah-langkah preventif untuk mencegah pemanfaatan mesin pembangkit bekas atau yang masih menggunakan teknologi lama yang kecenderungannya terlihat jelas saat ini.

Pemanfaatan minyak bakar sebagai bahan bakar pembangkit listrik secara teknologi masih dimungkinkan, tetapi dilihat dari harga minyak bumi yang semakin meningkat, membuat alternatif ini menjadi tidak layak dari sisi finansial.

Di samping pilihan-pilihan di atas, pemanfaatan sumber energi baru, termasuk nuklir, sudah harus dikaji sejak saat ini. Energi surya sebagai pendamping patut diperhitungkan, demi untuk mengurangi beban pembangkit listrik konvensional. Sistem hibrid, sistem yang mengombinasikan energi konvensional dengan energi baru, jika didisain secara tepat akan memiliki kelayakan finansial, apalagi jika ditunjang oleh kebijakan energi yang memihak kepada pemanfaatan sumber-sumber energi non-konvensional, misalnya berupa skema pembiayaan untuk mendukung pemanfaatan energi non-konvensional di perumahan dan di kalangan industri kecil (misalnya untuk pengeringan hasil pertanian).

Diantara sekian banyak alternatif di atas, jawaban yang paling optimal adalah mempercepat pembangunan jaringan interkoneksi Sulawesi. Keberadaan jaringan ini akan memungkinkan Sulawesi Selatan memanfaatkan energi listrik yang melimpah, seperti yang dibangkitkan oleh PLTA yang saat ini sedang dibangun di Sulawesi Tengah.

Jaringan Irigasi dan Air Baku

Jaringan Irigasi Sulawesi Selatan yang mencakup 4 (empat) Satuan Wilayah Sungai (SWS) dengan panjang sungai 1922,70 km dan mengairi 207.928 Ha sawah dengan jaringan primer sepanjang 521,86 km dan sekunder 1.823,97 km. Sebagian besar jaringan ini berada di bawah pengelolaan pemerintah pusat, yaitu sepanjang 371,34 km dan 1.617,16 km masing-masing untuk jaringan primer dan jaringan sekunder yang mampu mengairi areal sawah seluas 171,74 Ha. Sisanya, yaitu 124,56 km untuk jaringan primer dan 184,52 untuk jaringan sekunder, dikelola oleh pemerintah provinsi, dengan luas cakupan area 31.168 Ha. Di antara jaringan irigasi yang disebutkan di atas terdapat jaringan primer sepanjang 25,96 km dan jaringan sekunder sepanjang 21,61 km yang bersifat lintas Kabupaten/Kota yang berada di bawah kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, dengan kapasitas 5.016 Ha.

Di samping masalah yang berkaitan dengan pemeliharaan kondisi jaringan, masalah yang tidak kalah peliknya adalah jaminan ketersediaan atau pasokan air. Seperti telah disinggung sebelumnya, DAS-DAS di Sulawesi Selatan sedang mengalami kondisi yang parah, yang berdampak pada rentannya pasokan air, irigasi maupun air baku lainnya, terutama di musim kemarau. Tanpa penanganan yang serius untuk memperbaiki kondisi DAS tersebut, maka fungsi jaringan tidak akan pernah optimal.

Jaringan air baku untuk air minum dan industri mengalami kondisi yang sama. Pada saat ini, Kota Makassar sangat tergantung kepada pasokan air baku dari Gowa dan Maros. Kesenambungan pasokan air ini mengalami ancaman akibat semakin rusaknya daerah tangkapan pada kedua kabupaten itu. Kondisi ini akan menjadi

semakin parah dengan bertambahnya permintaan air baku, baik oleh jumlah penduduk yang bertambah dengan laju yang cukup tinggi setiap tahunnya, dan terutama oleh pertumbuhan industri.

Artinya, tanpa penanganan yang serius pada jaringan ini, maka pertumbuhan ekonomi, baik di sektor pertanian maupun di sektor industri akan mengalami kendala, atau minimal daya tarik Sulsel sebagai daerah tujuan investasi sulit diwujudkan.

Jaringan irigasi dan air baku merupakan perwujudan dari keterkaitan fisik ekologis yang ditransformasikan menjadi jaringan atau keterkaitan teknologis. Berbeda dengan jenis keterkaitan lainnya, jaringan irigasi dan air baku ini hanya mencerminkan keterkaitan "satu arah" yaitu kawasan yang berada di bagian hilir terhadap kawasan yang berada di bagian hulu. Fakta ini menunjukkan perlunya kebijakan yang adil untuk kedua jenis kawasan tersebut. Dalam hal ini, kawasan yang berada di bagian hulu DAS perlu mendapat kompensasi yang setimpal bagi upayanya menjaga kelestarian fungsi lingkungannya untuk menjaga pasokan air yang kontinu bagi kawasan yang berada di bagian hilir DAS. Upaya dimaksud dalam banyak hal terpaksa mengorbankan peluang-peluang ekonomi yang dimilikinya. Tanpa kebijakan seperti itu, maka keberlangsungan keterkaitan ini tidak akan dapat dipelihara.

Jaringan Informasi dan Komunikasi

Di era ini dan terutama di masa datang--yang merupakan era masyarakat atau ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*)--fungsi informasi akan menjadi semakin penting, bahkan posisinya akan menjadi jauh lebih strategis dibandingkan dengan sumberdaya konvensional yang dikenal selama ini. Oleh karena itu, ketersediaan jaringan informasi dan komunikasi yang handal merupakan keniscayaan. Pada saat ini, ketersediaan jaringan dimaksud masih jauh dari memadai. Itu karena jaringan kabel terestrial belum mampu menjangkau semua satuan pemukiman dan sentra-sentra produksi, terlebih lagi yang terpencil secara geografis.

Kondisi inilah yang menjadi penyebab utama terjadinya kesenjangan digital (*digital divide*) di Sulawesi Selatan yang jika tidak segera ditanggulangi akan menghambatnya upaya-upaya untuk mempersiapkan perekonomian Sulsel memasuki era perekonomian berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*).

Senyatanya, kekurangan ini sedang dan akan segera tertanggulangi dengan kehadiran jaringan nirkabel (*wireless*) yang menunjukkan kecenderungan pertumbuhan yang semakin tinggi dari waktu ke waktu, sehingga dalam waktu yang relatif tidak terlalu lama akan mampu meliputi (men-*cover*) seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Hubungan ke luar daerah juga dapat diliput oleh jaringan ini, yaitu via satelit. Di samping itu, kehandalan hubungan keluar daerah menjadi semakin tinggi dengan selesai dibangunnya jaringan kabel optik yang menghubungkan Makassar-Balikpapan dan Surabaya yang merupakan bagian dari jaringan komunikasi terpadu se Indonesia yang terhubung dengan jaringan komunikasi global.

Keberadaan jaringan ini mendukung pengembangan dan pemanfaatan internet di Sulawesi Selatan. Seiring dengan peningkatan kemampuan teknologi pendukung internet--seperti migrasi dari protokol internet yang baru (IPv6) yang memungkinkan setiap orang memiliki alamat internet pribadi (IP pribadi)--maka diproyeksikan dalam beberapa tahun ke depan, mengikuti kawasan lain di dunia yang lebih maju, transparansi informasi akan mewujud di Sulawesi Selatan.

Keberadaan jaringan ini akan membuat perubahan yang sangat mendasar pada tatanan sosial-budaya. Teknologi ini membuat dunia menjadi semakin datar, dan hirarki hubungan (keterkaitan) yang selama ini bersifat berjenjang akan hilang. Setiap orang dapat berhubungan dengan orang lain, dimanapun dan kapanpun yang sulit, untuk tidak mengatakan tidak akan dapat, dikendalikan oleh pihak lainnya. Sulsel akan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sekaligus merupakan pula bagian tidak terpisahkan dari Indonesia atau bahkan dengan seluruh dunia. Dunia akan satu kesatuan yang utuh, tanpa dimensi waktu (*timeless*) dan juga tanpa dimensi ruang (*spaceless*).

Kondisi ini akan membuka peluang sekaligus dapat pula mewujud sebagai ancaman bagi Sulsel. Menjadi ancaman jika Sulawesi Selatan tidak berhasil membangun identitasnya, sehingga akan larut dalam dinamika global. Ancaman lainnya adalah jika Sulsel tidak mampu ikut berpartisipasi dalam mengisi jaringan tersebut dengan konten (*content*) yang dibutuhkan oleh masyarakat dunia. Jika hal ini terjadi maka Sulsel akan menjadi konsumen dari konten yang dihasilkan oleh pihak lain. Dengan kata lain, masa depan yang cerah hanyalah bagi tatanan yang bisa menghasilkan konten yang mengalir pada jaringan itu. Konten itu pada dasarnya adalah pengetahuan, yang menjadi pengganti dari komoditas konvensional yang selama ini mengalir melalui jaringan konvensional pula, seperti jalur transportasi, jaringan energi dan lainnya.

3. Keterkaitan Ekonomi

Keterkaitan paling penting dalam perekonomian adalah jaringan pasar yang merupakan aliran komoditas, bahan mentah dan hasil-hasil produksi antar pusat-pusat permukiman dan pusat produksi, serta aliran modal dan pendapatan. Senyatanya, keterkaitan dimaksud merupakan perwujudan dari keterkaitan dalam proses konsumsi dan produksi--berupa keterkaitan kebelakang (*backward linkage*) dan keterkaitan ke depan (*forward linkage*) yang dapat digambarkan dengan baik melalui Tabel Input-Output yang telah diuraikan sebelumnya pada sub bab 2.1.

Dari sisi spasial, keterkaitan dimaksud dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori. *Pertama*, adalah keterkaitan internal, yaitu keterkaitan yang terjadi dalam wilayah Sulawesi Selatan, sedangkan yang *Kedua*, keterkaitan eksternal, menunjukkan keterkaitan ekonomi Sulawesi Selatan dengan wilayah lain, di Indonesia maupun di luar negeri.

Keterkaitan Internal

Uraian pada sub bab sebelumnya menunjukkan bahwa pada umumnya kegiatan ekonomi di kawasan perdesaan didominasi oleh sektor primer, sedangkan kegiatan ekonomi di sektor sekunder dan tersier mayoritas terjadi di kawasan perkotaan, khususnya di kota Makassar, serta di Pare-Pare dan di ibukota kabupaten lainnya dengan intensitas yang jauh lebih kecil. Dengan demikian, keterkaitan spasial yang dipicu oleh kegiatan ekonomi masih sangat primitif. Pada satu sisi keterkaitan itu dipicu oleh ketergantungan terhadap produk primer sebagai bahan baku proses industri dan bahan konsumsi di kawasan perkotaan. Sedangkan pada sisi lain berupa adanya ketergantungan bahan-bahan konsumsi (selain bahan makanan) dan kebutuhan untuk menunjang sektor pertanian di kawasan perdesaan.

Pola keterkaitan seperti ini jelas tidak begitu baik bagi pengembangan perekonomian Sulsel. Dampak yang mulai terlihat adalah membengkaknya kegiatan perekonomian di kota-kota besar, terutama di Makassar, yang bermuara pada semakin timpangnya distribusi pendapatan. Jika kecenderungan ini tidak segera dikoreksi, maka Makassar akan mengalami kejenuhan dan pada gilirannya menciptakan kondisi yang tidak nyaman sebagai kota hunian dan, ini yang lebih penting khususnya jika dilihat dari sisi ekonomi, tidak akan mampu lagi menawarkan proses produksi yang murah. Walaupun sebenarnya gejala ini merupakan gejala alamiah (proses aglomerasi), tetapi perlu dikendalikan agar dampaknya tetap berada dalam batas-batas yang dapat ditoleransi.

Seperti telah disinggung sebelumnya, keterkaitan spasial itu merupakan perwujudan dari keterkaitan fungsional (keterkaitan industrial) yang digambarkan dengan baik melalui Tabel I/O Sulsel.

Tabel I/O Sulawesi Selatan (tahun 2000 dan 2005) menunjukkan bahwa keterkaitan industrial (secara internal) belum berkembang optimal di Sulawesi Selatan. Itu diperlihatkan oleh *forward linkage* (keterkaitan ke depan) dan *backward linkage* (keterkaitan kebelakang) serta jumlah industri (komoditas) yang rata-rata rendah dalam Tabel I/O itu. Dengan kata lain, kebanyakan produk primer langsung dimanfaatkan sebagai *final demand* (permintaan akhir), baik sebagai konsumsi maupun sebagai ekspor ketimbang dimanfaatkan sebagai permintaan antara (*intermediate output*).

Secara umum keterkaitan dimaksud dapat dilihat dari rasio antara permintaan antara dengan permintaan total dari seluruh sektor. Data I/O Sulsel menunjukkan rasio itu sebesar 31,93% pada tahun 2000 dan meningkat menjadi 35,13% pada tahun 2005. Ini menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan dalam keterkaitan industrial. Walaupun demikian, jika dibanding dengan rata-rata nasional (Tabel I/O nasional tahun 2005) yang mencapai angka 43,06%, menunjukkan bahwa keterkaitan industrial di Sulawesi Selatan belum sepenuhnya berkembang.

Padi, yang merupakan sektor basis Sulawesi Selatan karena menyerap tenaga kerja terbesar, sepenuhnya hanya terkait dengan industri Beras. Sedangkan output industri yang disebutkan terakhir hanya sebesar 7,22% yang dimanfaatkan sebagai permintaan antara--diserap oleh sektor hotel dan restoran, jasa pemerintahan umum, serta industri tepung beras & mie dan makaroni--selebihnya mewujudkan sebagai *final demand*, yaitu di konsumsi atau di antarpulaukan.

Kondisi seperti itu untuk Padi dapat dimengerti, karena *nature* komoditas itu memang begitu. Dalam arti sulit mengembangkan industri selain industri beras yang memanfaatkan padi sebagai input antara. Tetapi kecenderungan ini justru terjadi pula untuk sebagian besar komoditas dari sektor primer, seperti Kakao yang mewakili sub sektor perkebunan dan Nikel sebagai wakil dari sektor pertambangan.

Produksi Kakao Sulawesi Selatan sebagian besar di ekspor dalam bentuk gelondongan. Permintaan Antara hanya sebesar 6,33% dari total output (Rp. 2,767 trilyun) yang mayoritas diserap oleh industri *biji-bijian kupasan, coklat bubuk dan kembang gula*. Permintaan Akhir (*final demand*) didominasi oleh Ekspor, yaitu sebesar 91% dari total Permintaan Akhir. Demikian pula halnya dengan Nikel, yang nyaris semua hasilnya, kecuali untuk perubahan stock yang nilainya relatif sangat kecil, 1,22% dari total output, diekspor senilai Rp. 6.150.milyar.

Ilustrasi di atas menunjukkan bahwa keterkaitan industrial di Sulawesi Selatan masih belum berkembang. Dengan kata lain, keberadaan komoditas primer belum dimanfaatkan untuk mendorong pengembangan sektor sekunder. Ini adalah salah satu penyebab relatif rendahnya PDRB Sulsel.

Keterkaitan Eksternal

Keterkaitan ekonomi Sulawesi Selatan dengan kawasan lainnya dapat diketahui dengan mengamati arus barang dan jasa yang keluar dan masuk ke propinsi ini, antar pulau maupun impor dan ekspor. Kuantitas arus barang dan jasa dimaksu yang relatif tinggi dan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi pula menunjukkan bahwa Sulawesi Selatan memiliki keterkaitan ekonomi yang cukup erat dengan wilayah lain, di Indonesia maupun di luar negeri, sekaligus menunjukkan kontribusi Sulsel dalam pengembangan perekonomian nasional dan peningkatan kualitas Ketahanan Nasional.

Komposisi ekspor (2005) didominasi oleh hasil industri pengolahan (48,84%), disusul oleh Pertambangan dan Galian (25,05%), Pertanian (14,68%) dan Perdagangan (10,59%), dengan total ekspor sebesar Rp. 24,57 trilyun. Kontribusi ekspor terhadap total permintaan akhir juga meningkat, yaitu dari 29,34% pada tahun 2000 menjadi 35,31% pada tahun 2005.

Untuk sektor Industri Pengolahan, kontribusi terbesar berasal dari Ikan Olahan (26,67%), disusul oleh Biji-bijian Kupasan dan Coklat Bubuk (24,12%), Beras (20,54%), Se-

men (19,02%), Tepung Terigu (14,64%), Bahan Bangunan dari Kayu (6,10%), dan Kayu Lapis (5,4%). Total ekspor sektor ini adalah Rp. 11,51 triliun.

Komposisi di atas menunjukkan bahwa untuk sektor industri pengolahan, hasil dari agro-industri memberikan sumbangan terbesar. Prospek pengembangan ekspor untuk kelompok ini sangat tergantung kepada pasokan sektor pertanian dan dinamika pasar global.

Untuk sektor pertambangan, dari nilai ekspor sebesar Rp. 6,15 triliun hampir seluruhnya disumbangkan oleh Nikel. Kontribusi Nikel dalam keseluruhan ekspor Sulsel cukup besar, yaitu 25,10% (2005) sedikit meningkat dari 22,24% pada tahun 2000. Mengingat harga Nikel sangat peka terhadap dinamika perekonomian global, sehingga harganya cenderung sangat fluktuatif. Artinya, perekonomian Sulsel akan sangat rentan jika hanya mengandalkan ekspor Nikel. Di samping itu, pengaruh tidak langsung komoditas ini--dalam bentuk keterkaitan industrial--terhadap perekonomian Sulsel hampir tidak ada sama sekali, maka agar keberadaan komoditas menjadi lebih bermanfaat bagi pembangunan daerah diperlukan upaya-upaya yang lebih komprehensif yang sepenuhnya didukung oleh pengusaha Nikel berupa pemberdayaan masyarakat lokal.

Untuk sektor pertanian, porsi terbesar disumbangkan oleh Kakao yang mencakup sekitar 65,42% dari seluruh ekspor sektor pertanian. Diikuti oleh Cengkeh (16,82), Udang (12,2%), Kopi (7,92%), Jambu Mente (6,31%) dan Jagung, 4,64%.

Masa depan ekspor komoditas pertanian akan banyak dipengaruhi oleh pertimbangan lingkungan (dalam arti luas), termasuk oleh semakin maraknya kecenderungan, terutama di luar negeri, untuk hanya mengkonsumsi komoditas bahan makanan yang dalam proses produksinya, tidak atau sangat kurang menggunakan pestisida dan pupuk non-organik. Malah persyaratan baru yang diajukan oleh beberapa negara Eropa untuk budidaya pertambakan yang hanya menerima impor hasil tambak yang sumber airnya (sungai) tidak tercemar oleh pestisida limbah dari kegiatan pertanian. Indikatornya adalah bahwa sungai dimaksud harus berada pada jarak tertentu dari kegiatan pertanian yang menggunakan pestisida.

Jika mengacu kepada kecenderungan itu, maka upaya untuk menggeser kegiatan pertanian kepada pemanfaatan pupuk organik dan pengendalian hama yang bersahabat dengan lingkungan perlu diprioritaskan. Di samping karena produk pertanian seperti ini memiliki nilai jual yang tinggi di pasar regional dan global, juga pada sisi lain, pengurangan pemakaian pestisida dan pupuk non-organik akan sangat membantu neraca perdagangan Sulsel.

Di samping itu, perhatian perlu diberikan kepada pengembangan komoditas yang memiliki keunggulan lokal karena memiliki daya tarik tersendiri dalam pasar komoditas dunia. Kopi Toraja misalnya, dapat dimasukkan ke dalam kategori komo-

ditas jenis ini, karena memiliki aroma dan rasa yang khas yang tidak dimiliki oleh jenis kopi lainnya.

Upaya lain yang diperlukan untuk meningkatkan ekspor adalah memperbaiki kinerja sistem pemasaran dan, tidak kalah pentingnya, meningkatkan fasilitas pelayanan transportasi. Upaya untuk memanfaatkan meningkatnya selera konsumsi terhadap udang segar di Jepang dan di beberapa negara Eropa misalnya, terkendala oleh kelangkaan penerbangan langsung ke daerah tujuan ekspor.

Kecenderungan global lainnya yang diprediksikan akan mempengaruhi komposisi ekspor Sulsel adalah semakin meningkatnya perhatian dunia untuk memanfaatkan bahan bakar berbasis hasil pertanian (*bio fuel*) ketimbang bahan bakar fosil, sebagai upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sekaligus sebagai kiat untuk meniyasati semakin langkanya ketersediaan bahan bakar tersebut. Kecenderungan ini akan mendorong semakin meningkatnya harga komoditas pangan dunia yang pada satu sisi jelas akan memicu pertumbuhan ekspor, tetapi pada sisi lain akan mendorong peningkatan harga pangan lokal yang belum tentu diikuti oleh kenaikan daya beli masyarakat.

Jumlah impor yang digunakan sebagai input antara sebesar Rp. 15,96 trilyun, kebanyakan diserap oleh industri pengolahan Rp. 7,17 trilyun dan pertanian Rp. 2,83 trilyun--kebanyakan dalam bentuk pupuk dan pestisida--sedangkan sebagai permintaan akhir Rp. 8,38 trilyun.

Impor menunjukkan peningkatan yang cukup besar dari tahun ke tahun, yaitu dari Rp. 7,05 trilyun pada tahun 2002 menjadi Rp. 18,72 trilyun pada tahun 2006. Impor dalam arti sesungguhnya, yaitu dari luar negeri, memiliki porsi yang relatif kecil dibandingkan yang berasal dari propinsi lain, yaitu Rp. 583,62 milyar (2002) yang berkembang menjadi Rp. 4,69 trilyun pada tahun 2006. Data ini menunjukkan bahwa Sulsel memiliki keterkaitan dengan propinsi lain di Indonesia dengan kadar yang lebih besar dibandingkan dengan keterkaitannya dengan luar negeri. Data ini sekaligus menunjukkan posisi atau peran Sulsel yang cukup besar untuk menunjang perkembangan ekonomi propinsi lain yang pada gilirannya akan bermuara pada perkembangan perekonomian nasional.

Perkembangan ekspor menunjukkan kecenderungan sebaliknya, yaitu porsi ekspor ke luar negeri lebih besar dibandingkan dengan ke propinsi lainnya, yaitu bernilai Rp. 4,64 trilyun dibandingkan dengan Rp. 3,21 trilyun pada tahun 2002 yang berkembang menjadi Rp. 15,08 trilyun (ekspor ke luar negeri) dan Rp. 7,52 trilyun (antar propinsi) pada tahun 2006.

Perbandingan antara data impor-ekspor menunjukkan bahwa untuk perdagangan dalam negeri (antar propinsi), Sulawesi Selatan terus mengalami defisit. Tetapi tidak demikian halnya dengan perdagangan luar negeri. Secara total, jumlah eks-

por selalu lebih besar dibandingkan dengan jumlah impor yang menunjukkan perekonomian Sulsel cukup sehat.

Di samping itu, jumlah ekspor yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai impor antarpropinsi menunjukkan bahwa Sulsel memberikan kontribusi yang lebih besar kepada pertumbuhan ekonomi nasional relatif dibandingkan dengan sumbangan yang diperolehnya dari propinsi lain. Fakta ini menunjukkan bahwa Sulsel telah mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas ketahanan nasional, khususnya di bidang perekonomian. Itu dapat diartikan bahwa Sulsel telah berhasil melakonkan misinya (*raison d'etre*) dengan baik pula.

Ada beberapa upaya dan kebijakan strategis yang dirintis untuk meningkatkan kualitas interkoneksi ekonomi Sulsel dengan lingkungan strategisnya. *Pertama*, adalah membentuk BKPRS (*Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi*) yang disepakati oleh seluruh Pemerintah Propinsi di pulau Sulawesi untuk menginisiasi dan melaksanakan kerjasama regional antar propinsi. Badan ini telah berhasil mendorong pemerintan pusat untuk memprioritaskan penyusunan Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi yang dijadikan sebagai acuan utama dalam perumusan dan pengembangan kerjasama antarpropinsi. Pada beberapa tahun terakhir, implementasi kerjasama dimaksud mengalami penurunan yang salah satu penyebabnya adalah otonomi daerah yang diletakkan pada daerah kabupaten / kota.

Kedua, adalah kerjasama antar beberapa negara Asia Tenggara yang menyepakati membentuk Kawasan Pengembangan Asean Timur, *BIMP – EAGA (Brunei, Indonesia, Malaysia, Philipine – East Asean Growth Area)*. Pada tataran konsep, keberadaan badan ini akan banyak membantu pengembangan wilayah yang dicakupnya. Walaupun, pada tataran operasional belum banyak hasil yang dicapai, khususnya jika dilihat dari dampaknya terhadap peningkatan ekspor Sulawesi Selatan.

Industri Strategis

Terdapat beberapa industri yang bersifat unik di Sulawesi Selatan, yaitu industri yang tidak berbasis pada ketersediaan input yang nilainya besar (dalam input antara), tetapi semata-mata mengandalkan keterkaitan industrial serta *final demand*-nya. Industri tepung terigu dan industri semen merupakan contoh dari jenis industri dimaksud.

Seperti akan diperlihatkan pada uraian nanti, keberadaan industri seperti ini dapat diandalkan sebagai motor pertumbuhan ekonomi Sulsel di masa datang. Itulah sebabnya digolongkan ke dalam industri strategis daerah.

Industri Terigu merupakan industri yang menunjukkan interkoneksi Sulsel yang relatif kuat dengan lingkungan strategisnya. Data tahun 2005 menunjukkan bahwa hampir seluruh Input Antara industri ini berasal dari impor (99,46%) yaitu Rp. 3,14 trilyun dari Rp. 3,512 trilyun. Lebih sepertiga dari outputnya (33,82%) diserap sebagai input antara oleh industri lain, sedangkan lebih dari setengah permintaan akhir

diserap oleh ekspor (Rp. 1,69 triliun), tepatnya di kirim ke propinsi lain. Prospek untuk mempertahankan nilai ekspor komoditas ini cukup baik, karena kebutuhan terigu, khususnya di Kawasan Timur Indonesia cenderung meningkat, antara lain oleh program diversivitas pangan.

Data ini menunjukkan keunikan industri ini. Pada satu sisi, berfungsi untuk memenuhi kebutuhan internal masyarakat Sulsel (impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi), tetapi pada sisi lain, sebagian hasilnya dapat dikirim ke propinsi lain, sehingga "neraca perdagangan" (yang minus) dari industri ini dapat dikurangi. Yang lebih penting, industri ini sekaligus membantu menciptakan lapangan kerja. Pada tahun 2005, industri ini memberikan kontribusi sebesar Rp. 477 milyar pada pembentukan PDRB Sulsel.

Kasus serupa diperlihatkan oleh industri Semen. Nilai Ekspor, termasuk antarpulau) pada tahun 2005 sebesar Rp. 1,87 triliun. Hampir seluruh permintaan akhir (Rp. 2,42 triliun) berwujud ekspor (termasuk yang diantarpulaukan), hanya sebagian kecil berupa perubahan stock.

Komposisi industri ini mirip dengan industri terigu, yaitu Input Antara yang tersedia secara domestik hanya bernilai Rp. 686,58 Milyar--bahan baku berupa batu kapur dan lainnya hanya bernilai Rp. 47,42 milyar--sedangkan kandungan impornya sangat tinggi, yaitu 1,37 triliun yang didominasi oleh harga bahan bakar sebesar Rp. 1,06 triliun. Total Input Antara Rp. 2,05 triliun dan menyumbangkan Rp. 2,98 triliun kepada PDRB Sulsel.

Senyatanya, industri semen di Sulsel belum mampu bersaing di pasar dunia, apalagi berhadapan dengan semen asal China, penghasil semen terbesar di dunia. Data tahun 2007 menunjukkan volume ekspor semen hanya 65.926 ton, berkurang sangat banyak dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 816.579 ton. Walaupun demikian untuk pasar dalam negeri, pangsa pasar semen masih cukup terlindungi karena harga semen impor menjadi lebih mahal akibat tingginya biaya transportasi. Justru kendala yang dihadapi di masa depan adalah kemungkinan meningkatnya harga batubara di masa depan yang dipicu oleh kenaikan harga minyak dunia yang membuat permintaan terhadap batubara, sebagai sumber energi alternatif, meningkat. Khusus untuk Indonesia, program pembangunan 100.000 MW PLTU Batubara untuk menggantikan PLTD sedikit banyaknya akan memicu kenaikan harga Batubara, dan kecenderungan itu telah mewujud sejak tahun 2007.

Uraian di atas menunjukkan bahwa kelompok industri seperti kedua jenis industri ini jelas memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan perekonomian Sulsel. Oleh karena itu, perlu upaya dan kebijakan tertentu sehingga jenis industri dimaksud dapat berkembang pesat di Sulawesi Selatan. Dengan kata lain, diperlukan kebijakan yang membuat daya tarik Sulawesi Selatan untuk industri seperti itu semakin meningkat di masa-masa yang akan datang.

4. Keterkaitan Sosial Budaya

Sulawesi Selatan didiami oleh 3 (tiga) rumpun budaya, yaitu etnis Bugis yang berdiam di bagian tengah Sulawesi Selatan, etnis Toraja di wilayah pegunungan pada bagian utara Sulawesi Selatan, dan etnis Makassar yang berdomisili di wilayah pesisir pada bagian selatan Sulawesi Selatan.

Sejak zaman dahulu interaksi sosial budaya antar ketiga etnik telah terpelihara baik. Itu dapat terjadi karena adanya kesetaraan dan kepadanan nilai-nilai dasar, serta nilai keterbukaan yang tinggi pada ketiga etnis yang memungkinkan terciptanya kondisi dialogis yang sehat yang bermuara pada terjadinya proses akulturisasi yang berlangsung mulus, antara lain melalui perkawinan antaretnis yang bahkan dipelopori oleh kalangan istana dan pemuka masyarakat. Hasilnya, seperti yang terlihat saat ini, adalah terciptanya nilai-nilai dasar dari ketiga etnis itu yang semakin setara dan sependan (*compatible*) satu terhadap lainnya. Malah, batas antara etnis menjadi semakin pudar, seperti yang terjadi pada etnis Bugis dan Makassar. Walaupun intensitas kecenderungan ini relatif kurang dengan etnis Toraja. Itu mungkin disebabkan oleh kendala geografis dan perbedaan agama.

Uraian singkat di atas menunjukkan bahwa tidak ada masalah mendasar dalam membangun dan menjaga kualitas interaksi antaretnik. Dengan kata lain, dari sisi budaya, Sulsel dapat dilihat sebagai suatu entitas yang utuh.

Sejatinya, keterkaitan sosial-budaya lebih mendasar sifatnya dibandingkan dengan keterkaitan lainnya, termasuk keterkaitan ekonomi, karena interaksi sosial budaya dibangun di atas nilai-nilai yang lebih "dalam" ketimbang dengan interaksi lainnya yang umumnya hanya mengacu kepada kepentingan yang bersifat sekunder. Walaupun demikian, sejak beberapa dekade terakhir, terlihat adanya pembalikan kecenderungan. Pertimbangan sosial budaya menjadi sering dilupakan ketimbang pertimbangan yang bersifat praktis keseharian, seperti pertimbangan ekonomi. Pada beberapa dekade yang lalu, keterkaitan kekerabatan masih merupakan salah satu pilar dari hubungan desa-kota, selain keterkaitan ekonomi. Dalam hal ini, sejumlah besar penduduk kota di Sulsel, khususnya Makassar memiliki keluarga yang berdiam di desa, sehingga rutinitas kunjungan bernuansa kekerabatan banyak mewarnai hubungan desa-kota. Pada saat sekarang, hubungan ini telah mencair, interaksi hubungan desa-kota lebih banyak terjadi karena pertimbangan ekonomi. Sekarang, penduduk desa yang datang bersekolah ke Makassar atau kota lainnya, lebih cenderung untuk menyewa rumah atau kamar ketimbang tinggal di rumah kerabatnya. Ini adalah contoh dari gejala terdesaknya hubungan kekerabatan oleh pertimbangan yang bersifat *business like*.

Pembalikan kecenderungan ini sangat mungkin disebabkan oleh pengaruh modernisasi yang membawa nilai-nilai yang sangat bernuansa materialisme. Dapat pula diduga bahwa pembalikan itu dipicu, sedikit banyaknya, oleh pendekatan pemba-

ngunan semasa Orde Baru yang lebih mengedepankan pembangunan fisik (ekonomi) ketimbang pembangunan non fisik.

Pada skala yang lebih besar, terdapat keterkaitan yang berbasis sosial budaya dan kekerabatan antara Sulawesi Selatan dengan daerah lain di Indonesia atau bahkan di negara ASEAN. Jika dirunut kebelakang, keterkaitan dimaksud antara lain terjalin dengan beberapa negara bagian di Malaysia dan Singapura. Hubungan itu tercipta oleh adanya perpindahan penduduk Sulawesi Selatan yang mencari peluang kehidupan yang lebih baik. Di samping pertimbangan ekonomi itu, pemicu lainnya adalah budaya sebagian masyarakat Sulsel yang lebih memilih meninggalkan kampung halamannya jika merasa tidak sependapat dengan pemerintah atau raja yang berkuasa. Komunitas Makassar di Thailand yang terbentuk pada era pasca perjanjian Bungaya merupakan wujud dari motivasi berpindah itu. Beberapa versi menyebutkan alasan yang sama untuk terbentuknya komunitas Bugis di Malaysia dan Singapura, serta di Sumatera dan Kalimantan jauh sebelum kemerdekaan Indonesia.

Kebiasaan berpindah itu menyebabkan banyak turunan etnis Sulsel yang berdi- am di luar Sulawesi Selatan. Beberapa sumber memperkirakan jumlahnya sama de- ngan jumlah penduduk Sulsel sekarang. Sampai beberapa dekade terakhir, kecen- derungan yang sama, tetapi lebih bermotif ekonomi, masih terjadi. Misalnya, petani Kakao di Sulawesi Tenggara, para pekebun skala kecil di Kalimantan Timur; sebe- lumnya, komunitas Bugis Makassar di Papua (termasuk pedagang dan petambak), serta komunitas pedagang di Timor Timur, khususnya di kota Dili. Yang menarik adalah bahwa hubungan kekerabatan itu tidak berkembang menjadi hubungan eko- nomi, malah cenderung semakin meredup. Intensitas hubungan antara Sulsel dengan masyarakat asal Sulsel di Riau dan di kawasan pesisir timur pulau Sumatera misal- nya, menjadi semakin pudar dari waktu ke waktu, jangankan dapat dipupuk menjadi hubungan ekonomi. Yang masih bertahan, karena masih berumur relatif pendek, adalah petani Kakao di Sultra yang tetap menjaga hubungan ekonomi dengan daerah asalnya, yaitu dengan mengirimkan hasil kebunnya ke Sulsel. Tetapi hal ini terutama disebabkan oleh alasan ekonomi, yaitu karena infra struktur Kakao di Sultra belum berkembang baik sehingga mengirimkannya ke Sulsel lebih menguntungkan secara ekonomi.

Akar dari kecenderungan itu diduga oleh nilai budaya masyarakat Bugis Ma- kassar yang melakukan perantauan untuk mencari tempat menetap yang memberikan peluang untuk kehidupan yang lebih nyaman, secara ekonomi maupun pertim- bangan non ekonomi, bukan sebagai perantau temporer yang hanya untuk mengum- pulkan kekayaan yang akan dibawa kembali ke kampung halaman. Model remitansi pun, seperti yang terjadi pada beberapa suku bangsa di Indonesia, tidak terjadi secara signifikan. Dengan kata lain, keberhasilan masyarakat Sulawesi Selatan di dae- rah-daerah perantauan, di dalam negeri maupun diluar negeri, belum memberikan kontribusi yang berarti bagi pembangunan Sulsel. Hal ini banyak ditentukan oleh

budaya Bugis-Makassar yang cenderung terikat kepada tanah tempat hidupnya dan seakan-akan "melupakan" kampung asalnya. Tentu saja kekecualian harus diberikan kepada etnik Toraja yang terus berupaya memelihara hubungannya dengan sanak keluarga dan kerabatnya yang ada di Tator.

Sejak beberapa tahun terakhir, ada upaya untuk memanfaatkan potensi hubungan kekerabatan yang cukup besar itu sebagai acuan untuk mengembangkan keterkaitan ekonomi. Upaya ini diwujudkan dalam bentuk pembentukan kelompok Saudagar Bugis-Makassar. Walaupun telah berumur relatif panjang, kelompok ini belum sepenuhnya mampu mewujudkan sasaran pembentukannya.

Keterkaitan antarbudaya se Nusantara juga tidak menonjol, itu sangat mungkin disebabkan oleh karena kebijakan pemerintah di masa lalu yang dimotivasi oleh kondisi keterpurukan ekonomi yang parah sehingga lebih mengedepankan upaya-upaya pembangunan yang diarahkan pada pertumbuhan ekonomi ketimbang pertimbangan budaya. Di samping itu, pendekatan stabilitas (sebagai salah satu trilogi pembangunan) sangat tidak kondusif terhadap perkembangan budaya. Secara tersirat, pendekatan ini melihat perbedaan sebagai biang percekocokan dan perseteruan atau bahkan konflik antaretnik. Oleh karena itu, pluralitas sebaiknya tidak dikedepankan dalam pembangunan Indonesia.

Senyatanya, upaya-upaya untuk membangun kembali keterkaitan berbasis budaya perlu digalakkan pada tataran nasional, karena, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, keterkaitan budaya memiliki dasar yang kokoh dibandingkan dengan jenis keterkaitan lainnya, sehingga peningkatan kualitas keterkaitan itu secara langsung akan lebih meningkatkan kualitas Ketahanan Nasional. Bertitik tolak dari premis itu, beberapa lembaga antarpropinsi atau pada tataran regional perlu ditata ulang dengan memberikan penguatan pada aspek pertimbangan budaya. BKPRS misalnya, akan menjadi lebih kokoh jika diberi dimensi budaya, demikian pula halnya dengan BIMP-EAGA. Secara lebih khusus, konsorsium perguruan tinggi se Kawasan Timur Indonesia perlu mengedepankan kerjasama yang berbasis dan berorientasi budaya. Dalam hal ini, konsorsium dimaksud bukan hanya bertujuan untuk memajukan kualitas pendidikan tinggi di KTI, tetapi juga diarahkan untuk menggali dan melakukan reaktualisasi dan revitalisasi terhadap nilai-nilai budaya bahari yang selanjutnya disumbangkan untuk memerkaya budaya Nusantara.

2.4 Identitas Wilayah

Pada dasarnya identitas merupakan modal spiritual (modal utama) dari suatu tatanan. Modal lainnya adalah modal sosial (interkoneksi) dan modal fisik (antara lain berupa ketersediaan sumberdaya alam dan lingkungan yang sehat).

Identitas tatanan setidaknya terdiri atas 3 (tiga) komponen, yaitu misi yang merupakan alasan keberadaan (*raison d'etre*), visi yang merupakan gambaran keberhasilan atau cita-cita bersama yang menjadi perekat dari semua tatanan internal, serta seperang-

kat nilai yang dijadikan acuan oleh semua tatanan internal dalam beraktivitas sehari-hari. Nilai dimaksud merupakan nilai-nilai budaya tatanan (komunitas). Dalam hal ini, identitas merupakan acuan dalam *self-reference* yang menjadi syarat harus dalam proses adaptasi-kreatif. Tanpa identitas yang jelas dan mantap, suatu tatanan akan sirna dalam menghadapi dinamika lingkungan globalnya.

Pendekatan pembangunan berbasis identitas sebenarnya sejak awal reformasi mulai diterapkan di Sulsel. Garis-garis Besar Haluan Daerah (GBHD) Sulsel dan Propeda Sulsel dirumuskan dengan menggunakan pendekatan ini.

Nilai-nilai dimaksud ditemukenali pada berbagai literatur (*lontaraq-pappaseng-pasanga*), yang dikemas sedemikian rupa untuk mendukung 7 (tujuh) watak dasar dari masyarakat Sulawesi Selatan, yaitu:

1. **Kemandirian** berbasis pada nilai kerja keras yang berbasis pada makna *resopa temmangingi namalomo naletei pammase dewata; resopa temmangingi namangngamaseang batarayaya*; yakni pembangunan yang hanya dapat berhasil melalui kerja keras yang diridhoi oleh Tuhan yang maha kuasa. Sebagai semangat kerja, tekad untuk pantang mundur sebelum berhasil dalam falsafah *kualleangngangi tallangi natowaliya; takkalai nisombalang dotai ruppu dai natuwali*.
2. **Kemitraan dan kebersamaan** yang berbasis pada falsafah *sipakatui sipakalabbiri; siron-do-rondo; sitaiyyang apiangang tassitaiyyang addaiyyang; abbulo sipappa-allemo sibatutallang sipahua manyu siparampe* dengan makna menjalin kerjasama dan kebersamaan berdasarkan penghargaan kepada sesama manusia atau kelompok manusia. Saling mengingatkan kepada kebaikan dan saling mencegah pada kejahatan.
3. **Keterbukaan/akuntabilitas** dapat ditemukan dalam falsafah *lempu; getteng; ada tonngeng; temmapassilaingeng; tappa; barani; sukarana/aluk; mballa asi-asinna jiong mangapaqna tana*; membawa makna kehidupan kemasyarakatan dan penegakan hukum secara jujur, tegas, adil terpercaya, berani karena benar, tunduk pada hukum, transparan dan bertanggungjawab.
4. **Kesadaran kosmologis**, berbasis pada falsafah *parrampunganta; malilu sipakainge mali siparappe sipatuo sipatokkong; siama amasei* yang mengandung makna mempersatukan atau memosisikan secara integral antara alam, manusia dan sang pencipta. Harus saling melindungi, menyadarkan, tolong menolong satu dengan lainnya bahkan saling mendukung untuk kebaikan bersama. Oleh karena itu harus terjadi interkoneksi harmonis agar tetap terlindungi oleh sang pencipta. Falsafah ini sekaligus memberikan makna tanggungjawab terhadap kelestarian lingkungan, baik lingkungan alam mau pun lingkungan sosial.
5. **Kebhinekaan** yakni menghargai keberagaman untuk kebersamaan dalam bingkai kesetiakawanan sosial dalam masyarakat sebagai kekayaan budaya yang menjamin terselenggaranya pembangunan yang berkesinambungan. Basis falsafah ini dapat ditarik dari makna *siri na pacce; pesse; siama masei; sianaccapamei* yakni memiliki rasa kesetiakawanan sosial.

6. **Demokratis** dapat dicermati melalui *angngaru-mangngaru*, sumpah kesetiaan dan kontak sosial antara pemerintah dan masyarakat. *Assamaturuseng; passamaturukang; abbulo sibatang; ademi ripopuang; luka taro arung-telluka taro ade-luka taro ade-telluka taro anang; tengkona tang diturung-ajokkana tang dilendokang*; Persatuan dan kesatuan dengan makna kebersamaan dalam kemufakatan sebagai kiat untuk mempertemukan berbagai aspirasi masyarakat menjadi basis harmoni kehidupan berbangsa dan bernegara. Adat lebih menentukan dari penguasa, bahkan rakyat lebih menentukan dari adat. Kekuasaan di tangan rakyat karena aturan *ade'* yang dipatuhi bukan karena kehendak sang penguasa.
7. **Profesionalisme**/kualitas manusia sebagai modal dasar untuk pengembangan tatanan modern dapat dipetik makna budaya lokal dari falsafah *sulapa eppa; sulapa appa; toddopuli temmalara; misa kada sipatuo; pantang kada dipomate; anre nakulle nigiling nijarrekkija tanirokkai*; yakni jika tekad memang sudah bulat tidak akan bisa diubah oleh siapapun. Nekad bertindak menurut kesepakatan, dalam pengertian seseorang akan memiliki tekad keras yang bulat karena dalam dirinya sudah memiliki kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang memadai sehingga bisa bertekad untuk mengemban amanah/tugas yang dibebankan kepadanya.

Masalahnya, pendekatan perencanaan pembangunan itu tidak dilaksanakan sepenuhnya. Ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya. *Pertama*, penyelenggaraan program pembangunan hampir tidak pernah mengacu kepada nilai-nilai dasar yang dicanumkan pada dokumen perencanaan tersebut, karena pembangunan lebih diartikan sebagai kegiatan fisik untuk mencapai sasaran-sasaran yang bersifat fisik pula, bukan pembangunan manusia (dalam arti sebenarnya) dan kelembagaannya yang lebih berdimensi budaya. Pendekatan pembangunan berbasis identitas sudah asing bagi para perencana, pembangunan lebih banyak dimengerti sebagai pembangunan fisik yang bebas nilai, setidaknya tidak perlu dikaitkan dengan budaya. *Kedua*, keterbatasan wawasan para perencana pada khususnya dan aparat pemerintah pada umumnya yang umumnya melihat pembangunan sebagai kegiatan fisik untuk mencapai tujuan yang berdimensi fisik pula. Laju perubahan dalam sistem perencanaan yang relatif sangat cepat (terutama dalam era reformasi) membuat aparat belum mampu menyesuaikan diri. Di samping itu, sistem perencanaan yang diketengahkan belum sepenuhnya bebas dari cacat (metodologis, hukum dan lainnya). *Ketiga*, budaya dan kearifan lokal telah terkikis habis, sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab 2.1, masyarakat Sulawesi Selatan telah melupakan budayanya. Kehidupan sehari-hari masyarakat Sulsel sudah tidak dibimbing oleh spirit budayanya. Identitas komunitas (termasuk identitas lembaga-lembaga kemasyarakatan tradisional pada dasarnya tidak kuat. Hal ini ditunjukkan oleh mudarnya identitas dimaksud sebagaimana diuraikan pada sub bab sebelumnya. *Keempat*, persepsi masyarakat dan kalangan aparat pemerintah yang belum sepenuhnya benar tentang fungsi dari identitas daerah. Itu terutama disebabkan oleh karena pola pengelolaan pemerintahan dan pembangunan yang berbasis identitas masih relatif baru.

BAB III

VISI & MISI PEMBANGUNAN PROPINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2008 - 2028

Sejatinya, pembangunan adalah proses budaya karena merupakan proses yang diarahkan untuk memperkuat dan memperkaya identitas suatu komunitas, yaitu berupa visi, misi (*raison d'etre*) dan nilai-nilai dasar (*core values*) yang dianut.

Misi pembangunan atau agenda pembangunan Sulawesi Selatan adalah penjabaran dari misi (*raison d'etre*) Sulawesi Selatan dengan memperhatikan kondisi dan masalah strategis yang sedang dan akan dihadapi. Pada dasarnya, agenda itu merupakan tugas yang harus diemban oleh pemerintah dan seluruh masyarakat Sulsel.

Visi Pembangunan Sulawesi Selatan merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu rencana (20 tahun) yang disusun dengan memperhatikan hasil analisis dinamika lingkungan strategis serta aspirasi seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah Sulawesi Selatan. Visi pembangunan berfungsi untuk mengarahkan aktivitas dari semua tatanan internal pada satu sasaran yang disepakati bersama.

Nilai adalah etika yang diacu dalam pelaksanaan pembangunan pada semua tahapan, terutama dalam perencanaan dan lebih utama lagi dalam pelaksanaan rencana. Nilai inilah yang membedakan proses pembangunan Sulsel dengan propinsi dan daerah lainnya di Indonesia. Mengingat bahwa nilai-nilai tersebut merupakan hakikat dari identitas, maka dengan terus mengacu kepada nilai itu, maka proses pembangunan Sulsel tidak akan membuat Sulsel kehilangan jatidirinya, malah sebaliknya, proses pembangunan itu akan lebih memperkuat identitas Sulawesi Selatan sebagai suatu komunitas yang solid.

Sebagai proses budaya, maka pembangunan dalam banyak hal dapat diterjemahkan sebagai peningkatan kualitas manusia bersama dengan kelebagaannya (budayanya) yang dalam arti sempit dapat diterjemahkan sebagai reinterpretasi, revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai dasar.

3.1 Visi Pembangunan

Visi Pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2028, adalah:

*Wilayah Terkemuka di Indonesia Melalui Pendekatan Kemandirian
Lokal yang Bernafaskan Keagamaan*

Visi Sulawesi Selatan ini mengandung pengertian yang luas dan menggambarkan aspirasi serta cita-cita masyarakat Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 20 tahun yang akan datang.

Wilayah terkemuka, menyiratkan asa untuk memosisikan Sulawesi Selatan di dalam kelompok wilayah di Indonesia yang *Mandiri, Maju, Adil dan Makmur* sesuai dengan indikator yang ditetapkan pada Visi Indonesia 2025 di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Indikator dimaksud diterjemahkan dan dijabarkan

secara spesifik sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat Sulawesi Selatan melalui pendekatan *Kemandirian Lokal*.

Sulawesi Selatan, dari perspektif pendekatan Kemandirian Lokal, merupakan suatu tatanan (*sistem organis-living system*) yang mewujud akibat adanya interkoneksi dinamis antartatanan internalnya. Tatanan internal itu setidaknya dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu yang berbasis wilayah yang mewujud dalam bentuk kabupaten dan atau kota, serta tatanan fungsional yang mewujud dalam bentuk kelembagaan masyarakat yang berfungsi untuk menangani satu atau beberapa aspek kehidupan sosial kemasyarakatan. Pada dasarnya, cakupan kegiatan kedua jenis tatanan itu tidak berbeda, yaitu berupa upaya-upaya menyediakan dan menciptakan berbagai pilihan (*choice*) guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam semua aspek kehidupan (sosial, ekonomi, politik dan budaya), serta pada semua strata kebutuhan, mulai dari kebutuhan dasar (*basic needs*), kebutuhan akan rasa aman, keterlibatan dan hubungan sosial, harga diri (*ego*), sampai kepada kebutuhan untuk aktualisasi diri; serta meningkatkan kemampuan memilih, termasuk menyalurkan aspirasi (*voice*), masyarakat terhadap pilihan-pilihan yang tersedia itu.

Pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dicantumkan bahwa kemandirian merupakan hakikat kemerdekaan, yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi diri bangsanya. Oleh karena itu, pembangunan, sebagai usaha untuk mengisi kemerdekaan, haruslah pula merupakan upaya membangun kemandirian. Dikaitkan dengan pengertian bahwa propinsi merupakan perwujudan dari interkoneksi dari sejumlah tatanan internal sebagaimana disebutkan sebelumnya, maka mudah dimengerti bahwa pembangunan pada tataran propinsi semestinya difokuskan pada upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas kemandirian tatanan internal.

Kemandirian dimaksud merupakan kemampuan untuk melaksanakan dua fungsi utama tatanan, yaitu menyediakan *choice* dan meningkatkan *voice* dari masyarakat, melalui pemanfaatan sumberdaya lokal dan sumberdaya yang diperoleh atau tercipta akibat interkoneksi dengan tatanan lain (*emerging resources*) dengan mengandalkan pemanfaatan pengetahuan dan kearifan lokal sehingga mampu menghasilkan produk yang spesifik atau bahkan memiliki keunggulan lokal.

Kemandirian bukanlah keterisolasian, justru sebaliknya. Hakikat dari kemandirian adalah membangun interkoneksi walaupun setiap keputusan senantiasa mengacu kepada identitas diri (*self-reference*). Interkoneksi antartatanan mewujud dalam bentuk saling ketergantungan dalam kehidupan bermasyarakat pada berbagai tataran, mulai dari individu, kelompok, dan bahkan bangsa. Hanya tatanan yang mampu memelihara interkoneksi dengan lingkungannya yang mampu mempertahankan keberlangsungan keberadaannya. Ini adalah wujud hukum kedua Termodinamika dan juga telah mewujud sebagai keniscayaan dalam kehidupan kemasyarakatan sehari-hari. Dengan demikian, hakikat dari kemandirian adalah kemampuan untuk senantiasa mengacu ke-

pada diri sendiri, kepada identitas diri. Dengan kondisi seperti itu, suatu tatanan dapat terus mengembangkan diri antara lain dengan memanfaatkan hasil interkoneksi dengan lingkungannya, tanpa pernah kehilangan identitasnya.

Di samping itu, kemandirian merupakan prasyarat bagi terjadinya proses *adaptasi-kreatif*, proses yang diperlukan untuk menjaga atau bahkan meningkatkan kualitas keberadaan suatu tatanan. Proses dimaksud pada satu sisi akan memperkaya identitas tatanan berdasarkan masukan yang diterimanya dari lingkungannya, sedangkan pada sisi lain memberikan masukan balik kepada lingkungannya untuk melakukan perubahan yang setara. Dengan demikian, adaptasi-kreatif merupakan evolusi bersama suatu tatanan dan lingkungannya menuju kondisi yang lebih baik, yaitu kondisi di mana interkoneksi antar keduanya tetap dipelihara atau bahkan ditingkatkan. Dalam arti praktis, upaya peningkatan kemandirian tatanan internal di Sulawesi Selatan secara tidak langsung akan meningkatkan kualitas keberadaan Sulawesi Selatan. Yang disebutkan terakhir pada gilirannya akan ikut pula memberikan kontribusi terhadap keberhasilan pembangunan nasional yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas Ketahanan Nasional.

Uraian di atas sekaligus menunjukkan bahwa kemandirian merupakan cerminan sikap seseorang atau sebuah tatanan mengenai dirinya dan semangatnya dalam menyikapi dinamika lingkungannya. Kemandirian adalah perwujudan sikap spiritual atau kesadaran akan makna (atau modal spiritual) kehidupan bagi seseorang yang dalam banyak kasus menjadi hakikat (*core*) dari seseorang atau suatu tatanan yang tercerahkan. Karena terkait dengan sikap, maka kemandirian pada dasarnya merupakan masalah budaya dalam arti seluas-luasnya. Kemandirian tergantung kepada kualitas manusia dan kualitas kelembagaan masyarakat (yang pada dasarnya merupakan hasil interkoneksi antara manusia dengan sumberdaya lokal). Oleh karena itu, pembangunan kemandirian semestinya difokuskan kepada peningkatan kualitas manusia dan kualitas kelembagaan masyarakat. Tepatnya, difokuskan kepada proses aktualisasi diri, bukan hanya pada pemenuhan kebutuhan fisik seperti yang selama ini banyak diadopsi dalam praktek pembangunan a la modernisasi.

Kemajuan adalah konsekuensi logis dari keberhasilan membangun kemandirian. Dengan kata lain, kemajuan merupakan indikator kualitas kemandirian yang telah dicapai. Olehnya, kemajuan pertama-tama harus diukur dari ketersediaan dan kualitas pilihan-pilihan yang tersedia pada berbagai aspek kehidupan yang diiringi dengan meningkatnya kemampuan untuk memilih dan menyalurkan aspirasi dari seluruh anggota masyarakat tanpa kecuali.

Kemandirian tatanan internal, baik yang berbasis wilayah maupun yang bersifat fungsional, menghadirkan keberagaman pilihan pada berbagai bidang. Di bidang ekonomi misalnya, kemandirian itu antara lain berupa meningkatnya kemampuan pemanfaatan sumberdaya alam secara arif (kearifan lokal) yang bermuara pada keberhasilan memasarkan produk dan jasa yang memiliki keunggulan lokal serta meningkatnya secara

berkesinambungan pendapatan dan distribusinya. Keberagaman dan akses yang proporsional terhadap pilihan-pilihan di bidang politik menumbuhkembangkan demokrasi atau partisipasi politik masyarakat. Demikian pula halnya untuk bidang-bidang kehidupan lainnya.

Indikator kemajuan yang kedua adalah tumbuhkembangnya komunitas masyarakat pada berbagai tataran, dari desa sampai propinsi. Dalam hal ini, komunitas merupakan satu entitas berbasis wilayah yang memiliki kelembagaan masyarakat yang unik dalam arti mampu menjembati masyarakat dengan sumberdaya lokal, sehingga dapat menghasilkan produk dan jasa yang unik atau memiliki keunggulan lokal. Di samping itu, kelembagaan masyarakat yang tercipta mampu mewartakan kepentingan yang berbeda dari setiap anggota atau kelompok masyarakat sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kepentingan komunitas. Ini adalah bentuk modal sosial (*social capital*) yang menjadi penyangga utama berkembangnya secara berkesinambing suatu komunitas.

Kemajuan merupakan pula ukuran dari kualitas partisipasi (individu dan atau tatanan internal) dalam menciptakan *choice*. Itulah bentuk dari aktualisasi diri. Semakin tinggi kualitas partisipasi anggotanya akan semakin maju pula suatu tatanan.

Pada tataran propinsi, kemajuan diukur dari meningkatnya kualitas interkoneksi antartatanan internal yang merajut Sulawesi Selatan sebagai suatu komunitas pembelajar (*evolutionary learning community*), yaitu suatu komunitas terbuka yang memiliki kemampuan swatata (*self-organizing*) yang tinggi sehingga senantiasa mampu beradaptasi-kreatif terhadap dinamika lingkungan global dan pergeseran aspirasi dari tatanan internalnya serta sekaligus memberikan kontribusi terhadap perkembangan lingkungannya (dalam hal ini propinsi lain di Indonesia dan Indonesia secara keseluruhan).

Kemajuan dari perspektif Kemandirian Lokal bukan hanya mencakup meningkatnya indikator yang bersifat pemenuhan kebutuhan fisik dan ekonomi, tetapi lebih dititik beratkan kepada pencapaian indikator-indikator yang mencerminkan terpelihara dan berkembangnya budaya lokal dalam proses pembangunan. Dengan kata lain, pembangunan justru diarahkan untuk memelihara dan mengaktualisasi pengetahuan dan kearifan lokal yang dimiliki suatu tatanan. Konsekuensinya, indikator kemajuan perlu secara eksplisit merefleksikan keberagaman.

Indikator kemajuan yang tidak kalah pentingnya--malah yang terpenting--adalah meningkatnya kualitas manusia Sulawesi Selatan. Kualitas dimaksud dicerminkan oleh keseimbangan antara kesejahteraan fisik, berupa kesehatan, makanan, pakaian, hunian yang layak, serta bebas dari penderitaan fisik dan serangan terhadap tubuh; kesejahteraan mental, berupa kapasitas kognitif untuk memersepsi, membayangkan, bernalar, mempertimbangkan dan memutuskan; hubungan personal yang mendalam yang memungkinkan seseorang memiliki kepekaan terhadap tujuan dan penghormatan kepada diri sendiri; dan kesempatan-kesempatan untuk mengungkapkan identitas diri.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kemajuan merupakan wujud keberhasilan dari proses aktualisasi diri, baik pada tingkat individu maupun pada tingkat tatanan internal.

Keadilan, adalah ukuran dari meningkatnya kualitas kemajuan, yaitu semakin terbukanya akses bagi seluruh tatanan internal dan segenap anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam arti ikut serta dalam proses penciptaan pilihan-pilihan serta menikmatinya, termasuk--ini sebenarnya yang lebih penting--meningkatkan kemampuan memilih dan menyalurkan aspirasi (*voice*) di dalam semua aspek kehidupan.

Dalam praktik kehidupan sehari-hari, keadilan sering diinterpretasikan sebagai kondisi di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf kehidupannya; memperoleh pekerjaan; mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan; mengemukakan pendapat; melaksanakan hak politik; mengamankan dan mempertahankan negara; serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum. Singkatnya, keadilan berarti tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antarindividu, gender, maupun wilayah.

Kondisi seperti dimaksud, dalam banyak kasus diupayakan melalui kebijakan pemerintah yang memerlukan dukungan dana yang tidak sedikit yang umumnya sulit dipenuhi sepenuhnya oleh pemerintah. Sebenarnya, keadilan yang hakiki dapat tercipta dengan sendirinya jika setiap individu dan setiap tatanan internal dapat memiliki tingkat kemandirian yang memadai. Tepatnya, keadilan merupakan konsekuensi logis dari kemandirian. Keadilan sulit diciptakan apalagi dipaksakan. Keadilan hanya akan mewujudkan secara alamiah jika didukung oleh keberadaan tatanan internal yang mandiri. Sebaliknya juga benar, bahwa tingkat perkembangan atau kualitas kemandirian yang berbeda akan memicu terjadinya kesenjangan (baik pada tataran internal maupun pada tataran individu).

Dengan demikian, keadilan perlu diposisikan sebagai acuan utama dalam perumusan kebijakan publik dan strategi pembangunan (bukan pada pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi), karena, secara langsung maupun tidak langsung akan mendorong tingkat perkembangan sosial yang tinggi (yang dinilai berdasarkan ukuran-ukuran kualitas hidup seperti tingkat kematian dan tingkat harapan hidup, pendidikan dan kemelekhurufan, serta partisipasi politik. Pendekatan ini jelas berlawanan dengan pendekatan yang dianut selama ini oleh banyak pengambil keputusan (pemerintah) dan para perencanan yang percaya bahwa tingkat pertumbuhan sosial yang tinggi tidak akan dapat dicapai tanpa pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Simpulannya, keadilan merupakan ukuran atau kualitas partisipasi seseorang atau suatu tatanan internal, baik dalam menciptakan *choice* dan terutama dalam menyalurkan *voice*. Sekaligus merupakan perwujudan dari keberhasilan aktualisasi diri dari individu dan tatanan internal. Aktualisasi diri yang berhasil akan membuat seseorang atau suatu

tatanan dapat menciptakan kesempatan yang sama untuk meningkatkan taraf kehidupannya sendiri.

Kemakmuran secara umum diartikan sebagai meningkatnya kualitas keadilan. Dalam hal ini berarti semakin beragam dan berkualitasnya pilihan-pilihan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, lahir maupun batin, dan diiringi dengan semakin meningkatnya pula kemampuan untuk memilih secara mandiri pilihan-pilihan yang tersedia itu.

Dengan demikian, jelas bahwa kemakmuran tidak hanya berkaitan dengan terpenuhinya kebutuhan fisik ekonomi semata, tetapi lebih dititikberatkan kepada pemenuhan terhadap kebutuhan aktualisasi diri (kebutuhan paling tinggi), baik pada tataran tatanan terlebih lagi pada tataran individu.

Berlandaskan keagamaan menegaskan bahwa agama diposisikan sebagai acuan utama dalam proses pembangunan, khususnya dalam proses aktualisasi nilai-nilai budaya Sulawesi Selatan dalam rangka proses adaptasi-kreatif terhadap dinamika lingkungan strategis serta pergeseran aspirasi dari tatanan internal Sulawesi Selatan. Sekaligus untuk menjamin bahwa proses pembangunan senantiasa mengacu dan dinafasi oleh tatanan keagamaan yang membentuk perilaku manusia religius dengan nilai-nilai spiritual yang merupakan ciri dasar dan tetap melekat pada kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan pada masa kini dan terutama di masa depan. Tegasnya, keagamaan dicantumkan secara eksplisit untuk mengingatkan kepada kita semua agar proses pembangunan tidak terjebak ke dalam perangkap materialisme-positivisme yang mewujud dalam budaya hedonisme.

Salah satu konsekuensi logis dari faktor ini adalah pengukuran keberhasilan pembangunan manusia tidak hanya mengacu kepada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) murni, tetapi dikombinasikan dengan indikator lainnya yang mencerminkan akhlak dan moral seseorang (termasuk dimensi spiritualitas dan aktualisasi diri).

3.2 Misi Pembangunan

Sejatinya, misi (*raison d'etre*) Sulawesi Selatan merupakan penjabaran dari misi pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagaimana tercantum pada Pembukaan UUD 1945, yaitu:

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dengan demikian, misi Sulawesi Selatan adalah sebagai media bagi segenap tatanan internal yang berbasis wilayah (komunitas) maupun yang berbasis fungsional (organisasi kemasyarakatan) untuk mengaktualisasikan diri dan, sebagai bagian dari Indone-

sia, Sulsel seyogianya pula ikut berperan sebagai perekat kesatuan dan memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas ketahanan nasional.

Keberhasilan Sulawesi Selatan dalam melaksanakan misinya menentukan keberlangsungan keberadaannya. Dengan kata lain, kapasitas swatata (*self-organizing capacity*) Sulawesi Selatan sangat tergantung kepada kualitas keberhasilan Sulsel dalam melaksanakan misinya itu.

Oleh karena itu, agenda atau misi pembangunan Sulawesi Selatan semestinya ditekankan kepada upaya-upaya strategis untuk meningkatkan kapasitas swatata dimaksud, yaitu setidaknya mencakup: (i) peningkatan kualitas manusia, (ii) peningkatan kemandirian tatanan internal yang bermuara pada meningkatnya keragaman internal Sulawesi Selatan; (iii) peningkatan kualitas interkoneksi, fisik dan terutama non-fisik, baik pada tataran internal Sulawesi Selatan maupun dengan wilayah lain di luar Sulawesi Selatan; dan (iv) penguatan dan pengayaan identitas Sulawesi Selatan sebagai suatu komunitas yang utuh.

Perlu digarisbawahi bahwa peningkatan kualitas manusia perlu diposisikan sebagai esensi pembangunan. Peningkatan kualitas manusia dilakukan demi untuk kehidupan dan kemanusiaan yang lebih beradab (berkesadaran), bukan untuk mencapai tujuan lainnya. Walaupun, kualitas manusia yang lebih baik akan memberikan dampak positif bagi meningkatnya mobilitas manusia pada semua bidang serta merupakan modal utama untuk membangun komunitas dan kelembagaan masyarakat yang tangguh dan mandiri sehingga mampu berpartisipasi untuk mewujudkan dan mempertahankan keberadaan Sulawesi Selatan sebagai suatu komunitas.

Di samping itu, partisipasi merupakan kata kunci dari kapasitas swatata. Olehnya, diperlukan adanya satu agenda khusus untuk mendorong peningkatan kualitas partisipasi dimaksud, yang dirumuskan dalam bentuk agenda pembangunan yang secara khusus didedikasikan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan atraktif bagi tumbuhkembangnya kelembagaan masyarakat. Asumsinya, hanya dengan lembaga masyarakat yang kuat dan mandiri, kualitas partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat ditingkatkan.

Dengan demikian agenda (misi) pembangunan Sulawesi Selatan tahun 2008-2028 dapat dirumuskan dalam format sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan kualitas manusia Sulsel** dalam arti memiliki tingkat kualitas hidup yang memadai serta memiliki jatidiri dan wawasan yang luas sehingga selain mampu mengaktualisasikan dirinya secara mandiri juga mampu bersikap dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota dari tatanan pada berbagai strata. Sebagai anggota komunitas lokal, setiap manusia dewasa semestinya mampu berpartisipasi membantu komunitasnya melaksanakan fungsi spesifiknya; sebagai warga negara senantiasa berupaya mengisi dan meningkatkan kualitas Ketahanan Nasional yang berbasis pada falsafah Pancasila; sebagai warga dunia bertugas menjaga keles-

tarian planet bumi serta perdamaian dunia yang berdasarkan kepada pluralisme dan keadilan; dan sebagai makhluk menyadari bahwa ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan suatu keniscayaan.

2. **Mewujudkan Sulsel sebagai komunitas pembelajar** (*evolutionary learning community*) yang memiliki kemampuan adaptasi-kreatif yang prima karena memiliki identitas yang kuat dan didukung oleh keberadaan tatanan internal berupa lembaga-lembaga masyarakat yang tangguh dan mandiri di semua bidang kehidupan dan daerah kabupaten / kota yang telah mewujudkan sebagai komunitas mandiri yang memiliki keunggulan lokal. Tatanan internal dimaksud, pada satu sisi memiliki kemampuan untuk menghasilkan berbagai alternatif untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat (*choice*) dalam semua aspek kehidupan, sedangkan pada sisi lain juga mampu meningkatkan kemampuan memilih dan menyalurkan aspirasi (*voice*) dari seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali.
3. **Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai wilayah yang kondusif dan atraktif** bagi terselenggaranya aktivitas sosial ekonomi, politik dan budaya serta peluang bagi setiap individu dan setiap tatanan internal untuk melakukan aktualisasi diri; melalui penataan kelembagaan pemerintah agar menjadi lebih bersih, tangguh dan berwibawa; pengembangan media dan kebebasan media dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat; pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil; dan membantu memantapkan dan meningkatkan profesionalisme Polri agar mampu melindungi dan mengayomi masyarakat, mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas.
4. **Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai satu kesatuan sosial-ekonomi yang berkeadilan, asri dan lestari** melalui penataan ruang yang mengedepankan pertimbangan kepentingan sosial ekonomi, kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam perspektif masa kini dan masa depan, pemanfaatan teknologi, serta pemerataan pembangunan yang berkeadilan yang diwujudkan dalam bentuk keberpihakan kepada kelompok, kelas dan komunitas masyarakat yang relatif masih lemah. Penataan struktur tata ruang diarahkan untuk meningkatkan kualitas keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan. Sedangkan alokasi pemanfaatan ruang difokuskan kepada upaya-upaya untuk menumbuhkan kawasan pengembangan ekonomi yang memiliki keunggulan lokal sehingga membuka peluang bagi terciptanya lapangan kerja baru yang menjamin distribusi pendapatan yang proporsional / berkeadilan.
5. **Meningkatkan kualitas peran Sulawesi Selatan dalam memelihara Ketahanan Nasional Nasional dan mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju dan kuat** melalui peningkatan kualitas keterkaitan dan pelayanan sosial ekonomi antarwilayah dan antarkawasan di Indonesia, serta keterpaduan sosial budaya melalui reinterpretasi, revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai budaya bahari sebagai upaya untuk membangun dan memperkuat identitas ke-Indonesia-an.

3.3 Nilai–Nilai

Senyatanya, nilai merupakan modal spiritual karena merupakan alasan filosofis atau bahkan metafisis yang membuat sekelompok orang menyepakatinya sebagai acuan bersama untuk menerima sesuatu sebagai baik, benar dan atau indah. Dalam implementasinya, nilai merupakan pula spirit dari modal sosial (*social capital*), karena berbasis pada nilailah seperangkat interkoneksi antarmanusia dan antartatanan terbangun. Nilailah yang memberi warna dan makna kepada wujud interkoneksi yang diterima sebagai realitas bersama. Tepatnya, nilai adalah modal spiritual dari tatanan.

Walaupun merupakan acuan, nilai tidak bersifat statis, tetapi dapat terus diperkaya dengan memanfaatkan hasil interkoneksi dengan lingkungannya. Proses pengayaan yang terjadi senantiasa mengacu kepada diri sendiri (*self-reference*), sehingga akan bermuara pada penemuan diri (identitas diri) yang lebih sejati.

Setidaknya ada 3 (tiga) pendekatan dalam memandang masa depan suatu komunitas. *Pertama*, "membuat kue yang lebih besar", melalui pemanfaatan dan pengembangan iptek sehingga mampu menciptakan komoditas dan jasa yang dibutuhkan dalam jumlah yang lebih banyak dan kalau mungkin lebih berkualitas. *Kedua*, "sendok yang lebih sedikit", yaitu memperlambat atau bahkan mengurangi pertumbuhan penduduk. *Ketiga*, "perilaku yang lebih baik", yaitu memperbaiki aturan main interkoneksi antarmanusia dan antar manusia dengan alam, atau bahkan dalam bentuk perubahan wawasan dan paradigma.

Dalam pembangunan jangka panjang Sulawesi Selatan, ketiga pendekatan itu tidak saling dipertentangkan. Dengan kata lain, ketiganya diadopsi secara simultan, walaupun perhatian lebih difokuskan kepada pendekatan yang ketiga.

Nilai-nilai yang semestinya dibangun dan sekaligus diacu dalam proses pembangunan jangka panjang Sulawesi Selatan adalah yang berbasis pada *Kesadaran Kosmologis*. Pertimbangannya adalah karena pada satu sisi kesadaran kosmologis merupakan cara yang lebih sesuai untuk memahami semesta, sedangkan pada sisi lain sangat sejalan dengan spirit dari nilai-nilai tradisional Sulawesi Selatan dan ajaran agama.

Kesadaran kosmologis adalah suatu bentuk pemahaman dan pemaknaan yang memposisikan semesta sebagai satu tatanan (sistem organis) yaitu satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang pada hakikatnya merupakan perwujudan dari interkoneksi yang sangat dinamis. Kesadaran ini memicu berkembangnya etika hidup berkelanjutan yang berintikan prinsip rasa hormat terhadap komunitas kehidupan, termasuk kepada bentuk budaya lain, serta kekaguman dan kecintaan kepada sang Pencipta. Kesadaran ini mewujudkan dalam bentuk pendekatan pembangunan yang tidak bernuansa antroposentris, yaitu semata-mata terpusat pada kepentingan manusia secara sempit tanpa memperhatikan eksistensi makhluk lain di alam semesta. Implementasi pendekatan ini berupa konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang menekankan bahwa pembangunan semestinya tidak hanya mencakup upaya-upaya untuk mening-

katkan kesejahteraan fisik / material saja, tetapi memiliki dimensi yang lebih luas. Pembangunan yang berkelanjutan hanya dapat dilaksanakan jika kualitas manusia dijadikan arah sekaligus titik tumpu pembangunan, di samping mengupayakan agar proses pembangunan senantiasa berwawasan lingkungan, dalam arti tetap mempertahankan kualitas dan fungsi lingkungan hidup (kesadaran ekologis).

Kesadaran kosmologis ditopang oleh 2 (dua) pilar utama. *Pertama*, adalah *partisipasi* yang meyakini bahwa keberlangsungan semesta hanya dapat dijaga dan dipelihara oleh keikutsertaan dan kontribusi dari semua pihak. Malah, realitas bersama tidak lebih dari perwujudan partisipasi. Pada tataran praktis, prinsip partisipasi diartikan bahwa keberlangsungan dan kualitas keberadaan Indonesia ditentukan oleh kualitas partisipasi seluruh wilayah propinsi, sedangkan untuk Sulawesi Selatan ditentukan oleh segenap tatanan internalnya.

Falsafah atau nilai tradisional yang sejalan dengan prinsip ini antara lain *sipakatui sipakalabbiri; sirondo-rondo; sitaiyyang apiangang tassitaiyyang addaiyyang; abbulo sipappa-allemo sibatu-tallang sipahua manyu siparampe* yang bermakna perlunya menjalin kerjasama dan kebersamaan berdasarkan penghargaan kepada sesama manusia atau kelompok manusia, serta saling mengingatkan kepada kebaikan dan saling mencegah pada kejahatan. Yang disebutkan terakhir merupakan pula bagian dari ajaran agama.

Kedua, adalah *pluralisme* yang memahami keberagaman sebagai potensi bukan sebagai ancaman. Kualitas partisipasi justru sangat tergantung kepada tingkat dan kualitas keberagaman. Senyatanya, pluralisme merupakan paham yang telah lama dikenal dan diyakini oleh hampir semua etnik di Indonesia dan dilestarikan dalam wujud *Bhinneka Tunggal Ika*.

Pluralisme menghargai keberagaman untuk kebersamaan dalam bingkai kesetiakawanan sosial dalam masyarakat sebagai kekayaan budaya yang menjamin terselenggaranya pembangunan yang berkesinambungan. Seperti halnya dengan partisipasi, prinsip ini juga dikenal secara tradisional, misalnya dari *siri na pacce; pesse; siamamasei; siannaccapamei* yang pada dasarnya berarti memiliki rasa kesetiakawanan sosial.

Konsekuensi logis dari kesadaran ini adalah terjadinya pergeseran dari *budaya dominasi dan kompetisi* ke *budaya kerjasama dan kemitraan*. Senyatanya, pergeseran ini hanyalah merupakan pengukuhan kembali *budaya partisipatif*--antara lain mewujud dalam bentuk *gotong-royong*--yang memang merupakan tradisi lama yang terlupakan oleh pengaruh modernisasi.

Prinsip dan nilai lain yang dilahirkan sekaligus dibutuhkan untuk membangun kesadaran kosmologis adalah :

1. **Keterbukaan/akuntabilitas** dapat ditemukan dalam falsafah *lempu; getteng; ada tongeng; temmapassilaineng; tappa; barani; sukaran/aluk; mballa asi-asinna jiong mangapaqna tana*; membawa makna kehidupan kemasyarakatan dan penegakan hukum secara ju-

jur, tegas, adil terpercaya, berani karena benar, tunduk pada hukum, transparan dan bertanggungjawab.

2. **Demokratis** dapat dicermati melalui *angngaru-mangngaru*, sumpah kesetiaan dan kontrak sosial antara pemerintah dan masyarakat. *Assamaturuseng; passamaturukang; abbulo sibatang; ademi ripopuang; luka taro arung-telluka taro ade-luka taro ade-telluka taro anang; tengkona tang diturung-ajokkana tang dilendokang*; Persatuan dan kesatuan dengan makna kebersamaan dalam kemufakatan sebagai kiat untuk mempertemukan berbagai aspirasi masyarakat menjadi basis harmoni kehidupan berbangsa dan bernegara. Adat lebih menentukan dari penguasa, bahkan rakyat lebih menentukan dari adat. Kekuasaan di tangan rakyat karena aturan *ade'* yang dipatuhi bukan karena kehendak sang penguasa.
3. **Profesionalisme dan Kemandirian**, ini adalah hakikat dari nilai-nilai lokal Sulsel yang merupakan perwujudan dari budaya bahari. Berbasis pada nilai kerja keras yang berbasis pada makna *resopa temmangingi namalomo naletei pammase dewata; resopa temmangingi namangngamaseang bataraya*; yakni pembangunan yang hanya dapat berhasil melalui kerja keras yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebagai semangat kerja, tekad untuk pantang mundur sebelum berhasil dalam falsafah *kualleangngangi tallangi natowaliya; takkalai nisombalang dotai ruppu dai natuwali*.
4. **Kualitas Manusia**, nilai-nilai yang berkaitan dengan kualitas manusia sebagai modal dasar untuk pengembangan tatanan modern dapat dipetik dari *sulapa eppa; sulapa appa; toddopuli temmalara; misa kada sipatuo; pantang kada dipomate; anre nakulle nigiling nijarrekkija tanirokkai*; yakni jika tekad memang sudah bulat tidak akan bisa diubah oleh siapapun. Nekad bertindak menurut kesepakatan, dalam pengertian seseorang akan memiliki tekad keras yang bulat karena dalam dirinya sudah memiliki kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang memadai sehingga bisa bertekad untuk mengemban amanah/tugas yang dibebankan kepadanya. Di samping itu, diperlukan pula nilai-nilai untuk memosisikan sains dan teknologi. Dalam hal ini, sains semata-mata merupakan media untuk memperoleh kehidupan manusia dan masyarakat yang lebih baik, dan teknologi sebagai media untuk meningkatkan kualitas hidup.

BAB IV

ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS

PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG PROPINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2008 - 2028

Tujuan pembangunan jangka panjang Sulawesi Selatan tahun 2008-2028 adalah mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai wilayah terkemuka di Indonesia dilihat dari sisi kemajuan, kemandirian, keadilan dan kemakmuran. Tujuan ini perlu diwujudkan agar dapat digunakan sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka pembangunan daerah dalam kurun waktu 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian 5 (lima) sasaran pokok, sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan kualitas manusia Sulawesi Selatan** yang ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Memiliki kualitas hidup yang tinggi, antara lain tercermin pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di atas rata-rata nasional;
 - b. Memiliki karakter yang tangguh, berakhlak mulia dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila, serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - c. Memiliki wawasan yang luas yang berbasis pada identitas diri yang prima yang bersumber pada budaya lokal / bahari dan keagamaan.
 - d. Memiliki kesadaran akan tanggung jawabnya terhadap pengembangan diri dan tatanannya (nasionalisme yang tinggi), serta memahami dan menghargai keberagaman.
 - e. Memiliki kemampuan adaptif-kreatif sehingga senantiasa mampu mengaktualisasikan diri secara mandiri.

- 2. Terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai komunitas pembelajar** yang memiliki kapasitas swatata (*self-organizing capacity*) yang tinggi sehingga senantiasa sanggup beradaptasi-kreatif terhadap dinamika lingkungan demi untuk menjaga atau bahkan meningkatkan kualitas keberadaannya sehingga mampu menyelenggarakan misinya secara lebih baik, yang ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menguatnya nilai-nilai budaya lokal yang berbasis pada nilai-nilai budaya bahari dan keagamaan yang teraktualisasi dengan nilai-nilai yang dibawa oleh spirit zaman.
 - b. Tumbuhkembangnya kelembagaan masyarakat yang tangguh dan mandiri pada seluruh aspek kehidupan yang mampu mendukung terselenggaranya pembangunan berbasis komunitas (*Community-Based Development*); menyediakan dan menciptakan pilihan-pilihan (*choice*) kepada masyarakat; mendorong dan meningkatkan kemampuan untuk memilih dan menyalurkan aspirasi (*voice*) dari anggota masyarakat pada segenap lapis-

an; dan secara aktif mendorong terwujudnya daerah kabupaten dan kota sebagai komunitas yang maju dan mandiri.

- c. Mewujudnya daerah kabupaten dan kota sebagai komunitas yang berbasis pada keunggulan lokal yang spesifik.

3. Terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai wilayah yang kondusif dan atraktif yang ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Terciptanya lingkungan kondusif bagi terselenggaranya aktivitas sosial ekonomi, politik dan budaya serta peluang bagi setiap individu dan setiap tatanan internal untuk melakukan aktualisasi diri akibat adanya tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang menjamin kepastian hukum, keamanan dan ketenteraman, serta akses yang proporsional terhadap kegiatan dan pelayanan ekonomi, sosial, dan budaya bagi segenap lapisan masyarakat tanpa kecuali
- b. Meningkatnya daya tarik Sulsel sebagai daerah tujuan investasi, pariwisata, pelayanan regional dan kota-kota di Sulsel telah mampu berkembang sebagai kota hunian / tempat tinggal (*dormitory town*) yang nyaman.

4. Terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai satu kesatuan sosial-ekonomi yang berkeadilan, asri dan lestari yang ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2028 berada di atas rata-rata nasional dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen.
- b. Meningkatnya sinergi antardaerah yang dilakukan melalui penataan ruang wilayah yang mengedepankan pertimbangan kelestarian lingkungan hidup; pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, keunggulan lokal, serta pemanfaatan teknologi.
- c. Tumbuh dan berkembang daerah kabupaten dan kota serta berbagai kawasan pengembangan dengan bertumpu kepada keunggulan lokal yang dimiliki yang mampu menyediakan berbagai fasilitas pelayanan sosial, ekonomi dan budaya kepada segenap kelompok dan lapisan masyarakat secara proporsional.
- d. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

5. Meningkatkan kualitas peran Sulawesi Selatan dalam memelihara Ketahanan Nasional dan mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju dan kuat yang ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Berkembangnya beberapa kota di Sulawesi Selatan sebagai simpul (*main hubs*) transportasi nasional maupun regional serta sebagai pusat pelayanan sosial-ekonomi dan sosial-budaya lainnya yang bertaraf nasional dan internasional.
- b. Berkembangnya industri dan jasa yang memiliki keterkaitan ke depan (*forward linkage*) dan keterkaitan kebelakang (*backward linkage*) yang besar dengan industri yang ada di wilayah lain di Indonesia.

- c. Meningkatnya peran Sulawesi Selatan dalam upaya pemanfaatan secara berkelanjutan Selat Makassar sebagai sumber daya ekonomi yang besar (perikanan, minyak bumi, dan lalu lintas pelayaran internasional) untuk memberikan kontribusi bagi terbangunnya ekonomi kelautan secara terpadu.
- d. Meningkatnya kualitas peran Sulawesi Selatan dalam pengembangan budaya nasional melalui reaktualisasi budaya bahari.

4.1 Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2008-2028

A. Meningkatkan Kualitas Manusia Sulawesi Selatan

Sasaran utama dari agenda ini adalah terbentuknya manusia Sulawesi Selatan yang memiliki kualitas hidup yang tinggi yang dicerminkan antara lain oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di atas rata-rata nasional, serta memiliki karakter yang merupakan pencerminan nilai-nilai budaya bahari dan keagamaan serta wawasan yang luas, baik sebagai warga masyarakat lokal, warganegara dan warga dunia, maupun sebagai makhluk (warga semesta). Dengan kualitas seperti itu, manusia Sulawesi Selatan senantiasa mampu mengaktualisasikan dirinya secara mandiri.

Manusia yang berkualitas merupakan syarat harus bagi terwujudnya masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis yang pada gilirannya akan menjadi media yang kondusif bagi setiap orang untuk melakukan aktualisasi diri. Dengan demikian pembangunan manusia akan bermuara pada pemantapan jati diri dan karakter bangsa serta sistem sosial yang berakar, unik, modern, dan unggul. Jati diri tersebut merupakan kombinasi antara nilai luhur bangsa, seperti religius, kebersamaan dan persatuan, serta nilai-nilai modern yang bersifat universal yang mencakup etos kerja, pluralisme dan lainnya.

Hakikat pembangunan manusia terletak pada tersedianya pelayanan kesehatan yang memadai serta reformasi sistem pendidikan agar tidak hanya mengedepankan upaya-upaya berupa alih pengetahuan (*knowledge transfer*) tetapi juga mengutamakan pembinaan dan pengembangan watak dan karakter yang dilakukan sejak dini dan berkelanjutan (meliputi semua jenjang pendidikan).

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan serangkaian upaya sistematis berkesinambungan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk membantu seseorang mengenali dan mengembangkan potensi yang dimilikinya, untuk pembentukan karakter pribadi dan pengayaan identitas diri, serta untuk memperluas wawasan agar senantiasa mampu mengaktualisasikan diri dan beradaptasi-kreatif ditengah pergaulan masyarakat pada berbagai tataran (lokal, nasional dan bahkan global). Oleh karena itu, ketersediaan fasilitas pelayanan pendidikan merupakan hak

dasar semua penduduk, demi untuk memberikan peluang kepada mereka untuk menggali dan mengembangkan potensi spesifik yang dimilikinya.

Arah pembangunan pendidikan dijabarkan dalam bentuk:

- a. Reformasi sistem pendidikan pada semua jenjang untuk mengedepankan proses pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan dasar-dasar manusia profesional yang memiliki sikap mental (watak) dan moral yang berbasis pada nilai-nilai budaya lokal yang telah teraktualisasi, wawasan yang luas, di samping kemampuan penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kompetensi yang disesuaikan dengan jenjang dan jenis pendidikan; melalui penggalan dan pengembangan potensi manusia, khususnya *kapasitas belajar*, guna mewujudkan proses belajar sepanjang hidup (*life-long education*).
- b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan untuk menjamin terselenggaranya proses belajar mengajar yang efektif, efisien dan inovatif yang dilakukan melalui peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan guru dan dosen, perbaikan manajemen sekolah dan proses pembelajaran (termasuk pemanfaatan teknologi informasi), penyempurnaan kurikulum secara berkesinambungan agar senantiasa terkait (relevansi pendidikan) dengan spirit zaman, mendorong motivasi siswa untuk berprestasi setinggi mungkin, dan mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi terhadap lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta, serta memberikan prioritas pada pengembangan sekolah unggulan/percontohan dan sekolah kejuruan yang berorientasi pada penyiapan tenaga profesional dan tenaga terampil sesuai kebutuhan pasar kerja serta melakukan sistem pemagangan pada berbagai bidang usaha.
- c. Menetapkan standar pelayanan minimal di bidang pendidikan yang ditingkatkan secara periodik. Pembebasan biaya pendidikan dikaitkan dengan standar tersebut.
- d. Memperluas kesempatan memperoleh pendidikan pada semua jenjang pendidikan melalui peningkatan pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun, peningkatan daya tampung dan produktivitas sekolah, dan penyediaan bea siswa bagi kalangan masyarakat miskin.
- e. Meningkatkan motivasi masyarakat untuk mengikuti pendidikan formal pada jenjang setinggi mungkin dan mengikuti proses pembelajaran seumur hidup.
- f. Mengingat perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin laju yang mengakibatkan kompetensi semakin cepat menjadi usang, serta pergeseran tatanan perekonomian menuju perekonomian berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*) maka perguruan tinggi dan lembaga-lembaga pelatihan, termasuk yang dikelola masyarakat, perlu didukung agar mampu menyelenggarakan

pembelajaran 3-D (3-Dimensi: *life-long*, *life wide* dan *life depth*) yang berkualitas yang dibutuhkan oleh tenaga kerja untuk memelihara atau bahkan meningkatkan kompetensinya, termasuk untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan bagi penduduk usia produktif yang jumlahnya semakin besar.

- g. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang, antara lain dengan mengembangkan skema bantuan pembiayaan yang diprioritaskan kepada lembaga-lembaga pendidikan yang membuktikan diri sebagai lembaga yang berkualitas. Semangat untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan pada semua jenjang pendidikan perlu terus dipelihara tanpa tentunya melupakan perhatian kepada lembaga-lembaga yang belum sepenuhnya berkembang.
- h. Meningkatkan peran keluarga dalam proses pendidikan, khususnya pada usia dini, terutama dikaitkan dengan upaya pembentukan karakter pribadi. Untuk maksud tersebut, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan setiap keluarga agar dapat melakoni peran tersebut secara optimal.
- i. Mengupayakan realisasi alokasi pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBD sesuai atau lebih cepat dari penjadwalan nasional, yang difokuskan pemanfaatan untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan standar pelayanan minimal.
- j. Membangun *e-learning* yang menjangkau semua lembaga pendidikan (termasuk pendidikan dasar dan menengah) guna menjamin pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan. Untuk maksud tersebut, pengembangan konten (*content*) dari *e-learning* perlu didorong dan difasilitasi.

2. Kesehatan

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud.

Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamakan dan manfaat, dengan memberikan perhatian khusus kepada penduduk rentan--antara lain ibu, bayi, anak, manusia usia lanjut (manula), dan keluarga miskin--untuk menjamin dan meningkatkan akses mereka terhadap pelayanan kesehatan yang memadai.

Arah pembangunan kesehatan dijabarkan dalam bentuk:

- a. Pembangunan daerah harus berwawasan kesehatan, yaitu setiap kebijakan publik selalu memperhatikan dampaknya terhadap kesehatan. Program Ketahanan (kedaulatan) pangan diarahkan pada tercapainya kondisi kecukupan gizi yang merupakan salah satu syarat harus pencapaian derajat kesehatan

yang tinggi. Demikian pula halnya dengan pembangunan ekonomi, khususnya upaya pemerataan pendapatan, dilakukan dengan sasaran untuk meningkatkan akses masyarakat, khususnya kalangan berpendapatan rendah, terhadap pelayanan kesehatan yang tersedia.

- b. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan, perbaikan lingkungan hidup, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan. Upaya-upaya itu dilaksanakan secara simultan dengan semangat kemitraan dan kerjasama lintas sektor serta dengan memerhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan iptek, dan globalisasi.
- c. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, meliputi puskesmas dan rumah sakit, tenaga kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan lainnya, dilaksanakan oleh pemerintah, dengan tetap membuka peluang kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi, sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan pada setiap tahapan pembangunan. Standar dimaksud diupayakan untuk ditingkatkan pada setiap tahapan pembangunan agar memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang juga akan semakin meningkat.
- d. Aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan ditingkatkan melalui pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal pada setiap satuan permukiman, dan pemberian kemudahan pembiayaan berupa subsidi bagi kalangan berpendapatan kecil, dengan prioritas pada meningkatnya kualitas kesehatan bagi anak balita dan ibu hamil.
- e. Memfasilitasi dan mendorong perbaikan sanitasi lingkungan, perumahan sehat dan ketersediaan air bersih serta perilaku sehat dengan menerapkan pendekatan paradigma sehat yang dilaksanakan melalui usaha yang bersifat promotif dan preventif serta melalui peningkatan dan pengembangan kelembagaan sosial.
- f. Memotivasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan dan lingkungan hidup agar bersedia berpartisipasi dalam upaya-upaya peningkatan derajat kesehatan, seperti pemeliharaan kesehatan lingkungan, perbaikan fasilitas pelayanan kesehatan, pemberantasan penyakit menular, dan lainnya.
- g. Mengembangkan kemandirian masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan termasuk jaminan pemeliharaan kesehatan dengan menggalang peran serta masyarakat, antara lain melalui penyelenggaraan program asuransi kese-

hatan yang didukung oleh pemerintah dan sumber-sumber pembiayaannya sehingga terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.

- h. Mendorong dan memfasilitasi upaya-upaya masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan kesehatan, khususnya penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas, yang dibutuhkan oleh kelompok masyarakat tertentu.
- i. Meningkatkan kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran, memperkecil angka kematian dan peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana.
- j. Meningkatkan pemberantasan terhadap perdagangan ilegal dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang dengan melibatkan masyarakat dan menerapkan semaksimal mungkin sanksi hukum yang berlaku.
- k. Pembangunan dan perbaikan gizi dilaksanakan secara lintas sektor yang meliputi produksi pangan, pengolahan, distribusi, hingga konsumsi pangan tingkat rumah tangga dengan kandungan gizi yang cukup, seimbang, serta terjamin keamanannya dalam rangka mencapai status gizi yang baik.
- l. Pengembangan sistem informasi kesehatan untuk meningkatkan efektifitas sistem pelayanan kesehatan pada tingkat propinsi yang sedapat mungkin menjangkau semua fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk puskesmas pada semua satuan permukiman.

3. Pemuda dan Olahraga

Pembangunan pemuda dititikberatkan pada pembangunan karakter dan wawasan kebangsaan (*nation building*) serta etika bangsa, serta untuk meningkatkan kualitas partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan. Sedangkan, pembangunan olahraga diarahkan pada peningkatan budaya olahraga--seperti watak jujur, dan kerjasama--serta untuk pencapaian prestasi olahraga setinggi mungkin di tingkat nasional atau bahkan internasional .

Arah pembangunan pemuda dan olahraga dijabarkan dalam bentuk:

- a. Pembinaan pemuda di titik beratkan pada pembinaan mental dan spiritual, menanamkan budaya belajar, dan semangat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan profesionalisme dan keterampilan serta memiliki semangat kepeloporan dan etos kerja yang tinggi agar mampu berpartisipasi di masa depan yang semakin kompleks.
- b. Diarahkan untuk pembinaan watak (mengedepankan prestasi sportivisme, kerjasama, memupuk etos kerja, dan lainnya), di samping untuk kesehatan jasmani.
- c. Meningkatkan pembibitan, pembinaan dan minat olahraga yang dilakukan secara sistematis dan terpadu melalui lembaga-lembaga pendidikan yang dikoordinasikan oleh induk organisasi masing-masing, termasuk organisasi

olahraga penyandang cacat yang dilakukan dengan peran serta masyarakat demi tercapainya sasaran peningkatan prestasi baik pada tingkat nasional maupun internasional.

- d. Meningkatkan kesadaran dan melindungi segenap generasi muda dari budaya destruktif terutama bahaya narkoba melalui berbagai gerakan pencegahan, pembinaan dan rehabilitasi.

4. Agama

Pembangunan agama diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam kehidupan kemasyarakatan serta sebagai acuan utama dalam proses pengayaan identitas diri. Di samping itu, pembangunan kehidupan keagamaan diarahkan pada pembinaan dan peningkatan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamatan nilai dan ajaran agama untuk meningkatkan derajat keimanan dan ketaqwaan pada setiap individu, serta menciptakan suasana yang kondusif--antara lain berupa meningkatnya rasa saling percaya dan harmonisasi antarkelompok masyarakat--bagi terbinanya toleransi, kerukunan, kebersamaan, keakraban dan kekeluargaan dalam kehidupan umat beragama.

Arah pembangunan agama dijabarkan dalam bentuk:

- a. Menumbuhkan budaya dialogis antar pemimpin, tokoh dan organisasi keagamaan sebagai bagian dari penghayatan ajaran universal semua agama, sehingga tercipta suasana harmonis, keterbukaan yang berasal dari semangat toleransi yang tumbuh secara alamiah yang akhirnya bermuara pada hilangnya rasa kecurigaan antarumat beragama dan pemerintah serta berkembangnya toleransi antarumat beragama.
- b. Menjadikan nilai-nilai agama sebagai acuan utama dalam proses pengayaan identitas diri dan identitas ke-Sulsel-an yang dilakukan dengan memosisikan nilai-nilai agama sebagai pijakan dan sendi dalam setiap pengambilan keputusan di semua kegiatan pembangunan dan di dalam semua bidang kehidupan kemasyarakatan
- c. Membangun ketahanan rumah tangga dan masyarakat guna mencegah perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama dan dampak negatif globalisasi.
- d. Meningkatkan kualitas pendidikan agama melalui penyempurnaan proses belajar-mengajar, khususnya penyempurnaan kurikulum yang mengakomodasi muatan lokal sehingga sistem pendidikan nasional dapat lebih terpadu dengan dinamika kehidupan masyarakat lokal.
- e. Meningkatkan fungsi dan peran lembaga keagamaan dan tokoh agama dalam rangka pembinaan kehidupan masyarakat.

- f. Meningkatkan pelayanan dan pemberian kemudahan secara proporsional kepada semua kalangan umat beragama dalam melaksanakan ibadahnya menurut caranya masing-masing.

B. Terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai Komunitas Pembelajar

Sasaran utama agenda ini adalah mewujudkan tatanan kehidupan berbasis masyarakat (masyarakat madani) yang ditopang oleh kehadiran lembaga-lembaga kemasyarakatan yang tangguh dan mandiri dalam menyelenggarakan misinya--berupa penciptaan berbagai pilihan (*choice*) untuk ditawarkan kepada masyarakat serta meningkatkan kemampuan memilih dan menyalurkan aspirasi (*voice*) masyarakat--dengan senantiasa mengacu pada seperangkat nilai yang spesifik. Senyatanya, setiap lembaga akan berupaya, secara langsung maupun tidak langsung, untuk mengawamkan nilai-nilainya kepada masyarakat sebagai bagian integral dari *choice* yang ditawarkannya.

Nilai yang dianut oleh lembaga-lembaga dimaksud idealnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar (*core values*) dari budaya tradisional Sulawesi Selatan, walaupun tidak tertutup kemungkinan merupakan hasil cuplikan dari budaya lain. Kondisi seperti ini jelas akan menghasilkan keragaman yang tinggi yang pada gilirannya akan memicu dinamika masyarakat.

Jika keragaman mencapai tingkat tertentu, maka dinamika masyarakat akan memasuki tahana di ambang chaos (*the edge of chaos*), keadaan dimana proses kreatif dapat terjadi. Proses kreatif dimaksud berupa proses interaksi berbagai nilai tadi yang jika terkendali dengan baik akan mewujudkan sebagai proses reinterpretasi, revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai budaya tradisional yang secara umum dapat dilihat sebagai proses pengayaan budaya yang pada gilirannya akan semakin memperkokoh identitas masyarakat Sulsel (identitas ke-Sulsel-an).

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, identitas yang kuat disertai dengan keragaman internal yang tinggi akan mewujudkan Sulawesi Selatan menjadi suatu komunitas pembelajar yang akan terus berevolusi demi untuk meningkatkan kualitas keberadaannya (*evolutionary learning community*).

Perlu digarisbawahi bahwa dinamika dimaksud dapat saja terjebak ke dalam kondisi chaos yang sebenarnya yang mewujudkan dalam bentuk tatanan masyarakat atau *formasi sosial yang predatorik* yang kecenderungannya mulai mengemuka saat ini. Oleh karena itu, diperlukan kearifan dari semua pihak untuk mengendalikan diri, khususnya peran dari pemerintah pada kondisi di mana lembaga-lembaga masyarakat belum mencapai kondisi matang sehingga mampu mengendalikan diri.

1. Sosial Budaya

Nilai-nilai sosial budaya masyarakat dan kearifan lokal (*indigenous knowledge*) perlu terus dipelihara dan dikembangkan karena merupakan acuan bagi pengem-

bangun tatanan sosial kemasyarakatan secara umum. Pengembangan itu diupayakan melalui reinterpretasi, revitalisasi dan reaktualisasi secara berkesinambungan nilai-nilai dimaksud terhadap dinamika perkembangan global (spirit zaman), sehingga menghasilkan nilai-nilai yang rasional tetapi tetap memiliki spirit kearifan lokal. Dengan demikian, kelembagaan masyarakat Sulawesi Selatan memiliki akar dan latar belakang budaya yang kuat, sehingga tidak akan pernah merasa asing terhadap dirinya sendiri.

Oleh karena itu, upaya reinterpretasi, revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai budaya tradisional perlu diberi prioritas tinggi pada setiap tahapan pembangunan, karena hasil reaktualisasi itu dibutuhkan pada proses pendidikan (untuk pembentukan karakter generasi muda) dan untuk menjadi acuan dalam proses pengembangan kelembagaan masyarakat di bidang sosial-ekonomi dan sosial-politik.

Upaya pengembangan kelembagaan masyarakat di bidang sosial budaya diarahkan agar mampu:

- a. Membangun dan memelihara kesadaran akan budaya kepada segenap lapisan masyarakat serta membuka peluang kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mengembangkan nilai-nilai budaya yang dianggap terbaik yang akan bermuara pada terbentuknya identitas Sulawesi Selatan (identitas ke-Sulsel-an).
- b. Menggali dan mengembangkan nilai-nilai dan kearifan budaya Sulawesi Selatan secara berkesinambungan, melalui upaya reinterpretasi, revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai budaya tradisional, agar terkondisikan ketahanan budaya yang senantiasa serasi dan sepadan (kompatibel) dengan spirit zaman (*zeitgeist*).
- c. Menawarkan dan mengawamkan kepada masyarakat nilai-nilai dimaksud--antara lain melalui kesenian, jalur pendidikan, formal maupun non formal, serta kegiatan sosial budaya lainnya--sehingga selanjutnya dapat dijadikan acuan dalam perumusan model kelembagaan masyarakat pada semua aspek kehidupan (sosial, ekonomi, politik dan lainnya).
- d. Secara proaktif mengkaji nilai-nilai baru yang dibawa oleh pergaulan global, khususnya yang telah mengemuka sebagai aspirasi dari beberapa kelompok masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menyepadankan dengan nilai-nilai tradisional demi untuk mengembangkan dan memperkaya nilai-nilai dasar masyarakat Sulawesi Selatan.
- e. Secara aktif mengintegrasikan nilai-nilai budaya Sulawesi Selatan sebagai masukan (kontribusi) bagi tumbuhkembangnya jatidiri bangsa.
- f. Mewadahi kepentingan komunitas yang beragam, setidaknya pada aras desa atau bahkan pada aras yang lebih tinggi, sehingga tercipta satuan komunitas--kelembagaan masyarakat berbasis komunitas (*community-based oriented*)--yang

mampu berkembang secara mandiri dan mampu memperjuangkan kepentingannya pada berbagai aspek kehidupan dengan senantiasa mengedepankan kepentingan komunitas sebagai perekat persatuan dan dengan senantiasa mengacu kepada nilai-nilai dan kearifan lokal (*indigenous knowledge*).

- g. Mengembangkan kebebasan berkreasi dalam berkesenian untuk mencapai sasaran sebagai pemberi inspirasi bagi kepekaan rasa terhadap totalitas kehidupan dengan tetap mengacu pada etika, moral, estetika dan agama, serta menjamin adanya perlindungan dan penghargaan terhadap hak cipta dan royalti bagi pelaku seni dan budaya.
- h. Mengintegrasikan kesadaran kritis dan pengorganisasian komunitas yang berbasis pada keunikan lokal ke dalam desain program/kegiatan pembangunan fisik dan ekonomi demi berlangsungnya reinterpretasi, revitalisasi dan reaktualisasi nilai, norma, pengetahuan dan organisasi lokal/asli dibalik implementasi pembangunan fisik dan ekonomi.
- i. Memosisikan perguruan tinggi dan lembaga adat tradisional sebagai ujung tombak upaya-upaya penggalian, pengembangan dan pengawaman nilai-nilai budaya Sulawesi Selatan.
- j. Menyadarkan masyarakat terhadap beberapa isu strategis, seperti keberagaman sebagai kekayaan budaya, pengendalian pertumbuhan penduduk, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkesinambungan, serta pemanfaatan ilmu dan teknologi, agar solusi terhadap isu-isu tersebut menjadi bagian dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat yang pada gilirannya akan bermuara pada meningkatnya kualitas partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

2. Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan

Kelembagaan masyarakat di bidang sosial-ekonomi diharapkan menjadi landasan bagi tumbuhkembangnya tatanan perekonomian Sulawesi Selatan yang pada satu sisi memiliki watak adaptif, dalam arti mampu secara kreatif menyesuaikan diri terhadap dinamika perekonomian global, sedangkan pada sisi lain mampu memberi peluang bagi segenap pelaku ekonomi secara proporsional yang saling terkait secara fungsional, sehingga membentuk kekuatan ekonomi wilayah yang sinergis dan mampu menjaga kesetimbangan dinamis yang proporsional antara kepentingan untuk menjaga kesempatan kerja dan lapangan usaha yang memadai bagi kelompok-kelompok masyarakat marginal dan kepentingan untuk mendorong pengembangan lembaga-lembaga ekonomi *modern* yang padat modal, padat energi dan padat teknologi yang diharapkan dapat menjadi penjamin pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Di samping itu, merupakan pula media yang kondusif bagi tumbuhkembangnya pelaku ekonomi yang kreatif-inovatif yang merupakan pemicu pergeseran basis perekonomian Sulsel dari hanya mengandalkan ke-

tersediaan sumberdaya alam lokal menjadi perekonomian yang mengandalkan interkoneksi dengan daerah lain di Indonesia atau bahkan dengan negara lain, yang pada gilirannya akan bermuara pada terwujudnya tatanan perekonomian yang berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*).

Format kelembagaan seperti itu diharapkan mencegah timbulnya *tatanan ekonomi yang predatorik*, serta mendorong terwujudnya kesejahteraan sosial yang semakin adil dan merata serta menumbuhkan kesetiakawanan sosial yang pada ujungnya akan semakin meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, maka pengembangan kelembagaan masyarakat di bidang sosial ekonomi dan kesejahteraan perlu difasilitasi dan diarahkan melalui rangkaian kebijakan sebagai berikut:

- a. Membuka peluang kepada semua kelompok masyarakat tanpa kecuali untuk mengembangkan pendekatan dan model kelembagaan sosial-ekonomi yang berbasis pada etika lingkungan dan pola pengelolaan sumberdaya alam yang berkesinambungan; mengedepankan sinergi antar pelaku ekonomi sehingga mencegah sedini mungkin berkembangnya tatanan ekonomi yang predatorik; serta memiliki kemampuan adaptasi terhadap dinamika perekonomian global. Setidaknya, terdapat 2 (dua) alternatif bagi pengembangan model dimaksud. *Pertama*, adalah mengadopsi model kelembagaan yang memiliki reputasi baik di daerah atau bahkan di negara lain, seperti misalnya model perbankan syariah atau pendekatan *social-entrepreneurship* yang antara lain mewujud dalam bentuk lembaga keuangan a la *Grameen Bank* di Bangladesh. *Kedua*, menggali dan melakukan reaktualisasi dan revitalisasi terhadap model-model kelembagaan tradisional, misalnya model kelembagaan *Ponggawa-Sawi*.
- b. Meningkatkan akses yang proporsional bagi setiap pelaku ekonomi kepada sumber daya modal dan sumber daya alam serta peningkatan kesempatan dan kemampuan untuk mengelola usaha ekonomi produktif yang mendatangkan kemakmuran dan mengatasi kemiskinan, serta menghilangkan seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme pasar melalui regulasi, kemudahan pelayanan, subsidi, dan insentif yang dilakukan secara transparan dengan tetap mengedepankan kepentingan pelaku ekonomi mikro, kecil dan menengah.
- c. Mendorong pengembangan kelembagaan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, mendorong dan memfasilitasi agar petani dapat ikut terlibat dalam kegiatan *off-farming*, serta menanamkan kembali semangat koperasi di segenap lapisan masyarakat melalui penggalakan *Gerakan Koperasi* yang mengacu pada nilai-nilai dan kearifan budaya lokal sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan dan basis kerjasama antar kelompok usaha mikro, kecil dan menengah. Jaringan kerjasama dimaksud diharapkan akan mampu berperan sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, man-

diri dan profesional dan menjadi bagian integral dari keseluruhan kegiatan ekonomi, yang dikelola secara profesional dan menguntungkan sehingga mampu menciptakan lapangan kerja dan pendapatan yang layak, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas kesejahteraan dan pemerataan antar-wilayah dan antargolongan.

- d. Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) diupayakan antara lain melalui peningkatan kompetensi kewirausahaan, produktivitas, kemampuan adaptasi terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat, yang dilakukan secara terintegrasi dengan upaya modernisasi agribisnis dan agroindustri. Skim kebijakan itu, tentunya termasuk kebijakan dukungan pembiayaan, dilakukan sedemikian rupa agar kelompok usaha dimaksud bersama-sama dengan Koperasi dapat berperan sebagai pemain utama dalam mendukung program ketahanan pangan dan pengembangan Kawasan Andalan. Di samping itu, diperlukan penanganan khusus bagi kelompok usaha mikro dan kecil, agar mereka dapat menikmati sepenuhnya fasilitas yang tersedia, tidak hanya terserap oleh kelompok usaha menengah.
- e. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan kelembagaan ekonomi modern, seperti jasa keuangan (perbankan, lembaga pembiayaan, asuransi dan lainnya), jasa transportasi dan akomodasi serta jasa pendidikan dan pelatihan, untuk mendukung kegiatan pelaku ekonomi / pengusaha besar dan investor, dengan tetap membuka peluang bagi pelaku usaha ekonomi mikro, kecil dan menengah (UMKM).
- f. Mengoptimalkan upaya pemberdayaan dan pengembangan interkoneksi antarlembaga sosial-ekonomi yang ada dimasyarakat, di dalam maupun di luar wilayah Sulawesi Selatan, agar tercipta kerjasama berdasarkan keunggulan spesifik yang dimiliki masing-masing yang merupakan pemicu tumbuh-kembangnya industri dan jasa yang berbasis interkoneksi dimaksud di Sulawesi Selatan.
- g. Mendorong dan memfasilitasi berkembangnya kelembagaan masyarakat yang mendukung dan kondusif bagi maraknya upaya-upaya kreatif-inovatif di bidang teknologi, proses dan manajemen industrial yang diperlukan untuk mempercepat laju pertumbuhan perekonomian daerah dan pergeseran struktur perekonomian menuju perekonomian berbasis pengetahuan
- h. Mendorong dan memfasilitasi perguruan tinggi, sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki modal berupa khazanah pengetahuan yang relatif lengkap, untuk melibatkan diri sebagai pionir dalam pengembangan tatanan perekonomian berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*)
- i. Memberi perhatian khusus bagi pengembangan kelembagaan ekonomi yang berkaitan dengan pemanfaat sumberdaya pesisir dan kelautan, agar sumber-

daya dimaksud dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin dan secara bertahap memosisikannya sebagai basis utama pembangunan daerah, sekaligus untuk mendukung program nasional pembangunan industri kelautan. Di samping itu, diperlukan adanya kebijakan khusus untuk memperkuat kelembagaan pertanian masyarakat sehingga mampu berartikulasi terhadap isu global yang berkaitan dengan kecenderungan kelangkaan bahan pangan akibat adanya tarik ulur (*trade off*) antara "pertanian untuk pangan" dengan "pertanian untuk energi (*bio-fuel*)".

- j. Memfasilitasi berkembangnya kelembagaan masyarakat yang mampu mengatasi masalah ketersediaan dan kepemilikan tanah, sehingga pemanfaatan dan pengelolaan tanah menjadi lebih efektif tanpa mengurangi hak-hak masyarakat atas tanah, sehingga kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan.

3. Sosial Politik

Pembangunan di bidang sosial politik diarahkan untuk mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum, yang ditandai oleh kelembagaan demokrasi yang semakin kokoh dan mantap, kuatnya peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan politik yang bermuara pada semakin mantapnya pelemagaan nilai-nilai demokrasi yang menitikberatkan pada prinsip-prinsip toleransi, non-diskriminasi, dan kemitraan dan terwujudnya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik, serta semakin tingginya kualitas desentralisasi dan otonomi daerah. Kondisi ini diharapkan akan mendorong tercapainya penguatan kepemimpinan dan kontribusi Sulawesi Selatan dalam berbagai kerja sama antar daerah, interdaerah dalam rangka mewujudkan tatanan nasional yang lebih adil dan damai dalam berbagai aspek kehidupan.

Untuk maksud tersebut maka pengembangan kelembagaan masyarakat di bidang sosial politik diarahkan agar mampu:

- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang politik yang dilakukan dengan menawarkan alternatif dan peluang seluas-luasnya kepada segenap lapisan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi atau bahkan ikut terlibat dalam proses perumusan kebijakan dan peraturan yang menyangkut hidup mereka.
- b. Membangun dan menjamin terselenggaranya kehidupan sosial politik (iklim dan budaya politik) yang demokratis yang berbasis pada penghormatan nilai-nilai HAM, prinsip persamaan, kesetaraan, kebebasan dan keterbukaan, toleransi dan anti kekerasan, dengan tetap mengedepankan nilai-nilai budaya seperti *musyawah untuk mufakat* serta nilai-nilai budaya lainnya yang relevan, yang dilakukan melalui pendidikan politik dan dengan mengembangkan komunikasi politik yang sehat.

- c. Membangun kemandirian masyarakat--sebagai syarat utama bagi mewujudnya masyarakat sipil yang kuat--dalam mengelola berbagai potensi konflik sosial yang dapat merusak serta memberdayakan berbagai potensi positif yang bermanfaat untuk pembangunan dengan terus memperhatikan berbagai pengaruh paham-paham dalam kehidupan sosial politik nasional agar tidak terjadi ekses-ekses negatif dan kesenjangan sosial yang merugikan kehidupan masyarakat.
- d. Menyempurnakan struktur politik yang dititikberatkan pada proses pelembagaan demokrasi dilakukan dengan menata hubungan antara kelembagaan politik; memantapkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah serta mencegah disintegrasi wilayah dan perpecahan bangsa; dan terus melakukan pelembagaan demokrasi secara berkesinambungan untuk mendukung berlangsungnya konsolidasi demokrasi secara berkelanjutan.
- e. Meningkatkan dan memantapkan pemahaman dan kesadaran segenap lapisan masyarakat mengenai wawasan kebangsaan dan jati diri bangsa sebagai acuan utama dalam mengelola kehidupan sosial politik yang akan bermuara pada semakin kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa serta utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Kelembagaan Berbasis Gender

Pembangunan daerah yang berbasis gender dimaksud untuk meningkatkan peran serta perempuan dan laki-laki dalam pembangunan berbangsa dan bernegara dalam semua tahapan pembangunan, mulai dari proses perencanaan sampai evaluasi. Implementasi pendekatan pembangunan ini diharapkan akan menjamin tidak terjadinya diskriminasi gender sehingga akan bermuara pada terwujudnya *kesetaraan dan keadilan berbasis gender*, sebagai salah satu wujud dari keadilan yang menjadi aspek utama dari visi pembangunan jangka panjang nasional (RPJP Nasional 2005-2025) yang sekaligus merupakan sasaran dari *Millenium Development Goals (MDGs)*.

Untuk kondisi Sulawesi Selatan, peningkatan kualitas peran serta perempuan di dalam proses pembangunan semestinya diposisikan sebagai kiat utama pembangunan. Di samping karena pertimbangan keadilan yang disebutkan sebelumnya, juga karena banyak masalah pembangunan, seperti kemiskinan dan kesulitan hidup, yang sangat dekat dengan perempuan, serta masalah-masalah lainnya, seperti tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak. Dengan kata lain, peningkatan kualitas peran serta perempuan diharapkan akan secara signifikan meningkatkan kualitas pembangunan daerah.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pembangunan kelembagaan masyarakat berbasis gender merupakan keniscayaan, karena hanya dengan kelembagaan se-

perti itu isu-isu yang berkaitan dengan kesenjangan gender dalam pembangunan dapat dipecahkan.

Untuk maksud tersebut maka pembangunan kelembagaan masyarakat berbasis gender diarahkan agar mampu:

- a. Menggali dan melakukan reinterpretasi, reaktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai budaya tradisional yang berkaitan dengan kesetaraan dan keadilan gender dan mengawamkannya kepada segenap lapisan masyarakat, melalui media pendidikan, formal maupun non formal, dialog antara pemerintah dan masyarakat serta antarkelompok masyarakat, dan upaya-upaya lainnya.
- b. Mewadahi upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas peranserta perempuan di dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang setidaknya mencakup 2 (dua) sisi. *Pertama*, berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup perempuan. *Kedua*, berkaitan dengan upaya-upaya untuk meningkatkan akses, manfaat, partisipasi dan kontrol perempuan dalam perumusan kebijakan publik dan program-program pembangunan propinsi dan daerah.
- c. Memberdayakan lembaga-lembaga pengelola kemajuan perempuan agar lebih berperan, berkualitas dan mandiri dalam melakoni perannya, yaitu secara umum menghasilkan pilihan-pilihan (*choice*) yang setara dan sepadan (kompatibel) dengan harkat dan martabat perempuan serta meningkatkan kemampuan memilih (*voice*) kalangan perempuan pada semua aspek kehidupan. Alternatif definisi dari harkat dan martabat perempuan jelas termasuk pula ke dalam daftar pilihan (*choice*) yang ditawarkan. Sedangkan secara khusus, memperkuat kelembagaan, koordinasi dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di segala bidang, termasuk pemenuhan komitmen-komitmen internasional, penyediaan data dan statistik gender, serta peningkatan partisipasi masyarakat.
- d. Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan untuk mencegah terjadinya diskriminasi dan tindakan pelecehan atau kekerasan terhadap perempuan, yang dilakukan melalui penggalakan gerakan-gerakan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta melengkapi dan menyempurnakan perangkat hukum untuk melindungi individu maupun kelompok perempuan dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, termasuk kekerasan dalam rumah tangga.
- e. Menjadikan pengarusutamaan gender (PUG) sebagai strategi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program di semua sektor pembangunan, yang dilakukan antara lain melalui peningkatan kapasitas (*capacity building*) aparat perempuan dan laki-laki dalam menyusun program perencanaan pembangunan yang berbasis gender.

5. Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Penguatan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) diharapkan bermuara pada tumbuhkembangnya nilai-nilai budaya masyarakat yang bernuansa iptek yang mewujud dalam bentuk tata kehidupan masyarakat yang mendukung dan akrab dengan pengembangan, bukan hanya sebagai konsumen, dan pemanfaatan iptek untuk mendukung dan mempercepat terwujudnya perekonomian berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*), sekaligus merupakan kiat untuk mencapai kesejajaran dan kesetaraan dengan bangsa lain.

Untuk maksud tersebut, maka pembangunan kelembagaan iptek diarahkan agar mampu:

- a. Memfasilitasi agar proses reaktualisasi budaya sebagai tulang punggung kelembagaan masyarakat senantiasa mengasimilasikan tradisi ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga budaya Sulawesi Selatan merupakan budaya yang sarat dengan tradisi iptek, tetapi tetap memiliki nuansa kearifan tradisional.
- b. Mendorong dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat *melek iptek*, yaitu masyarakat yang menyadari peranan iptek dalam meningkatkan kesejahteraan manusia, antara lain melalui upaya pengenalan iptek sejak dini pada generasi muda, melalui pendidikan formal maupun non-formal; dan mengawamkan kebiasaan kreatif dan inovatif serta nilai-nilai lain yang mendukung terwujudnya tradisi iptek di kalangan masyarakat.
- c. Mendorong dan memfasilitasi terbentuknya sistem pengakuan terhadap hasil penemuan dan hak atas kekayaan intelektual (HAKI), sebagai pijakan (*platform*) baku dalam dunia iptek.
- d. Mengupayakan agar upaya-upaya pengembangan iptek dapat senantiasa disandingkan dengan kegiatan berkesenian demi untuk mewujudkan keseimbangan aspek material, spiritual, dan emosional dalam peningkatan harkat, martabat, dan peradaban manusia.
- e. Memfasilitasi pembangunan pusat-pusat penelitian dan pemanfaatan iptek di Sulawesi Selatan. Perguruan tinggi perlu didorong dan difasilitasi agar mampu meningkatkan kualitas perannya sebagai *knowledge server*, yaitu sebagai penghasil dan penyedia pengetahuan, sekaligus sebagai *communiiversity*, yaitu sebagai DNA iptek masyarakat yang mendukung upaya peningkatan kompetensi berbasis iptek dari masyarakat. Kegiatan badan penelitian dan pengembangan pada lembaga pemerintah difokuskan pada substansi penelitian dan pengembangan yang berkontribusi langsung bagi perumusan kebijakan dan program dengan berbasis pada pengetahuan asli masyarakat. Sedangkan badan penelitian yang dioperasikan oleh dunia swasta perlu terus didorong dan difasilitasi sehingga mampu meningkatkan konten pengetahuan (*knowledge content*) pada produk-produk yang dihasilkan.

- f. Memperkuat posisi Dewan Riset Daerah sebagai mediator yang menjamin terwujudnya sinergi antarlembaga iptek daerah dan nasional atau bahkan internasional.
- g. Pengembangan iptek dilakukan berdasarkan tahapan prioritas yang dirumuskan dalam bentuk *road-map* pengembangan iptek. Pada tahap awal, upaya dimaksud diarahkan untuk mendukung percepatan pengembangan perekonomian propinsi antara lain melalui peningkatan efisiensi proses produksi, manajemen, dan sitem inovasi untuk meningkatkan kualitas keunggulan lokal produk barang dan jasa Sulawesi Selatan; meningkatkan kualitas ketahanan pangan dan energi; pemanfaatan sumberdaya kelautan; serta pada upaya untuk memperkecil atau bahkan menghilangkan kesenjangan digital (*digital divide*), sebagai rangkaian upaya untuk membangun landasan yang kuat bagi terwujudnya perekonomian berbasis pengetahuan.

C. Mewujudkan Sulawesi Selatan yang Atraktif dan Kondusif

Sasaran utama yang ingin dicapai adalah terciptanya lingkungan kondusif yang merupakan syarat harus untuk menjamin dan menunjang tumbuhkembangnya kelembagaan masyarakat pada berbagai kehidupan kemasyarakatan yang pada gilirannya akan memicu kegiatan pembangunan di semua bidang. Di samping itu, kondisi kondusif dimaksud akan meningkatkan daya tarik Sulsel bagi para investor dan pihak-pihak lainnya untuk datang berusaha (termasuk *cost-attractiveness*, iklim investasi yang menarik) dan bahkan untuk menetap di Sulsel.

Setidaknya, ada 4 (empat) aspek yang memerlukan perhatian khusus dalam penciptaan lingkungan dimaksud, yaitu: (i) penataan sistem keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat untuk mewujudkan rasa aman dan damai bagi seluruh masyarakat; (ii) adanya jaminan kepastian hukum melalui penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat yang bermuara pada kesadaran hukum yang semakin mantap; (iii) adanya aliran informasi yang transparan yang tidak memihak kepada kepentingan kelompok atau golongan tertentu dan (iv) adanya pelayanan masyarakat dengan kualitas prima yang disediakan oleh kelembagaan pemerintah yang berkualitas yang didukung oleh aparatur daerah yang semakin profesional.

1. Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat

Keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat merupakan syarat utama berkembangnya lingkungan yang kondusif bagi kegiatan profesional, baik yang dilakukan oleh lembaga maupun perorangan. Di samping itu, suasana aman, tertib dan tenteram akan meningkatkan pula kenyamanan hidup. Olehnya, menjadi dambaan setiap orang. Bahkan dalam suatu pendekatan pembangunan diposisikan sebagai salah satu hak dasar masyarakat.

Arah pembangunan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dijabarkan dalam bentuk:

- a. Mengembangkan sistem pengamanan wilayah terpadu dengan melibatkan Pemerintah Daerah, Polri dan TNI (atas permintaan) serta komponen masyarakat lainnya yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan peningkatan kualitas keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan masing-masing, yang dalam pelaksanaannya senantiasa memperhatikan dan mengedepankan perlindungan Hak Asasi Manusia.
- b. Mendorong terciptanya mekanisme pemolisian masyarakat, dimana masyarakat turut bertanggung jawab dan berperan aktif dalam penciptaan keamanan dan ketertiban dalam bentuk kerja sama dan kemitraan dengan polisi dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
- b. Membantu memantapkan dan meningkatkan profesionalisme Polri agar mampu melindungi dan mengayomi masyarakat, mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terseleenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.
- d. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan sistem pengamanan swakarsa pada tataran kelurahan yang sepenuhnya di bawah bimbingan pemerintah kelurahan serta dibina secara teknis oleh aparat keamanan setempat. Model kelembagaan sistem dimaksud ditentukan oleh masyarakat dengan sepenuhnya memperhatikan dan mengacu kepada nilai-nilai lokal yang dianut.

2. Hukum

Pembangunan hukum diarahkan pada tercipta dan berfungsinya sistem hukum yang responsif yang menjamin adanya kepastian hukum yang merupakan syarat yang diperlukan bagi terciptanya kondisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang kondusif, melalui pembenahan struktur hukum, peningkatan budaya hukum serta penegakan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.

Arah pembangunan hukum dijabarkan dalam bentuk :

- a. Terciptanya penegakan hukum tanpa memandang kedudukan, pangkat, dan jabatan seseorang demi supremasi hukum dan terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia.
- b. Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan materi hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan hak-hak asasi manusia (HAM), kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran.

an, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib, teratur, lancar, serta berdaya saing global.

- c. Menggali dan mengembangkan nilai-nilai tradisional yang relevan untuk memberikan kontribusi dalam upaya penataan kembali sistem hukum nasional yang terpadu dan responsif serta sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat dan menunjang tinggi Hak-hak Asasi Manusia (HAM).
- d. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan aparat penyelenggaraan pemerintah, melaksanakan penegakan hukum (*law enforcement*) secara konsisten dan tidak diskriminatif, menjunjung tinggi supremasi hukum menuju terwujudnya budaya hukum yang kondusif bagi peningkatan kualitas tatanan kehidupan masyarakat.
- e. Meningkatkan kewibawaan aparatur hukum yang memiliki kemampuan profesional dan integritas yang tinggi yang dilandasi dengan kualitas moral dan etika sebagai pengayom masyarakat serta menciptakan kondisi yang dapat menjamin terwujudnya kemandirian aparatur penegak hukum dalam menegakkan hukum yang berintikan keadilan, kejujuran, kebenaran, dan menjamin terciptanya kepastian hukum.
- f. Mendorong kemandirian lembaga peradilan dalam penyelenggaraan proses peradilan yang bebas, terbuka, murah dan cepat serta tidak memihak dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan, kejujuran dan kebenaran.
- g. Mengembangkan berbagai produk hukum dan peraturan perundang-undangan guna mendukung kemandirian lokal.
- h. Mengupayakan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan produk-produk daerah dari klaim pihak ketiga.
- i. Memberikan prioritas pada penyelesaian masalah pertanahan khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan pembangunan tanpa mengorbankan hak-hak masyarakat.

3. Informasi, Komunikasi dan Media Massa

Adanya aliran informasi yang transparan, tidak memihak pada kepentingan suatu kelompok dan golongan akan menjadi katalisator bagi tumbuh dan berkembangnya suatu lingkungan kehidupan bermasyarakat yang kondusif.

Untuk maksud tersebut, maka arah pembangunan informasi, komunikasi dan media massa dijabarkan dalam bentuk:

- a. Mengembangkan sarana dan prasarana komunikasi sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu menunjang kemandirian lokal dan interkoneksi antar tatanan dalam wilayah.
- b. Menciptakan jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang mampu menghubungkan seluruh jaring informasi yang ada di pelosok Sulawesi Sela-

tan dan daerah lain di Indonesia sebagai suatu kesatuan yang mampu mengikat dan memperluas integritas bangsa serta memudahkan pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat dalam mengakses informasi secara cepat dan akurat.

- c. Mewujudkan kebebasan pers yang lebih mapan, melembaga dan kebebasan media dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat, serta menjamin hak masyarakat luas untuk berpendapat dan mengontrol jalannya pemerintahan daerah secara cerdas dan demokratis.
- d. Mewujudkan pemerataan informasi yang lebih besar dengan mendorong berkembangnya media-media massa daerah yang independen.
- e. Menciptakan jaringan informasi yang bersifat interaktif antara masyarakat dan kalangan pengambil keputusan politik untuk mendukung proses perumusan kebijakan yang mengedepankan aspirasi masyarakat dan dapat dipahami oleh masyarakat luas.
- f. Meningkatkan peranan media massa, pers dan lembaga-lembaga independen di bidang komunikasi dan informasi untuk mendukung proses pencerdasan masyarakat serta mengembangkan kehidupan demokrasi yang dilandasi oleh etika, moral dan tanggung jawab.
- g. Mendorong dan memfasilitasi terjadinya perluasan pemanfaatan internet serta peningkatan sinergi dan integrasi prasarana jaringan menuju *next generation network* yang akan menjembatani kesenjangan digital (*digital divide*) sekaligus berfungsi menjadi tulang punggung pengembangan masyarakat berbasis pengetahuan.
- h. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap potensi pemanfaatan telematika serta pemanfaatan dan pengembangan aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi, termasuk pengembangan industri konten sebagai upaya penciptaan nilai tambah informasi.
- i. Meningkatkan kualitas pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi Indonesia.

4. Tata Kelola Kepemerintahan yang Berkualitas

Kelembagaan pemerintah yang bersih, tangguh dan berwibawa yang berlandaskan hukum, serta birokrasi yang profesional dan netral, selain dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, juga diperlukan sebagai *prime-mover* dalam pembangunan Sulawesi Selatan, dalam hal ini berupa terselenggaranya agenda pembangunan lain, serta mempercepat terciptanya lingkungan kondusif dan atraktif, yang akan bermuara pada terwujudnya masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang mandiri dan terwujudnya kemandirian daerah (kemandirian lokal) dalam konstelasi global.

Dengan kata lain, selain tugas umumnya, seperti menyediakan fasilitas pelayanan masyarakat sesuai dengan standar pelayanan minimal yang disepakati, pemerintah propinsi serta pemerintah kabupaten dan kota diharapkan memfokuskan kebijakan dan kegiatannya kepada upaya-upaya untuk mendorong pengembangan kelembagaan masyarakat, sebagai upaya awal untuk mewujudkan masyarakat sipil; mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai komunitas yang utuh, dan menjaga serta meningkatkan sinergi antara kepentingan pemerintah (pelayanan maksimum), kepentingan masyarakat (utilitas maksimum) dan kepentingan swasta (keuntungan maksimum) dalam kerangka kepentingan yang lebih besar, yaitu keberlangsungan keberadaan Sulsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI; dan mendorong mewujudnya kabupaten / kota sebagai komunitas yang tangguh dan mandiri yang berbasis pada keunggulan lokal masing-masing.

Agar mampu melakonkan peran yang disebutkan di atas, maka diperlukan peningkatan secara berkesinambungan kualitas dan kapasitas pemerintah daerah melalui peningkatan profesionalisme aparat, kapasitas kelembagaan, kapasitas keuangan, serta kapasitas lembaga legislatif daerah yang diarahkan pada terwujudnya tata pemerintahan yang demokratis, bersih, kreatif, dinamis serta penuh tanggungjawab dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, yang dilakukan dengan mengikuti arahan kebijakan sebagai berikut:

- a. Mewujudkan kelembagaan pemerintah dengan paradigma berbeda, yaitu mengedepankan *pelayanan ketimbang pengendalian, steering ketimbang rowing (pelaku pembangunan)*, berprespektif gender dan pembangunan berkelanjutan, serta mengikuti prinsip-prinsip tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*clean and good governance*), yang diikuti dengan upaya sistimatis untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur untuk melakonkan peran baru itu.
- b. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah yang didasarkan pada pertimbangan bahwa basis profesionalisme adalah kompetensi dan kapasitas belajar yang didasarkan pada etika dan moral yang tinggi, serta dijaga dengan kesejahteraan yang memadai serta jaminan penjenjangan karier yang transparan dan adil.
- c. Memperkuat peran pemerintah daerah sebagai *prime-mover* proses pematangan kelembagaan masyarakat Sulawesi Selatan, dengan memberikan penekanan kepada upaya pemeliharaan sekaligus pengendalian dinamika masyarakat agar dapat mencapai kondisi di batas chaos (*the edge of chaos*)--kondisi yang memungkinkan terpicunya kreativitas masyarakat (mewujudnya masyarakat kreatif)--tanpa terjebak ke dalam perangkap chaos yang sebenarnya, seperti benturan sosial serta konflik pada sektor kehidupan lainnya yang berkepanjangan, termasuk krisis budaya. Untuk maksud tersebut diperlukan adanya ke-

bijakan pemerintah yang jelas tentang pola pembinaan kelembagaan masyarakat, mulai dari pembinaan awal berupa bantuan finansial dan manajemen, proses penyapihan dan lainnya, termasuk kriteria lembaga-lembaga yang perlu didorong dan dibantu pengembangannya, agar pada saatnya akan dapat berfungsi sebagaimana mestinya secara mandiri.

- d. Menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan aparatur negara dicapai dengan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik pada semua tingkat, lini pemerintahan, dan semua kegiatan; pemberian sanksi yang seberat-beratnya kepada pelaku penyalahguna kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; peningkatan intensitas dan efektivitas pengawasan aparatur pemerintah melalui pengawasan internal, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat; serta peningkatan etika birokrasi, budaya kerja, pengetahuan dan pemahaman para aparatur pemerintah terhadap prinsip-prinsip ketatapemerintahan yang baik.
- e. Menata kelembagaan pemerintah daerah agar sesuai dan sependan dengan lingkup peran yang diemban yang umumnya bersifat spesifik lokasi sehingga lebih mampu menggali, dan mengembangkan sumberdaya dan potensi yang dimiliki menjadi keunggulan lokal dengan cara yang sesuai atau mengacu kepada budaya lokal, serta mendorong dan memfasilitasi pematangan kelembagaan masyarakat daerah guna mentransformasikan daerah sebagai komunitas yang tangguh dan mandiri sebagai perwujudan puncak dari desentralisasi dan otonomi daerah.
- f. Mewujudkan kemandirian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka melaksanakan fungsi dan perannya guna memantapkan penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.
- g. Mewujudkan perimbangan keuangan antara propinsi dengan kabupaten/ kota secara profesional dan berkeadilan serta pengelolaan keuangan daerah yang bertumpu pada sistem anggaran yang transparan dan dapat menjamin efektifitas pemanfaatannya dalam pembangunan daerah, khususnya yang berkaitan dengan upaya-upaya pemenuhan hak dasar masyarakat dan mendorong pengembangan perekonomian lokal.
- h. Mengembangkan *e-gov* untuk mendukung transparansi dan mempercepat pelayanan pemerintah dan aliran informasi dari dan ke masyarakat, serta untuk ikut mendorong terwujudnya perekonomian berbasis pengetahuan.

D. Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai satu Kesatuan Sosial-Ekonomi yang Berkeadilan, Asri dan Lestari

Agenda ini diarahkan untuk menjadikan Sulsel sebagai perwujudan dari interkoneksi spasial--meliputi interkoneksi fisik, sosial dan ekonomi--dari daerah ka-

bupaten dan kota serta kawasan-kawasan pengembangan ekonomi lainnya yang telah berhasil mengembangkan diri dengan berbasis pada keunggulan lokal masing-masing. Interkoneksi dimaksud menciptakan peluang kepada setiap tatanan internal untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan ekonomi Sulsel yang bermuara pada terjadinya *pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan*.

Kondisi tersebut pada satu sisi akan meningkatkan produktivitas dan kekuatan ekonomi Sulsel untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan pangsa pasarnya, ditingkat lokal maupun global, yang diharapkan bermuara pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi sehingga mampu mendongkrak pendapatan rata-rata Sulsel di atas pendapatan rata-rata nasional pada akhir tahun rencana. Sedangkan pada sisi lain, mendorong terjadinya pemerataan pendapatan akibat keterlibatan aktif setiap tatanan internal, yang pada tataran praktis berupa terjaminnya kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat, sehingga secara langsung akan mengurangi kemiskinan secara drastis.

Pertumbuhan ekonomi dimaksud--sebenarnya merupakan pula kontribusi dari program-program yang diagendakan pada agenda E, misi pembangunan kelima--mengacu kepada kaidah-kaidah ekologis, sehingga tidak akan mengorbankan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keberlangsungan sumberdaya alam yang terbaharukan dan dengan pemanfaatan searif mungkin sumberdaya alam yang tidak terbaharukan. Diharapkan laju pertumbuhan itu dapat memicu laju penciptaan lapangan kerja baru yang setara dengan laju pertumbuhan angkatan kerja, sehingga secara langsung akan mengurangi pengangguran.

Agar kesetimbangan antara kedua laju dimaksud dapat dicapai, maka pertumbuhan penduduk diupayakan terus berada di bawah kemampuan dukungan sumberdaya dan lingkungan hidup, yang dalam arti praktis pertumbuhan penduduk diupayakan berada di bawah pertumbuhan penduduk rata-rata nasional..

Untuk mencapai sasaran tersebut, dibuka peluang sebesar mungkin kepada daerah kabupaten dan kota untuk menentukan sektor pembangunan ekonomi yang akan dijadikan tumpuan pengembangan. Walaupun demikian, terdapat beberapa arahan kebijakan pada tingkat propinsi yang semestinya disepakati untuk selanjutnya dipatuhi bersama. Arahan dimaksud dirumuskan dalam bentuk Rencana Tata Ruang Propinsi yang diposisikan sebagai acuan utama dalam perumusan program pembangunan propinsi serta pembangunan kabupaten dan kota, khususnya program-program yang bersifat lintas wilayah kabupaten dan program pengembangan kawasan.

1. Penguatan Struktur Sosial-Ekonomi

Kebijakan pembangunan ekonomi disusun dengan memperhatikan dinamika globalisasi, kepentingan nasional--antara lain berupa kemandirian dan kedaulatan ekonomi bangsa--dengan tetap mengutamakan kepentingan daerah kabupa-

ten dan kota serta kelompok masyarakat yang relatif lemah, keunggulan lokal, serta daya dukung lingkungan hidup dan sumberdaya, terbaharukan dan yang tidak terbaharukan, yang diarahkan untuk memperkuat struktur perekonomian yang menjamin terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (berkeadilan) serta memiliki pijakan yang kuat untuk menuju sistem perekonomian berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*).

Arahan kebijakan untuk penataan struktur ekonomi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan sektor primer didorong melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan senantiasa mengedepankan pertimbangan kelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam--sesuai dengan pola kebijakan pemanfaatan sumberdaya alam terbaharukan dan tidak terbaharukan yang dijabarkan pada agenda D.5--dengan memberikan perhatian khusus kepada pengembangan komoditas yang memiliki keunggulan lokal.
 - ✓ Ekstensifikasi pertambangan dan pertanian, khususnya perkebunan menghadapi kendala ketersediaan lahan. Masalah utama yang dihadapi Sulsel adalah daya dukung lingkungan yang telah mencapai kondisi krisis yang parah sehingga memerlukan upaya konservasi atau bahkan rehabilitasi lahan yang serius. Demikian pula halnya dengan upaya ekstensifikasi tambak yang diperhadapkan pada kondisi kawasan pesisir yang telah mengalami degradasi kualitas yang parah, antara lain dicerminkan oleh semakin berkurangnya luasan hutan mangrove dan rusaknya terumbu karang, yang semakin diperparah oleh kemungkinan naiknya permukaan laut akibat pemanasan global. Oleh karena itu, alternatif pembangunan yang tersedia dengan resiko lingkungan terkecil adalah intensifikasi pada sektor primer yang dilakukan dengan meningkatkan efisiensi dan produktivitas (termasuk nilai tambah) sehingga dapat menghasilkan komoditi berkualitas yang memenuhi standar ekspor dan sebagai bahan baku industri lokal (agro-industri). Peluang ekstensifikasi di sektor pertanian, khususnya tanaman pangan hanya terbuka pada pemanfaatan lahan marginal yang selama ini dilerantarkan.
 - ✓ Kualitas kedaulatan pangan ditingkatkan melalui peningkatan ketersediaan pangan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan. Ketersediaan pangan ditingkatkan melalui peningkatan produktivitas lahan, melalui intensifikasi pemanfaatan pupuk dan pestisida, perbaikan kinerja sistem pengairan, dan pemanfaatan benih hibrida dari tetua lokal sehingga lebih tahan terhadap hama; serta perluasan areal lahan pertanian, yang dilakukan antara lain dengan memanfaatkan lahan marginal (lahan kering atau lahan terlantar). Aksesibilitas masyarakat terhadap pangan cenderung semakin rentan, khususnya bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, akibat

harga pangan dunia yang semakin meningkat. Aksesibilitas dimaksud dapat diperbaiki melalui peningkatan daya beli masyarakat serta pengembangan instrumen jaminan pangan untuk tingkat rumah tangga. Di samping itu, petani perlu dilibatkan secara langsung dalam kegiatan di luar *on-farming* (agribisnis) untuk meningkatkan pendapatannya, dan diperlukan adanya skema pembiayaan, khususnya dalam pengadaan input pertanian, yang menjamin posisi petani sehingga tidak menjadi satu-satunya pihak yang harus menanggung kegagalan panen.

- ✓ Pengembangan pertanian untuk energi (*bio-fuel*) merupakan keniscayaan, demi untuk mengurangi ketergantungan Sulsel terhadap sumber energi, sekaligus untuk mendukung program nasional pengurangan ketergantungan kepada sumber energi fosil. Walaupun demikian, pemanfaatan lahan dan sumberdaya lainnya, termasuk petani, untuk kegiatan ini mesti diupayakan sedemikian rupa sehingga tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kualitas kedaulatan pangan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Dalam hal ini, pemanfaatan lahan marginal / terlantar merupakan kiat yang dianjurkan.
 - ✓ Mendorong pengembangan pertanian organik, antara lain melalui proyek-proyek percontohan yang diinisiasi pemerintah dan masyarakat (termasuk perguruan tinggi), dengan memanfaatkan dana pemerintah dan dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) dari perusahaan.
 - ✓ Memberikan perhatian yang lebih besar kepada pemanfaatan sumberdaya kelautan dan pesisir yang merupakan embrio bagi berkembangnya industri kelautan guna untuk mendukung program nasional pembangunan ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
- b. Pengembangan sektor industri diarahkan untuk menciptakan lingkungan usaha yang dapat merangsang tumbuhnya rumpun industri yang sehat dan kuat melalui pengembangan rantai pertambahan nilai melalui diversifikasi produk (pengembangan ke hilir), pendalaman struktur ke hulu, atau pengembangan secara menyeluruh (hulu-hilir), serta penguatan hubungan antarindustri yang terkait secara horizontal termasuk industri pendukung dan industri komplemen, serta penguatan hubungan dengan kegiatan sektor primer dan jasa yang mendukungnya.

Kriteria pemilihan jenis industri yang prioritas dikembangkan adalah memiliki porsi "upah dan gaji" yang tinggi, untuk menghasilkan pemerataan pendapatan, dan atau memiliki potensi ekspor. Untuk mendorong pengembangan industri dimaksud, pemerintah perlu segera menyusun daftarnya serta skema insentif yang ditawarkan kepada calon investor dengan terlebih dahulu mem-

berikan kesempatan kepada koperasi dan kepada kelompok usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

- c. Pengembangan sektor tersier selain untuk mendukung sektor primer dan sekunder, ditekankan pada penciptaan nilai tambah yang didukung oleh manusia berkualitas, teknologi informasi, distribusi yang lancar dan dukungan pendanaan dengan memberikan prioritas kepada pengembangan jaringan perdagangan (sistem informasi pasar, *trade center*, *forward market*) sehingga menjangkau pasar-pasar komoditas dunia.

Beberapa kegiatan pelayanan yang dapat dikembangkan adalah pelayanan pendidikan tinggi dan pelatihan profesional, pelayanan kesehatan dan pariwisata, untuk mendorong pengembangan sektor transportasi, hotel dan restoran.

- d. Pertumbuhan penduduk perlu dikendalikan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan daya dukung perekonomian Sulsel. Dalam hal ini, agar daya beli masyarakat pada akhir tahun 2028 berada di atas rata-rata nasional serta angka pengangguran dapat ditekan serendah mungkin.

- ✓ Pengendalian laju pertumbuhan penduduk dilakukan melalui peningkatan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu dan efektif menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas.
- ✓ Penataan persebaran dan mobilitas penduduk diarahkan menuju persebaran penduduk yang lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui pemerataan pembangunan ekonomi dan wilayah dengan memperhatikan keragaman etnis dan budaya serta pembangunan berkelanjutan. Disertai dengan adanya sistem administrasi kependudukan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat propinsi dan daerah, serta untuk menjamin terselenggaranya perlindungan sosial dan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat.
- ✓ Kompetensi tenaga kerja dipelihara dan ditingkatkan secara berkesinambungan agar tetap sesuai dengan kebutuhan dunia usaha yang semakin cepat berubah, melalui penerapan pola pembelajaran seumur hidup (*life long education*) yang ditunjang oleh pemerintah, perguruan tinggi, pengusaha dan masyarakat.
- ✓ Kualitas sistem ketenagakerjaan ditingkatkan secara berkesinambungan, antara lain melalui pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan bagi masyarakat, pemerintah dan pengguna tenaga kerja; perbaikan sistem perlindungan keselamatan kerja dan hak-hak tenaga kerja; dan peningkatan kualitas pelayanan penyalur tenaga kerja, baik antar daerah maupun antar negara.

2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah

Jaringan sarana dan prasarana wilayah merupakan elemen utama dari struktur tata ruang yang mendukung mewujudnya Sulawesi Selatan sebagai suatu entitas sosial-ekonomi yang utuh, dalam arti memiliki keterkaitan spasial (*spatial linkage*)--meliputi keterkaitan sosial (*social linkage*), keterkaitan fisik (*physical linkage*) dan keterkaitan ekonomi (*economical linkage*)--yang handal, meliputi: jaringan transportasi, irigasi dan air baku, listrik dan telekomunikasi .

- a. Pembangunan transportasi diarahkan untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi guna mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai satu kesatuan sosial-ekonomi yang menjamin keseimbangan dan pemerataan pembangunan antardaerah dan senantiasa memperhatikan pertimbangan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pembangunan transportasi dilaksanakan dengan membangun jaringan transportasi yang handal dan terintergerasi satu sama lain yang menghubungkan semua pusat-pusat pelayanan dan pengembangan guna meningkatkan kualitas distribusi akses fisik yang pada gilirannya mendukung keterkaitan sistem produksi dan distribusi dan pelayanan sosial ekonomi, termasuk mobilitas penduduk yang semakin merata, di seluruh wilayah Sulawesi Selatan.

Untuk maksud tersebut, beberapa arahan kebijakan adalah sebagai berikut: (a) menyediakan pelayanan angkutan umum massal di daerah perkotaan yang didukung pelayanan pengumpan yang aman, nyaman, tertib, terjangkau dan ramah lingkungan, hemat energi, serta bersinergi dengan kebijakan tata guna lahan, dan didukung oleh budaya berlalu lintas yang tertib dan disiplin; (b) pelayanan transportasi di wilayah perdesaan dikembangkan melalui sistem transportasi perintis yang berbasis masyarakat (*community based*) dan wilayah yang memprioritaskan pengembangan keterkaitan ekonomi desa-kota, khusus kemudahan akses ke pasar kota, karena merupakan saluran utama bagi penduduk perdesaan untuk memperoleh kebutuhan mereka sebagai pengganti hasil pertaniannya. Koordinasi yang baik terhadap sistem ini akan memberikan dampak yang luas serta menguntungkan petani yang merupakan bagian terbesar dari penduduk Sulawesi Selatan; (c) mempercepat dan memperlancar pergerakan penumpang dan barang melalui perbaikan manajemen transportasi antarmoda; meningkatkan pembangunan jalan bebas hambatan pada koridor-koridor strategis angkutan barang antarpulau dan angkutan laut konvensional yang terintergrasi dengan armada nasional, serta angkutan komoditas khusus, seperti hasil perikanan dan pertanian (*fresh good and high value*) dengan moda transportasi udara; (d) mengembangkan sistem transportasi yang handal dan berkemampuan tinggi yang bertumpu pada aspek keselamatan, dan keterpaduan antarmoda, antarsektor, antarwilayah, aspek sosial budaya, dan profesionalitas pelaku dan penyedia layanan transportasi serta menerapkan

dan mengembangkan teknologi transportasi yang tepat guna, hemat energi, dan ramah lingkungan.

- b. Kebijakan pembangunan jaringan listrik dan energi diarahkan untuk meningkatkan kehandalan jaringan listrik tegangan tinggi dan menengah sehingga menjangkau seluruh wilayah Sulawesi Selatan, sebagai bagian dari jaringan interkoneksi Sulawesi, sehingga pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai dengan kebutuhan, termasuk elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan, dapat terpenuhi.

Pembangunan sarana dan prasarana energi dan ketenagalistrikan diarahkan pada pengembangan sarana dan prasarana energi untuk meningkatkan akses dan pelayanan konsumen terhadap energi melalui (a) pengembangan kemampuan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik secara memadai dan dapat memiliki kehandalan yang tinggi melalui rehabilitasi dan *repowering* pembangkit yang ada serta pengadaan pembangkit baru; (b) pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang memiliki sistem tata kelembagaan yang terstruktur dengan mengoptimalkan sistem dan proses pengelolaan ketenagalistrikan agar berfungsi secara efisien, produktif, dan profesional, sehingga dapat memberikan peluang yang lebih luas dan kondusif bagi investasi swasta yang terpisah dari misi sosial, serta mampu melibatkan secara luas peran pemerintah propinsi dan pemerintah daerah, khususnya untuk wilayah nonkomersial; (c) pengembangan diversifikasi energi untuk pembangkit listrik yang baru terutama pada pembangkit listrik yang berbasis batubara dan gas secara terbatas dan bersifat jangka menengah agar dapat menggantikan penggunaan bahan bakar minyak dan dalam jangka panjang akan mengedepankan energi terbarukan, khususnya bioenergi, geothermal, tenaga air, tenaga angin, tenaga surya; (d) pengembangan sistem ketenagalistrikan yang berwawasan lingkungan, dalam hal ini pembangunan PLTA baru perlu dikaji secara cermat; (e) pengembangan sarana dan prasarana pembangkit energi alternatif terbarukan, seperti mikrohidro dan energi surya, khususnya untuk menyediakan energi listrik di wilayah terpencil dan pulau-pulau kecil.

Pencarian sumber-sumber energi alternatif yang menjadi jembatan dari energi fosil ke energi yang terbarukan, seperti energi yang memanfaatkan nuklir dan panas bumi dan atau bahan substitusi yang terbarukan seperti biomassa, biogas, mikrohidro, energi matahari, arus laut, panas bumi (geothermal) dan tenaga angin yang ramah lingkungan, perlu terus diupayakan. Pengembangan sumber-sumber energi alternatif itu disesuaikan dengan kondisi masyarakat dengan tetap mempertimbangkan kelestarian lingkungan, harga energi yang memperhitungkan biaya produksi dan internalisasikan biaya lingkungan, serta mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, pembangunan energi terus diarahkan kepada keragaman energi dan konservasi energi dengan memerhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup (RPJPN).

- c. Kebijakan pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi diarahkan untuk mendorong terwujudnya Sulsel dalam satu kesatuan kawasan komunikasi yang handal, dalam arti kata seluruh wilayah Sulsel telah terjangkau oleh jaringan pelayanan telekomunikasi dengan *bandwidth* yang memadai yang menjamin hubungan internal dan hubungan ke wilayah lain di Indonesia dan ke luar negeri tanpa waktu tunggu yang berarti serta tingkat kegagalan yang se-rendah mungkin, sehingga, secara khusus mampu mendukung berkembangnya *e-commerce*, *e-government*, *e-learning*, dan jenis pelayanan lainnya yang berbasis komunikasi elektronik, dan secara umum mengatasi kesenjangan digital (*digital divide*) yang merupakan kendala utama berkembangnya masyarakat menuju masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge-based society*).

Untuk maksud tersebut, pemerintah berupaya sebatas kemampuannya untuk membantu dan memfasilitasi perusahaan penyedia jasa komunikasi dalam pengembangan sistem dan jaringan komunikasi serta mendorong terjadinya sinergi antarperusahaan tersebut demi terwujud sistem dan jaringan yang handal serta terjangkau oleh masyarakat.

- d. Kebijakan pembangunan sistem irigasi dan air baku diarahkan kepada terwujudnya sistem jaringan keairan yang handal yang berbasis pada pendekatan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berkeadilan. Dalam hal ini, menjamin adanya manfaat bagi daerah-daerah hulu (*catchment area*) dan pasokan air yang cukup, baik untuk irigasi maupun untuk air baku, pada daerah hilir.

Pembangunan prasarana sumber daya air diarahkan untuk mewujudkan fungsi air sebagai sumber daya sosial (*social goods*) dan sumber daya ekonomi (*economic goods*) yang seimbang melalui pengelolaan yang terpadu, efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan sehingga dapat menjamin kebutuhan pokok hidup dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan diwujudkan melalui pendekatan pengelolaan kebutuhan (*demand management*) yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan, pengkonsumsian air, dan pendekatan pengelolaan pasokan (*supply management*) yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan keandalan pasokan air --> dari RPJPN

Selain itu, pengelolaan prasarana sumber daya air diarahkan untuk mewujudkan peningkatan keandalan layanan melalui kemitraan dengan dunia usaha tanpa membebani masyarakat, dan tanpa mengurangi aksesibilitas masyarakat terhadap air bersih. Penerapan sistem pemanfaatan terpadu (*conjunctive use*) antara air permukaan dan air tanah perlu digalakkan terutama untuk menciptakan sinergi dan menjaga keberlanjutan ketersediaan air tanah. Pengendalian daya rusak air mengutamakan pendekatan nonkonstruksi melalui konservasi sumber daya air dan keterpaduan pengelolaan daerah aliran sungai. Pe-

ningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan di antara pemangku kepentingan terus diupayakan tidak hanya pada saat bencana, tetapi juga pada tahap pencegahan serta pemulihan pascabencana.

3. Pembangunan Kawasan

Kawasan merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional. Tujuan utama pengembangan kawasan adalah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan, pemerataan pembangunan antardaerah serta keberlangsungan pembangunan daerah.

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kawasan dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kategori umum. *Pertama, Kawasan Andalan* (sosial-ekonomi), yaitu kawasan yang memiliki potensi spesifik yang dapat dikembangkan menjadi keunggulan lokal. Fungsi utama kawasan ini adalah untuk memicu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat. *Kedua, Kawasan Tertinggal*, yaitu kawasan yang secara sosial-ekonomis relatif terkebelakang dibandingkan dengan kondisi sosial ekonomi rata-rata Sulsel, dan ketiga, *Kawasan Kritis*, yaitu kawasan yang sedang mengalami kondisi lingkungan hidup (dari perspektif ekologis) yang parah sehingga membutuhkan prioritas dalam penanganannya, misalnya berupa rehabilitasi lahan dan upaya konservasi lainnya.

Arahan kebijakan pembangunan kawasan adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan umum pengembangan setiap kawasan adalah adanya sinergi dan komitmen dari pemerintah daerah dan dunia usaha dengan senantiasa mengedepankan aspirasi masyarakat lokal serta pertimbangan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Untuk maksud tersebut, maka Pemerintah Propinsi bersama-sama dengan Pemerintah Daerah terkait perlu menemukenali dan menyepakati basis keunggulan dari setiap kawasan yang diproyeksikan sebagai kawasan andalan dan alasan-alasan bagi kawasan yang diproyeksikan sebagai kawasan kritis dan kawasan tertinggal.
- b. Untuk menjamin transparansi dan sinergi dengan pengembangan kawasan lainnya, maka setiap rencana pengembangan kawasan harus dijabarkan dan disinkronisasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Propinsi yang konsisten, baik materi maupun jangka waktunya dan dengan mengedepankan alasan penempatannya (yaitu potensi dan peluang keunggulan sumberdaya yang tersedia (keunggulan lokal) yang dimiliki untuk kawasan andalan serta masalah spesifik yang dihadapi untuk kawasan kritis dan kawasan tertinggal).
- c. Untuk menjamin keberlangsungan pembangunannya dan untuk mendorong sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat lokal, penetapan suatu wilayah sebagai kawasan andalan yang berbasis pertanian dilakukan dengan mempertimbangkan keunggulan spesifik yang dimiliki (fisik,

sumberdaya, budaya dan lainnya), dan memenuhi kesesuaian *agro-ekologis*, agar sesuai dengan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan hidup dan pemanfaatan sumberdaya alam yang optimal; kesesuaian *agro-ekonomis*, agar sesuai dengan prinsip dasar pengelolaan agribisnis; dan kesesuaian *agro-sosio-ekonomis*, untuk menjamin keikutsertaan masyarakat lokal. Di samping itu, diperlukan adanya komitmen pemerintah daerah untuk menjamin terselenggaranya proses pembangunan kawasan yang berkelanjutan.

- d. Pembangunan Kawasan Andalan diarahkan sedemikian rupa agar mampu mentransformasikan potensi, sumberdaya fisik maupun non fisik, yang dimiliki menjadi keunggulan lokal yang selanjutnya menjadi basis pengembangan kawasan bersangkutan, yang mendorong mewujudnya kelembagaan masyarakat yang mampu menciptakan aktivitas ekonomi sekunder dan tersier di kawasan bersangkutan. Di samping itu, kawasan andalan diarahkan agar mampu berperan sebagai penarik pengembangan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi, tetapi lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata-rantai proses industri dan distribusi, serta pertimbangan ekologis. Upaya itu perlu didukung oleh koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerja sama antarsektor, antarpemerintah, dunia usaha, serta masyarakat lokal.
- e. Kawasan tertinggal dan terpencil, termasuk pulau-pulau yang letaknya jauh dari daratan utama, diupayakan agar dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengurangi ketertinggalan pembangunannya dengan daerah lain. Pendekatan pembangunan yang perlu dilakukan adalah pemberdayaan masyarakat secara langsung melalui skema pemberian dana alokasi khusus, termasuk jaminan pelayanan publik dan keperintisan, serta penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dengan kawasan pengembangan dalam satu 'sistem wilayah pengembangan terpadu' yang terkait dengan sistem hirarki perkotaan (agenda D-6) agar terjangkau dalam sistem pemerataan distribusi pelayanan sosial ekonomi. Sistem wilayah pengembangan terpadu bertujuan untuk memadukan berbagai sektor kegiatan utama dan sektor kegiatan penunjang yang tersinergi dalam satu kesatuan wilayah berdasarkan kondisi obyektif dan potensi riil. Konsep pengembangan kawasan tertinggal dititik beratkan kepada pemberdayaan dan pemenuhan pelayanan, baik sarana dan prasarana maupun pelayanan fasilitas umum, beserta peningkatan bina usaha perekonomian, bina manusia pada wilayah dan peningkatan lingkungan yang berkelanjutan.
- f. Pembangunan kawasan kritis ditekankan kepada pengurangan tekanan terhadap daya dukung lingkungannya, upaya-upaya konservasi dan rehabilitasi lahan, serta upaya-upaya yang berdimensi kelembagaan, antara lain berupa

pemberdayaan masyarakat lokal agar mampu menyesuaikan diri terhadap daya dukung lingkungan hidup dan sumberdaya alam yang semakin berkurang.

- g. Wilayah perbatasan dikembangkan agar mampu berfungsi sebagai pintu gerbang aktivitas sosial-ekonomi dan perdagangan dengan propinsi tetangga, sehingga pada satu sisi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, sedangkan pada sisi lain mendorong berkembangnya sinergi antardaerah dan antarpropinsi.
- h. Mengembangkan pemanfaatan dan pengelolaan potensi sumberdaya alam pesisir dan kelautan melalui perumusan tata ruang kawasan pesisir dan laut yang pemanfaatannya diarahkan untuk mendukung peningkatan produksi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan pesisir dan laut.
- i. Setiap kawasan andalan diharapkan dibina oleh perguruan tinggi tertentu, khususnya dalam pengembangan kelembagaan dan penemuan inovasi yang diperlukan dalam proses dan manajemen produksi dan pemasaran.
- j. Upaya untuk pengembangan pertanian untuk energi (*bio-fuel*) perlu didorong untuk mengurangi ketergantungan Sulsel dan Indonesia dari sumber-sumber energi konvensional (energi fosil), walaupun demikian upaya tersebut harus tidak mengurangi secara signifikan kualitas ketahanan pangan nasional dan daerah.

4. Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan modal pembangunan daerah sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Sumber daya alam yang lestari akan menjamin tersedianya sumber daya yang berkelanjutan bagi pembangunan, sedangkan lingkungan hidup yang asri akan meningkatkan kualitas hidup manusia. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi pembangunan Sulawesi Selatan, maka sumber daya alam dan lingkungan hidup harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan. Dalam hal ini, prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, yang mengakomodasikan tujuan ekonomi, sosial dan lingkungan secara terpadu, diposisikan sebagai acuan utama dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan, di semua sektor dan wilayah.

Dengan kebijakan ini, eksploitasi sumber daya alam pada suatu wilayah tidak akan mengurangi kesempatan wilayah tersebut untuk berkembang di masa mendatang yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari. Di samping terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah dan sebagai modal pembangunan, termasuk terkendalinya dampak bencana alam serta pencemaran kawasan pesisir dan laut.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, maka arah pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dijabarkan dalam bentuk:

- a. Pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan dengan memperhatikan kualitas dan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat diterima masyarakat lokal dan berdampak langsung kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, termasuk memberikan pengakuan terhadap hak-hak adat dan ulayat atas sumber daya alam.
- b. Mengembangkan bentuk-bentuk kerjasama antarpropinsi dan antarkabupaten atau kota dalam pengelolaan lingkungan hidup, khususnya pada Daerah Aliran Sungai dan Kawasan Pesisir yang kesepakatannya dirumuskan dalam bentuk Rencana Tata Ruang Propinsi dan Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi. Setelah rencana tata ruang dimaksud tersusun, maka semua kegiatan pembangunan di kawasan bersangkutan harus mengacu kepada rencana dimaksud.
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan usaha-usaha pencegahan kerusakan, penyelamatan dan perbaikan lingkungan melalui sistem pengawasan dan pembinaan yang terkoordinasi antara pihak pemerintah, swasta dan masyarakat.
- d. Menerapkan standar pengelolaan lingkungan di daerah perkotaan dan pedesaan, khususnya pada kawasan-kawasan yang peka terhadap kerusakan lingkungan, melalui persyaratan penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan bagi setiap aktivitas pembangunan, dan penegakan hukum terhadap semua pihak yang merusak lingkungan.
- e. Mengembangkan pemanfaatan dan pengelolaan potensi sumberdaya alam kelautan melalui perumusan tata ruang kawasan pesisir dan laut yang pemanfaatannya diarahkan untuk mendukung peningkatan produksi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan laut dan pesisir.
- f. Pengelolaan sumber daya alam yang terbarukan, baik di darat dan di laut, dilakukan secara rasional, optimal, efisien, dan bertanggung jawab dengan memanfaatkan seluruh fungsi dan manfaat secara seimbang. Pengelolaan sumber daya alam terbarukan yang berada dalam kondisi kritis diarahkan pada upaya untuk merehabilitasi dan memulihkan daya dukungnya yang selanjutnya diarahkan pada pemanfaatan jasa lingkungan sehingga tidak semakin merusak dan menghilangkan kemampuannya sebagai modal bagi pembangunan berkelanjutan. Hasil atau pendapatan yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam terbarukan diinvestasikan kembali guna menumbuhkembangkan upaya pemulihan, rehabilitasi, dan pencadangan untuk kepentingan generasi sekarang maupun generasi mendatang. Di samping itu, pemanfaatan sumber daya alam yang terbarukan diarahkan pula untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya berbasis kelautan dan hasil-hasil pertanian sebagai sumber energi alternatif (RPJPN).

- h. Pengelolaan sumber daya alam yang tidak terbarukan, seperti bahan tambang, mineral, dan sumber daya energi diarahkan untuk tidak dikonsumsi secara langsung, melainkan diperlakukan sebagai masukan, baik bahan baku maupun bahan bakar, untuk proses produksi yang dapat menghasilkan nilai tambah yang optimal di dalam negeri. Selain itu, pemanfaatan sumber daya alam tak terbarukan harus seefisien mungkin dan menerapkan strategi memperbesar cadangan dan diarahkan untuk mendukung proses produksi di dalam negeri. Hasil atau pendapatan yang diperoleh dari kelompok sumber daya alam tersebut diarahkan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dengan diinvestasikan pada sektor-sektor lain yang produktif, juga untuk upaya reklamasi, konservasi, dan memperkuat pendanaan.
- i. Untuk mengurangi dampak bencana alam maka daerah-daerah rawan bencana perlu segera ditemukeni dan dipetakan serta menjadi bagian dari rencana tata ruang. Di samping itu, sistem deteksi dini serta sosialisasi dan diseminasi informasi terhadap ancaman kerawanan bencana alam perlu disampaikan secara dini kepada masyarakat. Rangkaian upaya dimaksud diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan memberikan perlindungan terhadap manusia dan harta benda karena adanya perencanaan wilayah yang peduli/peka terhadap bencana alam.
- j. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten di segala bidang. Pembangunan ekonomi diarahkan pada pemanfaatan jasa lingkungan yang ramah lingkungan sehingga tidak mempercepat terjadinya degradasi dan pencemaran lingkungan. Sedangkan pemulihan dan rehabilitasi kondisi lingkungan hidup diprioritaskan pada upaya-upaya untuk meningkatkan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

5. Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pembangunan perkotaan yang mengacu kepada sistem pembangunan perkotaan nasional guna mencegah terjadinya pertumbuhan fisik kota yang tidak terkendali (*urban sprawl & conurbation*) diarahkan untuk meningkatkan akses dan jangkauan pelayanan sosial ekonomi serta kesempatan kerja dan peluang usaha bagi segenap lapisan masyarakat yang merupakan syarat harus bagi terwujudnya pemerataan kesejahteraan.

Dengan demikian, percepatan pembangunan kota-kota kecil dan menengah perlu ditingkatkan agar mampu melakukan perannya sebagai pusat pelayanan sosial-ekonomi di kawasannya masing-masing--dalam suatu sistem hirarki perkotaan yang menjamin tersedianya pelayanan sosial-ekonomi yang proporsional sesuai dengan tipologi kota masing-masing--serta sebagai *prime mover* (penggerak awal) pembangunan wilayah sekitarnya.

Pembangunan perdesaan diarahkan sebagai kawasan produksi (lokal) yang mengandalkan sumberdaya dan keunggulan lokal yang dimiliki sebagai upaya utama untuk menanggulangi kemiskinan dan menciptakan distribusi pendapatan yang lebih berkeadilan. Di samping itu, kawasan perdesaan merupakan target utama bagi tersedia dan terselenggaranya pelayanan sosial-ekonomi sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan. Ketersediaan dimaksud pada gilirannya akan meningkatkan kualitas manusia dan kualitas kelembagaan yang bermuara pada mewujudkan desa sebagai komunitas yang mandiri.

Di samping itu, pembangunan perkotaan dan pedesaan diarahkan untuk mewujudkan kawasan yang layak huni, berkeadilan, berbudaya dan wadah bagi peningkatan produktivitas dan kreativitas masyarakat serta mewujudkan pusat pelayanan sosial-ekonomi dan pemerintahan.

Arahan pembangunan perkotaan dan perdesaan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kemampuan pengelolaan kota di bidang pembiayaan prasarana, sarana umum, pelayanan sosial--pendidikan, kesehatan, perumahan, pemeliharaan keamanan dan penanggulangan kejahatan perkotaan--serta pengelolaan tata ruang dan pertanahan, melalui peningkatan kerjasama antar pemerintah kota dan swasta dengan tetap membuka peluang bagi keterlibatan (partisipasi) masyarakat. Peran pemerintah lebih difokuskan pada perumusan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana, sementara peran swasta dalam penyediaan sarana dan prasarana akan makin ditingkatkan terutama untuk proyek-proyek yang bersifat komersial. Kerja sama dengan swasta dalam pembangunan sarana dan prasarana diarahkan untuk: (a) menyediakan sarana dan prasarana transportasi untuk pelayanan distribusi komoditas perdagangan dan industri serta pergerakan penumpang dan barang, baik dalam lingkup propinsi maupun nasional; (b) menghilangkan kesenjangan antara pasokan dan kebutuhan serta efektivitas dan efisiensi tenaga listrik; (c) meningkatkan teledensitas pelayanan telematika masyarakat pengguna jasa; dan (d) memenuhi kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat guna mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.
- b. Hakikat pembangunan desa adalah mewujudkan desa sebagai komunitas yang tangguh dan mandiri. Untuk maksud tersebut, maka penguatan dan peningkatan kualitas kelembagaan masyarakat desa perlu diprioritaskan sehingga mampu melaksanakan semua program pembangunan secara terpadu di desa. Dengan demikian, sasaran-sasaran agenda pembangunan seperti peningkatan kualitas manusia, pemerataan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, pengembangan kelembagaan masyarakat, penyebarluasan informasi, dan lainnya dapat mewujud secara serentak pada tingkat desa.

- c. Arah pemberdayaan masyarakat desa, sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan dan keterbelakangan, difokuskan kepada: (a) pelayanan pendidikan dan kesehatan; perumahan, sanitasi dan air bersih; kesempatan kerja dan peluang berusaha; serta pemenuhan hak dasar masyarakat lainnya; (b) meningkatkan kemampuan ekonomi yang diarahkan pada perbaikan akses pada sumberdaya pembiayaan, teknologi, pasar; (c) kebijakan harga dan perdagangan yang berpihak ke produk pertanian, sehingga dapat menjaga atau bahkan meningkatkan pangsa pasarnya, baik di tingkat lokal maupun global; dan (d) pengembangan kelembagaan masyarakat sesuai dengan budaya lokal.
- d. Meningkatkan aksesibilitas antara kota dengan desa melalui pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi di kawasan perdesaan dan kota-kota kecil terdekat untuk menciptakan keterkaitan fisik, sosial dan ekonomi yang saling komplementer dan saling menguntungkan, dan secara lebih khusus melalui peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan yang antara lain diwujudkan dalam suatu *kawasan pengembangan ekonomi*. Peningkatan keterkaitan tersebut memerlukan adanya perluasan dan diversifikasi aktivitas ekonomi dan perdagangan (nonpertanian) di perdesaan yang terkait dengan pasar di perkotaan.
- e. Mengendalikan pertumbuhan kota Makassar dalam suatu sistem wilayah pembangunan metropolitan yang kompak, nyaman, efisien dalam pengelolaan, serta mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan melalui: (a) penerapan manajemen perkotaan yang meliputi optimasi dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pengamanan zona penyangga di sekitar kota inti dengan penegakan hukum yang tegas dan adil, serta peningkatan peran dan fungsi kota-kota menengah dan kecil di sekitar kota Makassar agar kota-kota tersebut tidak hanya berfungsi sebagai kota tempat tinggal (*dormitory town*) saja, tetapi juga menjadi kota mandiri; (b) pengembangan kegiatan ekonomi kota yang ramah lingkungan seperti industri jasa keuangan, perbankan, asuransi, dan industri telematika serta peningkatan kemampuan keuangan daerah perkotaan; dan (c) revitalisasi kawasan kota yang meliputi pengembalian fungsi kawasan melalui pembangunan kembali kawasan; peningkatan kualitas lingkungan fisik, sosial, budaya; serta penataan kembali pelayanan fasilitas publik, terutama pengembangan sistem transportasi massal yang terintegrasi (antarmoda).

E. Meningkatkan kualitas peran Sulawesi Selatan dalam memelihara Ketahanan Nasional dan mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju dan kuat

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia, maka Sulawesi Selatan perlu senantiasa menjaga keterkaitan fungsionalnya dengan daerah-daerah lain. Keterkaitan dimaksud memberikan manfaat ganda kepada Sulawesi Selatan, yaitu dapat memanfaatkan momentum pertumbuhan dan pengembangan nasional, sekaligus memberikan kontribusi kepada perkembangan dimaksud.

Untuk maksud tersebut interkoneksi sosial-ekonomi dan sosial-budaya antara Sulawesi Selatan perlu diperkuat dengan memanfaatkan keunggulan lokal yang dimiliki Sulsel. Interaksi sosial-ekonomi dibangun melalui pengembangan pusat-pusat pelayanan di Makassar dan atau di kota-kota lain di Sulsel yang memiliki potensi untuk itu, dan pembangunan industri (barang dan jasa) strategis, yaitu industri yang memiliki keterkaitan kedepan (*forward linkage*) dan keterkaitan kebelakang (*backward linkage*) yang besar dengan wilayah lain di Indonesia dan atau industri yang berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya kelautan. Pengembangan industri yang disebutkan terakhir diberi nilai strategis karena berkaitan dengan program pembangunan ekonomi nasional. Kriteria lain dari kelompok industri ini adalah memiliki potensi pangsa pasar yang luas, baik di pasar lokal, nasional maupun global. Interaksi sosial-budaya dibangun dengan melakukan reaktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai budaya bahari yang diharapkan akan memperkuat hubungan sosial-budaya dari berbagai kelompok etnis, khususnya yang berdomisili di Kawasan Timur Indonesia, dan sekaligus untuk memberikan kontribusi kepada upaya-upaya untuk memperkaya budaya nasional yang pada gilirannya akan menjadi acuan tumbuhkembang dan semakin kokohnya identitas nasional (identitas ke-Indonesia-an).

Ada 3 (tiga) program utama, yaitu: (a) menjadikan Makassar (dan beberapa kota lainnya di Sulsel) sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan budaya ; (b) membangun industri strategis (yaitu industri yang memiliki keterkaitan kebelakang dan kedepan dengan industri lain yang ada di Indonesia, serta industri yang berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan kelautan; dan (c) promosi budaya bahari, pada satu sisi untuk memperkuat pengembangan kelembagaan masyarakat yang diperlukan guna mendukung ekonomi kelautan, sedangkan pada sisi lain untuk memberikan kontribusi bagi pengayaan budaya nasional.

1. Pusat Pelayanan

Kota Makassar memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai pusat pelayanan nasional yang melayani kebutuhan pertumbuhan sosial-ekonomi dan sosial-budaya di Kawasan Timur Indonesia dan pulau Kalimantan.

Arah kebijakan yang perlu ditempuh untuk mewujudkan Makassar dan beberapa kota lainnya di Sulawesi Selatan sebagai pusat pelayanan adalah:

- a. Mendorong pengembangan kota Makassar sebagai *main-hubs* transportasi nasional yang memiliki akses langsung ke luar negeri, yang diupayakan melalui peningkatan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana kepelabuhanan pelabuhan Soekarno Hatta sehingga memenuhi syarat sebagai pelabuhan samudera internasional. Demikian pula halnya dengan bandara Hasanuddin agar memenuhi syarat sebagai bandara internasional. Keberadaan kedua pelabuhan ini sekaligus akan memperkuat daya tarik Sulsel sebagai daerah tujuan investasi untuk pembangunan industri strategis.
- b. Mengembangkan beberapa kota diperbatasan atau didekat perbatasan atau yang secara tradisional telah memiliki keterkaitan (sosial-ekonomi dan sosial-budaya) dengan propinsi lain dan atau memiliki potensi sebagai *hubs regional*. Ada 2 (dua) pendekatan yang dapat ditempuh. *Pertama*, adalah secara sepihak mengembangkan beberapa kota di Sulawesi Selatan, khususnya yang berada diperbatasan dengan propinsi lain, sebagai simpul (*main hubs*) transportasi nasional dan regional yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhkembangnya interkoneksi sosial-ekonomi dan sosial-budaya antarpropinsi. Kota Pare-pare misalnya, memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai simpul regional (*regional hubs*) untuk transportasi laut, khususnya untuk menghubungkan Sulsel dengan Kalimantan Timur, Kota Bone untuk Sulawesi Tenggara, Pinrang untuk Sulawesi Barat, serta Palopo atau Masamba untuk menghubungkan Sulsel dengan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. *Kedua*, adalah melalui kesepakatan institusional antarpemerintah Propinsi dan atau kabupaten / kota. Upaya yang telah dirintis sejak beberapa tahun yang lalu antarpemerintah propinsi se Sulawesi yaitu kesepakatan pembangunan Sulawesi sebagai satu kesatuan wilayah perlu terus dipelihara, misalnya melalui peningkatan peran BKPRS dalam proses perencanaan pembangunan Sulawesi dan pembangunan prasarana transportasi antarwilayah propinsi, antara lain melalui pengembangan jaringan KA dan peningkatan kualitas jaringan jalan Trans Sulawesi. Di samping itu, kerjasama regional, seperti BIMP-EAGA perlu terus dikembangkan. Kerjasama antarkota (*sister city*) merupakan pula kiat yang perlu terus digalakkan untuk mempercepat pembangunan kota.
- c. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan Makassar sebagai pusat pelayanan jasa pendidikan tinggi dan pelatihan profesional, pelayanan kesehatan, jasa keuangan dan perdagangan, serta MICE. Upaya ini dapat diwujudkan antara lain dengan memberikan insentif dan kemudahan lainnya kepada lembaga pendidikan dan pelatihan sehingga mampu meningkatkan kualitasnya sebagai penyedia pelayanan dengan kualitas nasional atau bahkan internasional. Kebijakan yang sama semestinya pula diberlakukan untuk jenis pelayanan lainnya.

2. Industri Strategis

Sulawesi Selatan memiliki potensi yang besar sebagai wilayah pembangunan industri strategis, karena: (a) terjaminnya pangsa pasar lokal, karena Sulsel memiliki jumlah penduduk dengan tingkat pendapatan yang relatif tinggi serta keterkaitan industrial yang relatif telah berkembang, terutama dibandingkan dengan jumlah penduduk dan tingkat pendapatan di Kawasan Timur Indonesia, (b) lokasi strategis Sulsel, khususnya Kota Makassar, yang berada di posisi silang arus lalu lintas barang dan penumpang di Indonesia dan bahkan internasional. Potensi ini akan berubah menjadi keunggulan, jika kapasitas pelabuhan laut dan bandara dapat ditingkatkan dan Makassar telah diakui secara institusional sebagai salah satu *main-hubs* di Indonesia; (c) kualitas manusia dan kelembagaan (*soft infrastructure*) Sulsel yang relatif berkembang di bandingkan dengan propinsi lain di Kalimantan dan di Kawasan Timur Indonesia. Potensi ini akan semakin meningkat sejalan dengan keberhasilan agenda atau misi pembangunan A dan B; (d) kebijakan pembangunan ekonomi nasional, sebagaimana tercantum pada RPJPN 2005 - 2025, yang mengedepankan pembangunan ekonomi kelautan. Posisi Sulsel yang berada di bibir Selat Makassar, Laut Jawa dan Teluk Bone yang merupakan kawasan yang kaya akan hasil laut, sangat berpeluang untuk dikembangkan sebagai salah satu pusat industri kelautan nasional.

Upaya yang diperlukan untuk mendorong pengembangan industri dimaksud adalah dengan meningkatkan daya tarik Sulsel bagi pengembangan industri tersebut, seperti penyediaan prasarana dan sarana industri, berupa listrik, air baku; tenaga kerja berkualitas (*knowledge worker*); transportasi (yang otomatis terpenuhi jika program pertama di atas berhasil dilaksanakan); serta iklim investasi termasuk insentif dari pemerintah propinsi. Secara lebih spesifik, upaya-upaya perlu dilakukan difokuskan kepada kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Menyediakan sumberdaya energi listrik yang handal dan relatif murah bagi pengembangan industri yang dilakukan dengan pembangunan pusat-pusat pembangkit tenaga listrik berbahan bakar fosil (batubara) dan menyejajarkan jaringan interkoneksi listrik ke Sulawesi Tengah yang saat ini sedang membangun PLTA dengan kapasitas yang relatif besar.
- b. Peningkatan kapasitas dan kehandalan prasarana industri lainnya seperti air baku, antara lain dengan memanfaatkan semaksimal mungkin sumberdaya air yang tersedia saat ini, seperti Bendungan Bili-Bili.
- c. Menyusun cetak biru (*blue-print*) pengembangan industri strategis dan insentif yang disiapkan oleh pemerintah propinsi untuk mendorong pembangunan industri dimaksud, serta upaya-upaya lainnya untuk mewujudkan iklim yang kondusif bagi tumbuhkembangnya investasi terkait (hasil dari agenda C)
- d. Penguatan kelembagaan industrial serta ketersediaan tenaga kerja berkualitas melalui pelatihan profesional yang berkesinambungan

- e. Pengembangan Makassar (dan atau kota lain) dalam upaya pemanfaatan Selat Makassar sebagai sumber daya ekonomi yang besar, untuk perikanan, minyak dan gas bumi, termasuk lalu lintas pelayaran internasional.

3. Promosi Budaya Bahari

Pengembangan budaya bahari melalui reinterpretasi, reaktualisasi, revitalisasi nilai-nilai bahari tradisional merupakan keniscayaan, karena di samping diperlukan untuk memperkuat *soft-infrastructure* dari industri kelautan, juga untuk memberikan kontribusi terhadap pengayaan budaya nasional yang pada gilirannya akan semakin memperkuat identitas nasional (identitas ke-Indonesia-an).

Pada dasarnya, upaya-upaya yang dibutuhkan untuk melakukan reaktualisasi budaya bahari telah diuraikan pada Agenda B. Oleh karena itu, kebijakan dan upaya yang menjadi bagian dari agenda / program ini difokuskan kepada kebijakan dan upaya yang bersifat promotif, seperti:

- a. Memosisikan kota Makassar sebagai kota budaya yang memberikan *pelayanan* budaya bahari kepada daerah-daerah di Kawasan Timur Indonesia atau bahkan di seluruh Nusantara, yang dilakukan antara lain dengan merevitalisasi obyek-obyek budaya bahari, menyelenggarakan secara periodik *event-event* nasional dan bahkan internasional yang berkaitan dengan budaya bahari, penggalakan pariwisata bahari, dan sebagainya;
- b. Menjalinkan kerjasama, misalnya berupa *sister-city*, dengan kota-kota dunia yang telah berkembang pesat sebagai kota bahari, baik yang menonjol dari sisi budaya maupun yang telah berkembang dari sisi industri bahari.

4.2 Tahapan dan Skala Prioritas

Pembangunan jangka panjang membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan pokok yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Olehnya, tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, namun semua urgensi saling terkait secara utuh dan bersifat berkesinambungan dari tahapan ke tahapan berikutnya dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Sulsel 2028.

Tahapan dan skala prioritas disusun dengan mengacu kepada pertimbangan strategis sebagai berikut.

Strategi pembangunan jangka panjang Sulawesi Selatan ditemukenali dengan mengacu kepada pendekatan yang disebutkan pada bab 1, yaitu meningkatkan kualitas *Kapasitas Swatata (Self-Organizing Capacity)*-- ditentukan oleh adanya identitas yang kuat serta kualitas keragaman dari tatanan internal--Sulsel yang merupakan kata kunci untuk memiliki kemampuan *Adaptasi-Kreatif* terhadap perubahan yang secara eksternal dipicu

oleh dinamika lingkungan strategis dan secara internal oleh pergeseran aspirasi masyarakat.

Kondisi Sulsel pada saat ini menunjukkan bahwa kualitas keragaman internal, baik pada tataran komunitas maupun pada tataran kelembagaan masyarakat fungsional, sangat rendah. Bertitik tolak dari fakta ini, maka upaya pertama yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kemandirian tatanan internal. Untuk melakukannya, alternatif terbaik yang tersedia adalah penguatan kelembagaan pemerintah yang diharapkan akan berperan sebagai penggerak awal (*prime mover*) pembangunan kelembagaan masyarakat, karena hampir tidak mungkin mengharapkan bangkitnya kelembagaan masyarakat secara spontan. Kelembagaan pemerintah yang kuat diharapkan akan mampu mendorong pengembangan kelembagaan masyarakat antara lain melalui penciptaan lingkungan kondusif bagi pengembangan dimaksud. Dengan catatan bahwa pemerintah hanya berfungsi sebagai fasilitator dan pendorong prakarsa masyarakat, bukan menyediakan *blue print* pengembangan yang harus menjadi acuan masyarakat dalam pengembangan diri. Dengan demikian, setiap tahapan RPJP perlu diisi dengan kebijakan dan program penguatan kelembagaan pemerintah agar lebih mampu mandiri dan mampu mendorong kemandirian kelembagaan masyarakat diberbagai bidang kehidupan kemasyarakatan, dengan peran yang bergeser dari satu tahapan ke tahapan lainnya, yaitu sebagai penyedia dan penyelenggara (*rowing*) ke pengarah (*steering*).

Identitas Sulsel terutama ditentukan oleh adanya nilai-nilai dasar (*core values*) yang dianut bersama oleh sebagian besar masyarakat Sulsel, di samping adanya kesamaan visi dan misi. Kondisi sekarang menunjukkan bahwa nilai-nilai dimaksud semakin memudar atau bahkan terlupakan sama sekali. Oleh karena itu, program-program untuk menggali kembali dan melakukan reinterpretasi, revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai budaya tradisional agar setara dan sepadan dengan spirit zaman (*zeitgeist*) perlu diberi prioritas. Nilai-nilai yang teraktualisasi itu diharapkan akan menjadi *core values* dari identitas Sulawesi Selatan yang selanjutnya digunakan sebagai acuan, sekaligus diperkaya, oleh lembaga-lembaga masyarakat di semua bidang kehidupan kemasyarakatan.

Di samping itu, upaya pembangunan manusia merupakan agenda pembangunan yang semestinya dijadikan prioritas utama pada setiap tahapan. Itu karena hakikat pembangunan adalah untuk meningkatkan kualitas manusia demi untuk kehidupan dan kemanusiaan yang lebih beradab (berkesadaran), bukan untuk mencapai tujuan lainnya. Walaupun, kualitas manusia yang lebih baik akan memberikan dampak positif bagi meningkatnya mobilitas manusia pada semua bidang serta meningkatnya daya tarik Sulsel sebagai tujuan investasi. Di samping itu, manusia berkualitas merupakan modal utama untuk membangun komunitas dan kelembagaan masyarakat yang tangguh dan mandiri.

Desa perlu dijadikan *locus* dari semua, atau setidaknya mayoritas, agenda pembangunan. Itu karena sebagian besar masalah pembangunan memiliki akar dan mewujudkan pada tingkat desa. Oleh karena itu, program-program pembangunan pada setiap tahapan pembangunan perlu diarahkan untuk menginisiasi tumbuhkembangnya kelembagaan

an desa yang menjadikan Desa sebagai suatu komunitas yang mampu menemukan dan menyelesaikan sendiri masalahnya. Dalam arti praktis, mampu menemukan dan memanfaatkan potensi desa dan mentransformasikannya menjadi keunggulan lokal yang selanjutnya akan menjadi basis dari pengembangan desa. Jika sasaran ini dapat dicapai, maka otomatis visi pembangunan Sulsel akan berhasil diwujudkan.

1. RPJM Pertama (2008 - 2013)

Tahapan pertama dari RPJP Sulsel 2008 - 2013 difokuskan kepada penataan kelembagaan pemerintah agar mampu berfungsi secara optimal untuk melaksanakan fungsi pemerintahan, pelayanan, dan pembangunan, serta upaya-upaya untuk melakukan reinterpretasi, revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai budaya tradisional yang diperlukan sebagai acuan bagi pengembangan kelembagaan masyarakat.

Fungsi pemerintahan ditekankan pada upaya-upaya untuk menciptakan lingkungan kondusif bagi tumbuhkembangnya kelembagaan masyarakat di berbagai bidang kehidupan kemasyarakatan, dengan memberikan perhatian khusus kepada upaya pemberdayaan kelompok petani agar dapat terlibat langsung dalam kegiatan agribisnis serta pemberdayaan kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mampu terlibat--dalam arti, antara lain membaiknya akses kelompok ini terhadap aset-aset produksi--dalam proses perekonomian yang ditekankan pada intensifikasi sektor pertanian serta pengembangan dan pendalaman struktur ekonomi melalui pengembangan agro-industri.

Di samping itu, perhatian perlu pula diberikan kepada kelembagaan sosial-politik dan sosial-budaya dengan tujuan agar proses demokratisasi, khususnya yang akan dipicu oleh Pilpres dan beberapa Pilkada, tidak membawa dampak negatif, tetapi justru sebaliknya, memberikan kontribusi kepada proses pengayaan budaya demokrasi yang tetap sejalan dengan nilai-nilai kekerabatan yang menjadi *core-values* dari budaya Sulawesi Selatan.

Fungsi pelayanan difokuskan kepada pelayanan pendidikan dan kesehatan tanpa melupakan pelayanan lainnya yang menjadi hak dasar masyarakat. Kualitas pelayanan yang disediakan disesuaikan dengan standar minimal pelayanan, yaitu berupa kemudahan akses bagi setiap anak usia sekolah untuk menikmati layanan pendidikan dasar dan menengah (setara SD dan SMP) secara gratis. Sedangkan standar pelayanan minimal bagi layanan kesehatan pada tahapan pembangunan ini adalah pelayanan pada tataran Puskesmas dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat tanpa dipungut bayaran yang diiringi dengan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas perumahan dan sanitasi serta ketersediaan air bersih, khususnya di kawasan permukiman kumuh.

Hak dasar masyarakat seperti kepastian pemilikan dan penguasaan tanah perlu pula mendapat perhatian khusus, karena di samping berkaitan dengan upaya untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga sangat terkait dengan pencapaian sasaran dari agenda C, yaitu terciptanya lingkungan yang kondusif.

Pemanfaatan teknologi informasi untuk memperluas jangkauan pelayanan perlu diinisiasi pada tahun-tahun awal tahapan pembangunan ini. Pembelajaran berbasis elektronik (*e-learning*) dapat dimulai dengan target pertama peningkatan kualitas guru dan pengayaan isi atau konten (*content*) mata pelajaran. Di samping itu, situs pemerintah propinsi dan pemerintah daerah semestinya tidak hanya berkaitan dengan informasi-informasi yang berkaitan dengan tugas-tugas klasik pemerintahan, tetapi perlu dilengkapi dengan fasilitas untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat. Kiat ini berdimensi strategis karena merupakan upaya awal untuk menjembatani kesenjangan digital (*digital divide*) yang menjadi kendala utama untuk bergeser ke perekonomian berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*).

Di samping itu, pemerintah perlu pula berupaya untuk terus menggalang partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan, sehingga kualitas dan distribusi pelayanan yang tersedia menjadi semakin baik (di atas standar minimal). Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dan kesehatan perlu terus ditingkatkan sehingga penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan menjadi semakin berkualitas tanpa menyita habis sumberdaya pembangunan yang dimiliki pemerintah yang diperlukan untuk membiayai kegiatan pembangunan lain.

Pada tahapan ini, pembangunan daerah difokuskan pula pada peningkatan struktur tata ruang sebagai upaya awal untuk mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai satu entitas sosial-ekonomi yang berkeadilan, asri dan lestari. Untuk maksud tersebut, maka prasarana transportasi perlu ditingkatkan, khususnya pada koridor yang menghubungkan Makassar-Parepare, koridor yang menjadi bagian dari Trans Sulawesi, dan koridor Sulsel bagian Selatan (Makassar-Bantaeng-Bone). Keberadaan koridor ini akan mendukung pertumbuhan dan penguatan struktur ekonomi yang diupayakan melalui pengembangan Kawasan Andalan. Pada tahapan pembangunan ini, revitalisasi dan restrukturisasi kawasan andalan di propinsi Sulawesi Selatan dimulai kembali. Revitalisasi dimaksud meliputi upaya-upaya untuk mentransformasikan potensi spesifik yang dimiliki kawasan bersangkutan menjadi keunggulan lokal, sedangkan restrukturisasi ditekankan pada peningkatan interkoneksi antar kawasan andalan yang pada gilirannya akan mendorong terjadinya sinergi antarkomoditas dan atau pelaku pembangunan pada masing-masing kawasan.

Kegiatan pada setiap kawasan andalan yang berbasis pertanian ditekankan pada intensifikasi sektor pertanian, peremajaan tanaman, serta penerapan prinsip-prinsip agrobisnis agar mampu secara efisien menghasilkan produk-produk yang bernilai tinggi di pasar lokal, nasional atau bahkan di pasar global, serta sebagai bahan baku yang berkualitas untuk proses industri (agro-industri). Di samping itu, pengembangan komoditas khusus dan bernilai tinggi, seperti pangan hasil pertanian organik, u-

dang dan hasil perikanan lainnya perlu terus didorong. Upaya ini merupakan salah satu contoh untuk mentransformasikan potensi lokal menjadi keunggulan lokal. Upaya peningkatan kedaulatan pangan serta inisiasi pertanian untuk energi (*bio-fuel*) difokuskan pula pada kawasan andalan. Diupayakan agar tarik-ulur (*trade off*) antara kedua program ini tidak akan bermuara pada semakin tidak terjangkaunya pangan bagi kebanyakan masyarakat yang pada gilirannya dapat bermuara pada menurunnya gizi masyarakat.

Inisiasi pengembangan kelembagaan masyarakat pada setiap kawasan telah dilakukan pula pada tahapan pembangunan ini. Inisiasi ini diarahkan untuk mendukung berkembangnya sektor sekunder dan tersier pada setiap kawasan yang pada gilirannya akan mentransformasikan kawasan menjadi entitas wilayah (komunitas) yang mandiri.

Pembangunan infra-struktur wilayah dilaksanakan pula pada tahapan pembangunan ini. Selain untuk mendukung terwujudnya interkoneksi antar kawasan andalan, sekaligus diarahkan untuk meningkatkan daya tarik Sulawesi Selatan bagi pengembangan industri strategis (agenda E). Prioritas diberikan kepada pengembangan kawasan industri dan kawasan pergudangan, peningkatan jalan akses antara kawasan industri dan kawasan pergudangan ke Bandara dan ke Pelabuhan. Sarana dan prasarana kepelabuhanan dan bandara perlu pula ditingkatkan, demikian pula halnya dengan prasarana wilayah lainnya yang diperlukan untuk industri, seperti listrik dan air baku. Percepatan pembangunan infrastruktur dimaksud lebih didorong melalui peningkatan peran swasta dengan meletakkan dasar-dasar kebijakan dan regulasi serta reformasi dan restrukturisasi kelembagaan yang meningkatkan daya tarik Sulsel kepada kelompok swasta dimaksud, nasional maupun asing.

Rehabilitasi kawasan kritis, terutama untuk mencegah berlanjutnya proses pendangkalan pada bendungan Saddang dan Bili-bili yang mengancam ketersediaan air, irigasi maupun air baku, perlu pula diberi perhatian khusus pada tahapan pembangunan ini. Perhatian yang sama perlu pula diberikan kepada beberapa kawasan kritis lainnya.

Penguatan Desa sebagai suatu komunitas (*community development*) mulai diinisiasi pada tahapan pembangunan ini yang dilakukan dengan memilih beberapa desa pada beberapa Kabupaten sebagai model percontohan. Program ini berfungsi untuk mempercepat mewujudnya kelembagaan masyarakat desa, sehingga mereka dapat menemukenali dan melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang mereka butuhkan secara mandiri. Dengan demikian, desa diharapkan dapat mentransformasikan diri menjadi sentra produksi dan sekaligus mengentaskan kemiskinan yang ada. Setiap desa akan mewujudkan sebagai satu komunitas, bukan lagi hanya sebagai satuan administrasi belaka. Agar lebih berhasil guna, maka perlu diupayakan untuk mengintegrasikan program ini dengan *Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)*, serta dengan beberapa program perbantuan teknik dan pendanaan dari lembaga do-

nor internasional. Program pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pelayanan pendidikan dan kesehatan, perbaikan permukiman, sanitasi dan air bersih, semestinya dijadikan bagian integral dari program pembangunan desa.

Rangkaian program yang diuraikan di atas secara implisit menunjukkan bahwa aspek pertumbuhan ekonomi ditekankan pada peningkatan *output* sekaligus permintaan akhir (*final demand*). Peningkatan output dilakukan melalui intensifikasi sektor primer dan pengembangan sektor industri, khususnya agro-industri. Sedangkan peningkatan permintaan akhir dilakukan dengan meningkatkan konsumsi, ekspor dan investasi, baik dari pemerintah maupun dari swasta nasional dan lembaga-lembaga multinasional. Konsumsi dipicu melalui peningkatan daya beli penduduk Sulawesi Selatan. Upaya peningkatan dimaksud tercermin pada pemihakan kepada kelompok usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta pelibatan petani dalam kegiatan agribisnis. Kebijakan ini secara langsung akan meningkatkan pendapatan kelompok dimaksud dan pada gilirannya akan meningkatkan konsumsi (*final demand*). Selain itu, peningkatan daya beli kelompok tersebut, yang merupakan bagian terbesar dari penduduk Sulawesi Selatan, akan memperbaiki kualitas hidup mereka, khususnya di lihat dari aspek pendidikan dan kesehatan. Semuanya itu, akan bermuara pada percepatan laju peningkatan IPM Sulsel.

Pencapaian sasaran dari berbagai program yang disebutkan di atas sangat tergantung kepada adanya sinergi pemanfaatan sumberdaya keuangan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan kesepahaman antar kedua pemerintah dalam penyusunan APBD masing-masing, khususnya dalam penyusunan prioritas program pembangunan. Dikombinasikan dengan dukungan dari masyarakat dan pihak ketiga (investor), maka diharapkan rangkaian program-program itu akan mendorong pertumbuhan (dan pergeseran) struktur ekonomi Sulawesi Selatan.

2. RPJM Kedua (2013 - 2018)

Berdasarkan capaian pembangunan pada tahapan sebelumnya, intensitas penyelenggaraan pembangunan yang dilakukan masyarakat semakin meningkat, walaupun masih jauh dari optimal. Oleh karena itu, peningkatan kualitas kelembagaan pemerintah yang menjadi prioritas utama pada tahapan pembangunan sebelumnya tetap dilakukan, dengan titik berat perhatian kepada peningkatan kualitas aparatur pemerintah. Program ini akan bermuara pada peningkatan kualitas kinerja pemerintah provinsi dan pemerintah daerah sehingga semakin mampu menciptakan lingkungan yang semakin kondusif yang pada gilirannya akan semakin mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas kelembagaan masyarakat di semua bidang kehidupan.

Perhatian tetap diberikan, malah dengan intensitas yang semakin tinggi, pada upaya-upaya untuk memperkuat identitas ke-Sulsel-an yang difokuskan pada upaya-upaya pengawaman visi dan misi pembangunan Sulsel 2008-2028 kepada seluruh

pemangku kepentingan, yang dibarengi dengan upaya berkesinambungan untuk melakukan reinterpretasi, revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai budaya tradisional agar senantiasa sesuai dengan spirit zaman.

Secara lebih khusus, pemerintah telah mampu menginisiasi keterlibatan dari lembaga-lembaga fungsional masyarakat untuk secara bersama-sama menemukenali dan mentransformasikan potensi spesifik yang dimiliki, baik berupa sumberdaya alam maupun potensi budaya (*indigeneous knowledge*), menjadi keunggulan lokal yang akan berfungsi sebagai basis dan identitas pembangunan dari setiap daerah kabupaten dan kota serta kawasan andalan.

Di samping itu, kualitas penyelenggaraan tugas pemerintah dalam menyediakan fasilitas pelayanan untuk pemenuhan hak-hak dasar masyarakat diharapkan semakin membaik, yang antara lain mewujudkan dalam bentuk peningkatan standar pelayanan minimal untuk kesehatan dan pendidikan, termasuk untuk perumahan, sanitasi dan air bersih. Peningkatan standar ini dapat dilakukan karena pada satu sisi kemampuan pemerintah di bidang manajemen sumberdaya pemerintah menjadi semakin baik, antara lain didukung oleh aparat yang semakin berkualitas dan kebocoran anggaran yang dapat dikendalikan. Pada sisi lain, keterlibatan masyarakat dalam penyediaan fasilitas pelayanan dimaksud (khususnya pendidikan dan kesehatan) telah meningkat pula. Masih seperti pada tahapan pembangunan sebelumnya, pemerintah diharapkan terus mendorong dan memfasilitasi kelembagaan masyarakat sehingga mampu ikut terlibat dalam penyelenggaraan dan penyediaan fasilitas pelayanan dimaksud. Tataran kualitas pelayanan yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga masyarakat dan swasta diserahkan kepada mekanisme pasar. Kebijakan ini diharapkan akan menumbuhkan pusat-pusat pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan lainnya yang memenuhi persyaratan nasional atau bahkan internasional yang akan bermuara berkembangnya Makassar dan atau kota-kota lainnya sebagai Pusat Pelayanan Nasional (agenda E).

Di samping upaya-upaya yang disebutkan di atas, pemerintah perlu pula untuk terus memotivasi dan menyadarkan masyarakat akan perlunya pendidikan dan kesehatan. Tanpa adanya kesadaran dan motivasi dimaksud, maka sasaran program peningkatan kualitas manusia (agenda A) akan sulit dicapai.

Pemanfaatan teknologi informasi semakin digalakkan pada setiap pelaksanaan agenda pembangunan. Khusus untuk agenda A, pemanfaatan *e-learning* perlu mendapat porsi yang semakin besar dibandingkan dengan porsi yang diberikan pada tahapan pembangunan sebelumnya. *e-learning* diharapkan telah menyentuh siswa secara langsung, sehingga sebagian besar siswa memiliki peluang untuk mengakses sumber-sumber pengetahuan lain, seperti *e-library*, yang akan meningkatkan wawasan dan kualitas pengetahuan yang bersangkutan. Kualitas informasi dan pengetahuan yang tersedia pada situs pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga-lembaga masyarakat lainnya perlu terus ditingkatkan agar mampu berperan sebagai pemasok

pengetahuan (*knowledge server*) yang semakin baik dan semakin terjangkau oleh masyarakat. Upaya-upaya ini diharapkan akan bermuara pada semakin meningkatnya konten pengetahuan (*knowledge content*) pada produk-produk yang dihasilkan masyarakat yang merupakan syarat harus bagi tumbuhkembangnya perekonomian berbasis pengetahuan.

Pada tahapan pembangunan ini, upaya revitalisasi dan restrukturisasi Kawasan Andalan terus dilanjutkan dengan penekanan yang sedikit berbeda. Tahap awal revitalisasi diharapkan telah diselesaikan pada tahapan pembangunan sebelumnya, sehingga pada tahapan ini kegiatan dapat semakin difokuskan kepada penguatan keunggulan lokal yang dimiliki oleh setiap kawasan. Penguatan dimaksud memiliki spektrum yang luas, mulai dari peningkatan proses dan manajemen produksi, aspek kelembagaan kawasan yang tidak saja berkaitan dengan sosial-ekonomi tetapi juga menyentuh aspek sosial-budaya, serta aspek finansial. Tidak kalah pentingnya adalah pengembangan struktur ekonomi kawasan, yaitu dengan meningkatkan upaya-upaya untuk mendorong tumbuhkembangnya sektor industri dan jasa.

Aspek kelembagaan perlu mendapat perhatian khusus, agar pada setiap kawasan dapat berkembang kelembagaan masyarakat yang mampu berfungsi sebagai *soft-structure* pengembangan kawasan yang tetap mengedepankan kepentingan dan keterlibatan masyarakat lokal, dalam hal ini berupa kelompok-kelompok usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Peluang bagi swasta nasional atau bahkan investor manca negara untuk terlibat tetap harus dibuka selebar mungkin. Peran kelompok ini diperlukan terutama dari sisi finansial, introduksi teknologi dan manajemen, serta untuk memperluas jaringan pasar. Tentu saja, pemerintah perlu melibatkan diri untuk memfasilitasi dan mengembangkan skema kerjasama antarkelompok dimaksud sehingga dapat tercipta sinergi dalam pengembangan kawasan yang diharapkan bermuara pada pertumbuhan yang berkualitas. Keterlibatan perguruan tinggi jelas diperlukan, terutama untuk menemuknenali dan menyuntikkan inovasi yang dibutuhkan untuk mempercepat laju pembangunan kawasan.

Peningkatan produksi setiap kawasan andalan selain dibutuhkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, juga diperlukan untuk menjaga kontinuitas aliran barang di pelabuhan dan di bandara. Kontinuitas dimaksud pada gilirannya akan membuat skala pengoperasian pelabuhan dan bandara memenuhi persyaratan efisiensi ekonomi.

Restrukturisasi kawasan andalan pada tahapan pembangunan ini memasuki babak baru, berupa penekanan pada upaya-upaya peningkatan kualitas interkoneksi fungsional antarkawasan--berupa keterkaitan industrial--yang mewujud dalam bentuk keterkaitan ke depan (*forward linkage*) dan atau keterkaitan kebelakang (*backward linkage*).

Untuk maksud tersebut, penataan ruang wilayah, khususnya transportasi, merupakan keniscayaan, karena mempererat keterkaitan spasial antarkawasan merupa-

kan syarat harus bagi berkembangnya keterkaitan industrial dimaksud. Di samping itu, prasarana dan sarana transportasi dimaksud akan membuat jangkauan pelayanan sosial-ekonomi menjadi semakin besar dan merata, yang berarti wujud Sulsel sebagai satu entitas sosial-ekonomi menjadi semakin mendekati kenyataan.

Inisiasi yang dilakukan pada tahapan pembangunan sebelumnya, telah membuat struktur ekonomi Sulawesi Selatan menjadi semakin kuat, dalam arti kapasitas untuk berkembang menjadi semakin besar, antara lain berupa keberadaan beberapa industri strategis baru di Makassar dan di wilayah lainnya. Kecenderungan itu perlu diupayakan untuk terus dipertahankan dengan memelihara dan meningkatkan daya tarik Sulsel, di bidang kelembagaan serta daya tarik wilayah, berupa prasarana wilayah yang semakin baik serta ketersediaan tenaga kerja trampil dan berpengetahuan sebagai hasil upaya pembangunan pada tahap-tahap sebelumnya.

Pemerintah, melalui perusahaan daerah, semestinya dapat ikut berpartisipasi dalam pengembangan industri strategis. Upaya ini, pada satu sisi akan memberi peluang kepada pemerintah untuk meningkatkan pendapatannya, sedangkan pada sisi lain, sebenarnya ini yang lebih penting, berfungsi sebagai "pionir" bagi pengembangan suatu industri yang sifatnya sangat membantu meningkatkan kualitas keterkaitan industrial, inter dan antar wilayah, tetapi belum diminati secara serius oleh kalangan swasta.

Upaya-upaya untuk menjaga atau bahkan meningkatkan daya dukung lingkungan terus dilanjutkan pada tahapan pembangunan ini, malah dengan intensitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahapan sebelumnya. Hal ini dimungkinkan oleh semakin membaiknya kemampuan pemerintah dalam mengelola sumberdayanya serta didukung oleh meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat serta semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di seluruh wilayah Sulawesi Selatan.

Program pembangunan desa terus dilanjutkan, untuk memantapkan model pengembangan desa sebagai komunitas. Program masih terus dilaksanakan pada beberapa desa, selain untuk semakin meningkatkan kualitas kemandirian desa bersangkutan juga untuk mendapatkan model pengembangan yang semakin baik dalam arti setara dan sepadan dengan kondisi Sulawesi Selatan. Pada akhir tahapan pembangunan ini, diharapkan program itu telah menjangkau lebih dari 50% desa yang ada di Sulawesi Selatan.

Uraian program-program prioritas yang perlu dilaksanakan pada tahapan pembangunan ini menunjukkan bahwa motor pendorong pengembangan ekonomi Sulawesi Selatan masih seperti pada tahapan pembangunan sebelumnya, tetapi dengan kapasitas yang semakin baik. Kapasitas dimaksud terutama dipicu oleh keterkaitan industrial antar kawasan seiring dengan semakin berkembangnya perekonomian di berbagai kawasan andalan, dalam arti pola agribisnis dapat dipraktikkan dengan semakin baik yang diikuti dengan pengembangan agro-industri, khusus un-

tuk kawasan andalan yang berbasis pada pertanian. Di samping itu, keberadaan berbagai industri strategis memberikan kontribusi yang semakin signifikan terhadap pembentukan PDRB Sulsel, secara langsung oleh kegiatan industri itu sendiri, sedangkan secara tidak langsung memicu berkembangnya sektor jasa di Sulawesi Selatan.

Rangkaian program yang diuraikan di atas diharapkan dapat dilaksanakan dengan semakin efektif seiring dengan meningkatnya kesepahaman antar pemerintah propinsi dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumberdaya keuangan masing-masing, yang diperkokoh oleh kemampuan pembiayaan masyarakat dan swasta yang semakin meningkat pula. Dengan demikian, rangkaian program dimaksud diharapkan akan mengurangi kesenjangan antar daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurunkan angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

3. RPJM Ketiga (2018 - 2023)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) ketiga diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang, dengan mengandalkan peran serta lembaga-lembaga masyarakat yang semakin berkualitas untuk menghasilkan berbagai pilihan (*choice*) kepada masyarakat dan mengembangkan kemampuan masyarakat untuk memilih (*voice*) di semua bidang kehidupan kemasyarakatan.

Untuk maksud tersebut, upaya reinterpretasi, revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai budaya tradisional yang dilakukan sejak tahap awal RPJP terus ditingkatkan pada tahapan pembangunan ini yang hasilnya segera diawamkan kepada segenap lapisan masyarakat, terutama kepada generasi muda, melalui pendidikan, formal maupun non-formal, dan kegiatan budaya lainnya. Upaya berkesinambungan itu diharapkan semakin mewujudkan dalam bentuk mengkrystalnya *identitas ke-sulsel-an* yang menjadi acuan dalam pengembangan kelembagaan masyarakat di semua bidang kehidupan.

Di bidang sosial-ekonomi, nilai-nilai budaya dimaksud mempengaruhi terbentuknya kelembagaan masyarakat yang tertata sedemikian rupa sehingga mampu membuka peluang yang proporsional bagi setiap pelaku pembangunan. Peranan Koperasi menjadi semakin mengemuka, demikian pula halnya dengan kelompok usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang semakin mampu berperan dalam semua kegiatan ekonomi dan mampu menjalin sinergi dengan kelompok usaha swasta modern tanpa menimbulkan kondisi perekonomian yang predatorik, yang pada muaranya akan mewujudkan dalam bentuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Nilai-nilai tradisional yang teraktualisasi itu, antara lain dicerminkan oleh sikap dan kesadaran masyarakat yang semakin tinggi terhadap perbedaan, juga memengaruhi perkembangan kelembagaan sosial-politik, yang mewujudkan dalam bentuk tumbuhkembang-

nya berbagai lembaga-lembaga politik yang menawarkan pilihan yang beragam di bidang politik serta berbagai varian dalam menyalurkan aspirasi politik tanpa menimbulkan distorsi atau konflik yang berkepanjangan yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan kemasyarakatan. Di samping itu, telah mampu pula menghadirkan mekanisme politik untuk mewujudkan tata pemerintahan yang selain memiliki kompetensi prima dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, juga bersih dan transparan (*clean and good goverment*).

Jelas bahwa kehadiran lembaga-lembaga masyarakat pada berbagai bidang itu tidak hanya memengaruhi corak kelembagaan masyarakat dibidang masing-masing, tetapi juga, secara langsung maupun tidak langsung, memberikan pengaruh balik kepada nilai-nilai budaya Sulawesi Selatan. Ini adalah kondisi yang memiliki dua sisi yang bertolak belakang. Pada satu sisi, pengaruh kehadiran lembaga-lembaga masyarakat tadi akan memberikan masukan yang dapat memperkaya nilai-nilai budaya, tetapi pada sisi lain, dapat saja membawa pengaruh negatif yang potensial merusak atau bahkanmeruntuhkan sendi-sendi budaya Sulawesi Selatan.

Uraian di atas menunjukkan bahwa pada tahapan pembangunan ini, peran pemerintah tidak menjadi semakin ringan, malah sebaliknya. Pada satu sisi tetap harus mampu mendorong dan memfasilitasi lembaga-lembaga kemasyarakatan pada berbagai bidang kehidupan untuk tumbuh dan berkembang sedemikian rupa sehingga mampu secara mandiri memelihara kelembagaannya. Sedangkan pada sisi lain, pemerintah harus mampu memainkan peran sebagai fasilitator sekaligus pengarah (*steering*). Sebagai fasilitator, pemerintah diharapkan tetap mampu menciptakan dan memelihara lingkungan kondusif untuk menyalurkan dan mengakomodasikan dinamika masyarakat yang semakin meningkat; sedangkan sebagai pengarah, peran pemerintah diperlukan agar agar dinamika kelembagaan masyarakat itu tidak saling melukai--atau bahkan menghasilkan formasi sosial yang predatorik--dan tidak meruntuhkan sendi-sendi budaya tradisional Sulsel. Peran yang semakin besar itu jelas menuntut upaya pembaharuan yang berkesinambungan di tubuh pemerintah propinsi dan pemerintah daerah, antara lain dilakukan melalui peningkatan kemampuan dalam mengelola peraturan daerah, penjaminan kepastian hukum dan terus membantu pelaksanaan tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diselenggarakan oleh Polri dan aparat keamanan lainnya.

Di samping itu, terlepas dari semakin beragamnya fasilitas-fasilitas pelayanan yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan, pemerintah tetap harus memberikan perhatian bagi penyediaan fasilitas pelayanan, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Dalam hal ini, pelayanan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas manusia perlu ditingkatkan yang diwujudkan dalam bentuk meningkatkan standar pelayanan minimal. Di bidang pendidikan, standar dimaksud diharapkan telah meliputi pelayanan "gratis" bagi siswa SMA dan atau yang sederajat serta akses yang semakin mudah bagi para guru dan siswa terha-

dap sumber-sumber pengetahuan, antara lain melalui penyediaan fasilitas *e-learning*. Di bidang kesehatan, perbaikan standar dimaksud ditekankan pada peningkatan target nilai dari semua indikator yang berkaitan langsung maupun tidak langsung pada Angka Harapan Hidup. Di samping itu, upaya pelayanan kesehatan perlu diperluas, tidak hanya terfokus kepada tindakan-tindakan pengobatan, tetapi mulai ditekankan kepada pencegahan dini, antara lain melalui penataan lingkungan perumahan (sanitasi lingkungan), perumahan sehat, serta penyediaan air bersih. Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dan kesehatan perlu pula ditingkatkan intensitasnya.

Seperti pada tahapan pembangunan sebelumnya, upaya-upaya pemenuhan hak dasar masyarakat diintegrasikan ke dalam program pembangunan desa. Pada tahapan pembangunan ini, program dimaksud diupayakan telah menjangkau semua desa di Sulawesi Selatan. Target yang dipatok untuk dicapai pada akhir tahapan pembangunan ini adalah semakin meningkatnya kualitas partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan komunitas mereka serta semakin meningkatnya kontribusi dari lembaga-lembaga kemasyarakatan fungsional dalam membantu mewujudkan kelembagaan masyarakat desa sebagai suatu komunitas yang tangguh dan mandiri.

Pada tahapan pembangunan ini, pemerintah daerah, kabupaten dan kota, diharapkan telah berhasil menata diri sehingga mampu menemukan potensi spesifik yang dimiliki dan mentransformasikannya menjadi keunggulan lokal yang menjadi basis pengembangan daerah masing-masing. Upaya transformasi dimaksud tidak saja berkaitan dengan kelembagaan pemerintah, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas kelembagaan masyarakat. Dengan kata lain, pemerintah daerah pada tahapan pembangunan ini semestinya memfokuskan perhatian kepada upaya-upaya untuk mewujudkan kelembagaan masyarakat di daerahnya, yang pada satu sisi merupakan pengejawantahan nilai-nilai tradisional yang hidup dan berakar di daerah-atau malah telah wujud sebagai *indigeneous knowledge*--sedangkan pada sisi lain setara dan sepadan (*suitable*) dengan karakteristik sumberdaya atau potensi lokal yang ada. Hanya dengan upaya ini, upaya transformasi potensi daerah menjadi keunggulan lokal dapat diwujudkan. Di samping itu, peranan lembaga-lembaga kemasyarakatan fungsional dalam mewujudkan kelembagaan daerah sangat diharapkan untuk lebih memperkaya proses dimaksud.

Pada tahapan ini, upaya-upaya peningkatan penerimaan pemerintah (PAD) dapat dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi obyek-obyek pajak yang semakin beragam yang antara lain disebabkan oleh pertumbuhan dan semakin dinamisnya perekonomian daerah, dengan tetap memberi perhatian agar upaya dimaksud tidak memicu terjadinya pengaruh negatif (disinsentif) terhadap perkembangan perekonomian daerah. Pemanfaatan teknologi, khususnya teknologi informasi, perlu mendapat porsi yang semakin besar karena merupakan investasi yang tidak tergan-

tikan bagi keinginan untuk mewujudkan perekonomian Sulawesi Selatan sebagai perekonomian berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*).

Pembangunan kawasan andalan tetap menjadi fokus perhatian pemerintah propinsi bersama-sama dengan pemerintah daerah yang wilayahnya menjadi bagian dari kawasan andalan. Pada tahapan pembangunan ini, upaya-upaya diarahkan untuk semakin memperkuat kelembagaan masyarakat kawasan sehingga semakin mampu mengembangkan kawasan dimaksud secara lebih mandiri dengan tetap membuka peluang bagi kehadiran swasta nasional maupun asing.

Kebijakan untuk menjadikan kawasan andalan sebagai basis bagi terwujudnya kedaulatan pangan serta ketersediaan pasokan bagi bio-energi tetap menjadi acuan dalam pengembangan kawasan andalan. Di samping itu, perhatian yang lebih besar semestinya diberikan pula kepada upaya-upaya untuk memperkokoh keterkaitan industrial antarkawasan. Untuk maksud tersebut, penataan prasarana wilayah, khususnya transportasi, perlu terus ditingkatkan agar aksesibilitas antarkawasan dan antar kawasan dengan pasar, termasuk pelabuhan dan bandara, dapat ditingkatkan. Kelembagaan sosial-ekonomi antarkawasan yang merupakan *soft structure* interkoneksi antarkawasan perlu pula terus dikembangkan dan ditingkatkan.

Peningkatan kualitas interkoneksi industrial antarkawasan yang didukung oleh keberadaan sarana dan prasarana wilayah yang semakin handal akan membuat daya tarik Sulsel sebagai daerah tujuan investasi akan semakin meningkat. Demikian pula halnya dengan keberhasilan pelaksanaan agenda A yang mewujudkan bentuk ketersediaan tenaga kerja terampil atau bahkan tenaga kerja berpengetahuan (*knowledge worker*). Dengan kata lain, laju pembangunan industri-industri strategis pada tahapan pembangunan ini diharapkan akan menjadi semakin tinggi. Laju ini perlu terus diperlihara atau bahkan ditingkatkan antara lain dengan menawarkan insentif-insentif yang semakin menarik bagi para calon investor. Untuk maksud tersebut, kajian-kajian berkesinambungan berkaitan dengan kelayakan suatu industri dan insentif yang dibutuhkan, perlu terus dilakukan oleh pemerintah bekerja sama dengan perguruan tinggi dan atau swasta. Hal ini nyaris merupakan keniscayaan, karena pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan akan cenderung mengalami stagnasi tanpa kehadiran industri-industri seperti itu.

Dalam deretan industri strategis itu, industri kelautan perlu mendapatkan perhatian khusus. Itu karena pada satu sisi industri kelautan memiliki basis sumberdaya yang kuat di Sulawesi Selatan sehingga sangat potensial untuk diandalkan sebagai sumber peningkatan PDRB; sedangkan pada sisi lain, industri kelautan merupakan salah satu andalan pengembangan ekonomi Indonesia di masa depan. Dengan berkembangnya industri itu di Sulsel berarti kontribusi Sulsel dalam memperkuat perekonomian Indonesia akan semakin besar. Diproyeksikan bahwa pada akhir tahapan pembangunan ini, industri kelautan telah memiliki bentuk dan arah pengembangan yang semakin jelas.

Uraian program-program prioritas yang perlu dilaksanakan pada tahapan pembangunan ini menunjukkan bahwa motor pendorong pengembangan ekonomi Sulawesi Selatan masih seperti pada tahapan pembangunan sebelumnya, tetapi dengan kapasitas yang semakin baik. Peningkatan kapasitas dimaksud terutama dipicu oleh keterkaitan industrial antar kawasan seiring dengan semakin berkembangnya perekonomian di berbagai kawasan andalan, dalam arti pola agribisnis dapat dipraktikkan dengan semakin baik yang diikuti dengan pengembangan agro-industri, khusus untuk kawasan andalan yang berbasis pada pertanian. Di samping itu, keberadaan berbagai industri strategis memberikan kontribusi yang semakin signifikan terhadap pembentukan PDRB Sulsel, secara langsung oleh kegiatan industri itu sendiri, sedangkan secara tidak langsung memacu berkembangnya sektor jasa di Sulawesi Selatan.

Rangkaian program yang diuraikan di atas diharapkan akan semakin memacu laju pertumbuhan perekonomian propinsi yang berkualitas yang mewujudkan dalam bentuk meningkat kesejahteraan masyarakat dan berkurangnya kesenjangan kesejahteraan antardaerah, antarkelompok dan bahkan antarindividu, serta menurunnya angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin.

4. RPJM Keempat (2023 - 2028)

Program prioritas pada tahapan pembangunan ini adalah program-program yang memanfaatkan momentum pembangunan yang berhasil dipicu pada 3 (tiga) tahapan pembangunan sebelumnya dan program-program untuk menyempurnakan dan atau mengisi celah kebutuhan pembangunan yang tidak sempat dirampungkan pada tahapan-tahapan pembangunan yang lalu, sehingga visi Sulsel 2028 dapat diwujudkan. Di samping itu, pada tahapan ini, terutama pada paruh terakhir, program-program yang bersifat evaluatif dan inisiatif mulai dilakukan untuk mempersiapkan landasan yang kokoh bagi tahapan pembangunan jangka panjang selanjutnya.

Pada tahapan pembangunan ini, peningkatan kualitas kelembagaan pemerintah masih perlu digalakkan untuk menghasilkan kelembagaan pemerintah yang tanggap terhadap tantangan yang semakin beragam dan semakin kompleks. Tantangan dimaksud terutama dipicu oleh keberadaan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang semakin mandiri dalam menciptakan dan menawarkan berbagai pilihan (*choice*) di semua bidang kehidupan kemasyarakatan serta mampu meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memilih (*voice*) berbagai pilihan yang tersedia. Kondisi seperti ini melahirkan dinamika internal yang sangat intens yang membutuhkan kehadiran pemerintah yang berwibawa. Pada tahapan pembangunan ini peran pemerintah terkesan semakin paradoksial, karena pada satu sisi harus terus berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif atau bahkan mendorong tumbuhkembangnya lembaga-lembaga kemasyarakatan yang menjadi sumber dari dinamika itu, sedangkan pada sisi lain harus menjaga sedemikian rupa agar dinamika dimaksud tetap ter-

kendali. Dengan kata lain, pemerintah harus mampu berperan sebagai pengarah (*steering*) tanpa terjebak menjadi regulator yang menghambat kreativitas dan inovasi. Pengarah yang memelihara dinamika masyarakat agar senantiasa berada diambang chaos (*the edge of chaos*) tanpa terjerumus ke dalam kondisi chaos yang sebenarnya.

Di bidang sosial-ekonomi misalnya, posisi swasta yang semakin kuat dapat saja memicu terjadinya tatanan ekonomi predatorik. Oleh karena itu, diperlukan pemihakan kepada kelompok UMKM tanpa membuat mereka menjadi semakin tergantung dan tanpa memojokkan kelompok swasta. Dengan kata lain, pengembangan kelembagaan sosial-ekonomi masih tetap perlu diberi perhatian khusus, karena potensinya menjadi semakin semakin besar untuk bertiwikrama menjadi tatanan predatorik. Kecenderungan yang sama cukup potensial terjadi di bidang sosial-politik. Kelembagaan masyarakat dapat berkembang ke arah model individualisme yang mengedepankan kompetisi bebas dan atau model lainnya yang tidak sejalan dengan nilai-nilai budaya Sulawesi Selatan. Sejatinya, kecenderungan ini bukanlah suatu ancaman, sepanjang tatanan sosial-politik yang dihasilkan semakin mampu merefleksikan keterwakilan dan atau partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik, menghasilkan pemerintahan yang baik dan bersih (*clean and good government*) dan lebih penting lagi tidak menimbulkan distorsi atau pengkotak-kotakan ideologi dalam masyarakat yang akan menghambat mewujudnya daerah kabupaten dan kota, terutama desa, menjadi komunitas yang kompak dan mandiri.

Potensi konflik, atau bahkan chaos, yang disebutkan di atas membuat upaya re-interpretasi, revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai budaya lokal, yang diinisiasi sejak awal RPJP, tetap relevan untuk dilakukan pada tahapan pembangunan ini. Diharapkan nilai-nilai utama (*core values*) yang dihasilkan oleh program itu dapat menjadi acuan dalam pengembangan kelembagaan masyarakat di bidang lainnya, sehingga potensi konflik dapat dicegah sedini mungkin. Di samping itu, nilai-nilai dasar yang teraktualisasi itu merupakan bahan baku utama dalam proses pendidikan untuk menghasilkan generasi muda yang berkarakter, sekaligus merupakan masukan pada proses pengembangan budaya nasional.

Pada tahapan pembangunan ini, program penyediaan fasilitas pelayanan, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak dasar masyarakat, tetap harus menjadi perhatian pemerintah, malah dengan standar pelayanan minimal yang diupayakan semakin tinggi, demi untuk mengikuti tahap perkembangan sosial-ekonomi masyarakat yang semakin maju yang melahirkan tuntutan kebutuhan yang semakin meningkat pula.

Senyatanya, kewajiban pemerintah untuk menyediakan fasilitas pelayanan semakin diperingan oleh maraknya lembaga-lembaga masyarakat yang turut serta dalam pembangunan fasilitas dimaksud, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan, baik yang berbasis pada pertimbangan sosial dan pertimbangan bisnis. Oleh karena itu, upaya pemerintah perlu difokuskan kepada peningkatan kualiti-

tas serta pemerataan kesempatan atau akses kepada fasilitas tersebut. Untuk bidang pendidikan, upaya dimaksud dapat berupa penyediaan akses yang semakin baik kepada sumber-sumber pengetahuan yang berada di mana saja, yaitu dengan menyediakan fasilitas internet untuk mendukung *e-learning*. Fasilitas ini juga dapat digunakan sebagai kiat pemerintah untuk mendorong peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan pada tataran pendidikan tinggi, khususnya untuk lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang diasuh masyarakat yang berdomisili di daerah kabupaten.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan di bidang kesehatan, seperti kebijakan pada tahapan pembangunan sebelumnya, tetap diintegrasikan dengan program pembangunan desa. Kualitas pelayanan kesehatan, secara langsung maupun secara tidak langsung berupa perbaikan lingkungan perumahan dan peningkatan gizi, dilaksanakan sebagai bagian dari program untuk mewujudkan desa sebagai komunitas yang maju dan mandiri. Dengan kata lain, upaya pemerintah tetap difokuskan kepada pengembangan kelembagaan masyarakat desa agar semakin mampu menemukan dan menyelesaikan masalahnya secara mandiri, di samping mengupayakan pembangunan sarana dan prasarana desa yang belum dapat dilakukan oleh masyarakat secara swadaya. Perlu digarisbawahi bahwa program pemerintah perlu difokuskan pada upaya-upaya untuk menuntaskan masalah keterpencilan desa (secara spasial dan terutama secara sosial-ekonomi), agar semua desa di Sulawesi Selatan dapat terajut dalam struktur tata ruang Sulawesi Selatan.

Pembangunan kawasan andalan perlu terus didorong sehingga semakin mampu menghasilkan produk-produk yang memiliki keunggulan serta tetap berbasis pada keterlibatan masyarakat serta mampu mendukung keberhasilan program pembangunan nasional, seperti peningkatan kedaulatan pangan, bio-energi dan lainnya tanpa memberikan dampak kepada lingkungan hidup dan lingkungan sosial kawasan. Untuk maksud tersebut pemerintah berkewajiban untuk mendorong keterlibatan kelompok usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam proses pemanfaatan sumberdaya kawasan. Dengan kondisi seperti itu, maka kawasan andalan dapat semakin berperan sebagai sentra-sentra pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas, dalam arti pertumbuhan yang mengedepankan pemerataan kesejahteraan dan tanpa mengurangi daya dukung lingkungan hidup.

Struktur tata ruang perlu terus diperdalam sehingga tidak hanya menjangkau kawasan-kawasan andalan yang relatif besar, tetapi juga untuk mendukung hirarki perkotaan yang menjamin semakin meratanya aksesibilitas di seluruh wilayah Sulsel, sehingga Sulawesi Selatan dapat mewujudkan sebagai suatu entitas sosial-ekonomi yang solid.

Percepatan perwujudan daerah kabupaten dan kota sebagai komunitas yang solid perlu terus digalakkan. Untuk maksud itu, pemerintah daerah perlu terus menata diri sehingga mampu berperan sebagai *dirigen* pembangunan daerah yang mengarahkan dinamika internal kabupaten yang semakin intens akibat semakin

mandirinya lembaga-lembaga masyarakat pada berbagai bidang kehidupan. Pemerintah daerah diharapkan mampu memberi warna spesifik kepada proses pelembagaan di daerahnya masing-masing. Untuk itu, penemukenalan yang diikuti dengan reaktualisasi dan revitalisasi pengetahuan dan kearifan lokal (*indigeneous knowledge*), yang diinisiasi sejak awal RPJP, perlu terus dilanjutkan. Keberhasilan upaya ini akan bermuara pada terbentuknya kelembagaan sosial-politik yang mengedepankan kepentingan daerah (sebagai komunitas) sehingga melahirkan kondisi lingkungan sosial-politik yang kondusif yang pada gilirannya mampu mendorong lahirnya pemerintahan daerah yang kuat, bersih dan berwibawa. Demikian pula halnya dengan kelembagaan sosial-ekonomi yang sesuai dan sepadan dengan potensi sumberdaya yang dimiliki sehingga mampu mentransformasikannya menjadi keunggulan lokal.

Keterkaitan fungsional antarkawasan andalan serta pembangunan industri-industri strategis pada tahapan pembangunan sebelumnya melahirkan dampak positif, yaitu terbangunnya aglomerasi industri di Sulawesi Selatan yang membuat proses industri di propinsi ini menjadi semakin efisien yang pada gilirannya akan meningkatkan daya tarik Sulsel sebagai daerah tujuan investasi. Untuk memelihara momentum itu, diperlukan upaya berkesinambungan untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana wilayah, antara lain berupa ketersediaan energi (listrik), aksesibilitas dan pelayanan yang semakin baik di bandara dan di pelabuhan, serta ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas. Upaya lain berupa tawaran insentif dan sejenisnya perlu ditingkatkan.

Aglomerasi industri yang dimaksudkan di atas akan memperkuat dan sekaligus diperkuat oleh kehadiran fasilitas pelayanan regional yang telah berkembang sejak tahap-tahap pembangunan sebelumnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendorong upaya-upaya masyarakat (swasta) untuk terus melakukan diversivitas jenis pelayanan yang tentu saja tanpa melupakan kualitasnya. Kesemuanya akan lebih memperkuat posisi Makassar sebagai pusat pelayanan dan *main-hubs* dalam arti sebenarnya, yaitu tidak saja diakui secara institusional tetapi juga diakui dan didukung oleh para pemangku kepentingan.

Uraian di atas menunjukkan bahwa pada tahapan terakhir RPJP ini, motor pertumbuhan Sulsel akan lebih bertumpu pada pengembangan industri strategis dan fasilitas pelayanan regional yang didukung oleh aktivitas inter dan antarkawasan andalan yang telah semakin berkembang. Perkembangan dimaksud jelas tidak dapat dilepaskan dari peran pemerintah propinsi dan pemerintah daerah yang berhasil memelihara lingkungan kondusif bagi tumbuhkembangnya kelembagaan masyarakat di berbagai bidang yang kemudian menjelma menjadi pemicu berkembangnya industri dan fasilitas pelayan dimaksud.

Di samping itu, upaya revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai tradisional yang diinisiasi sejak awal tahapan permbangunan pertama telah mulai mengkristal dalam wujud seperangkat *core values* yang menjadi acuan pengembangan kelembagaan ma-

syarakat di semua bidang kehidupan yang bermuara pada mewujudnya Sulsel sebagai komunitas pembelajar (*evolutionary learning community*) yang mampu untuk terus mengembangkan diri secara mandiri sehingga dapat meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan dalam arti luas bagi seluruh lapisan masyarakat dan di semua daerah kabupaten/kota.

Singkatnya, visi pembangunan Sulsel 2028, yaitu sebagai *wilayah terkemuka di Indonesia melalui pendekatan kemandirian lokal yang bernafaskan keagamaan* telah dapat diwujudkan. Jika menggunakan jargon RPJP nasional, Sulawesi Selatan telah berhasil memosisikan diri dalam kelompok propinsi yang mandiri, maju, adil dan makmur yang indikatornya telah dijelaskan pada bab 3.

BAB V

KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang bersifat politis, menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kemasyarakatan dan pengelolaan pembangunan di daerah, bagi segenap lembaga pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial kemasyarakatan dan segenap lapisan masyarakat.

Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Gubernur Sulawesi Selatan berkewajiban melaksanakan Peraturan Daerah ini dengan menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kemasyarakatan dan pengelolaan pembangunan serta berkewajiban untuk menggerakkan semua potensi yang tersedia dengan melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang ada dalam menyusun perencanaan, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan di daerah.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berkewajiban menetapkan dan melaksanakan peraturan daerah ini sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang untuk memantau dan mengawasi baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, memantau, evaluasi dan pengendalian serta pengawasan maupun pemanfaatan hasil-hasil pembangunan berdasarkan perundangan yang berlaku.
3. Komunitas masyarakat meliputi unsur lembaga swadaya masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, sektor swasta dan terutama lembaga pendidikan tinggi di daerah ini, ikut bertanggung jawab dan berpartisipasi langsung secara aktif sesuai fungsi masing-masing, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, memantau, evaluasi dan pengendalian serta pengawasan maupun pemanfaatan hasil-hasil pembangunan serta memelihara hasil tersebut sesuai mekanisme peraturan perundangan yang berlaku.
4. Untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini. Gubernur berkewajiban menjabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan, yang memuat uraian kebijakan yang terstruktur dan ditetapkan oleh Gubernur dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat rencana program tahunan yang akan diajukan kedalam Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan APBN serta sumber dana lain yang sah.

BAB VI P E N U T U P

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 yang berisi visi, misi dan arah pembangunan daerah merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Sulawesi Selatan 20 tahun ke depan.
2. RPJPD ini menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Kabupaten/Kota dan menjadi pedoman bagi calon gubernur dan calon wakil gubernur dalam menyusun visi, misi dan program prioritas yang akan menjadi dasar penyusunan RPJM dan RKPD
3. Berhasilnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan yang disesuaikan dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan daerah, tergantung pada peran aktif, sikap mental, tekad dan semangat kedisiplinan, profesional, transparan, partisipasi dan akuntabel para aparatur pemerintah dan lembaga legislatif serta masyarakat luas termasuk dunia usaha;
4. Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab bersama demi tercapainya tujuan pembangunan daerah, perlu dikembangkan peran aktif masyarakat dalam menetapkan dan melaksanakan Peraturan Daerah ini;
5. Hasil pembangunan seharusnya dapat dinikmati sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat secara lebih adil dan merata dalam kesejahteraan masyarakat secara lahir dan batin;

Pada akhirnya, pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang akan memperkuat jati diri masyarakat Sulawesi Selatan dalam suasana demokratis, tenteram dan damai yang mengacu pada nilai-nilai budaya lokal yang bernafaskan keagamaan.

Sehubungan dengan itu, semua kekuatan politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya perlu berperan aktif menyusun program menurut fungsi dan kemampuan masing-masing dalam melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028.

Gubernur Sulawesi Selatan

Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, SH, MSi, MH